



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

Laporan Perékonomian Provinsi Maluku Utara

Agustus 2026



LAPORAN PEREKONOMIAN

PROVINSI MALUKU UTARA

**AGUSTUS
2026**



VISI Bank Indonesia

Menjadi bank sentral digital terdepan dengan tata kelola kuat yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara *emerging markets* untuk Indonesia maju.



MISI Bank Indonesia

1. Mencapai stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
2. Memelihara stabilitas sistem pembayaran melalui penetapan kebijakan, pengaturan, perizinan, penyelenggaraan, pengawasan sistem pembayaran, dan pengelolaan uang rupiah, termasuk memfasilitasi percepatan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
3. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan makroprudensial dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah pusat dan daerah, otoritas atau lembaga terkait, dan/atau mitra strategis lain, serta kerja sama internasional;
5. Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan melalui pengaturan, pengawasan, dan pengembangan pasar uang dan pasar valas, termasuk infrastrukturnya, untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional;
6. Turut meningkatkan inklusi ekonomi-keuangan, dan keuangan berkelanjutan, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, serta perlindungan konsumen melalui perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja Bank Indonesia; dan
7. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan, yang mengutamakan Sistem Tata Kelola Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia yang baik dan profesional, melalui pengelolaan organisasi dan sumber daya.



Nilai – Nilai Strategis

Nilai-nilai strategis Bank Indonesia adalah: (i) kejujuran dan integritas (*trust and integrity*); (ii) profesionalisme (*professionalism*); (iii) keunggulan (*excellence*); (iv) mengutamakan kepentingan umum (*public interest*); dan (v) koordinasi dan kerja sama tim (*coordination and teamwork*) yang berlandaskan keluhuran nilai-nilai agama (*religi*).



Kata Pengantar

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang dinyatakan berlaku pada 17 Mei 1999 (UU Bank Indonesia), dan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang berlaku sejak 17 Juni 2026, dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai tujuan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas Sistem Pembayaran, dan turut menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang dinyatakan berlaku pada 17 Mei 1999 (UU Bank Indonesia), dan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang berlaku sejak 17 Juni 2026, dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai tujuan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas Sistem Pembayaran, dan turut menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sejalan dengan tujuan tersebut, keberadaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia merupakan bagian dari jaringan kerja Bank Indonesia yang berperan sebagai pelaksana kebijakan serta sebagai corong terdepan komunikasi kebijakan Bank Indonesia di daerah.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara dalam pelaksanaan tugasnya memberikan masukan dengan menyusun dan menerbitkan Laporan Perekonomian Provinsi Maluku Utara, yang pokok bahasannya terdiri atas Perkembangan Ekonomi, Perkembangan Inflasi Regional, Kinerja Perbankan dan Sistem Pembayaran Provinsi Maluku Utara, serta Prospek Ekonomi. Kajian ini diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi salah satu bahan informasi bagi penentu kebijakan di daerah.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan perekonomian ini masih ditemukan banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa mengharapkan kritik dan saran serta kerja sama dari semua pihak agar kualitas dan manfaat laporan ini menjadi semakin baik di waktu yang akan datang.

Akhirnya, kepada pihak-pihak yang membantu tersusunnya laporan ini, kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih.

Ternate, September 2026

**KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI MALUKU UTARA**

ttd.

Handi Susila

Deputi Direktur

Daftar Isi

ii	Visi, Misi, Dan Nilai Strategis Bank Indonesia
iii	Kata Pengantar
iv	Daftar Isi
vi	Daftar Gambar
vii	Daftar Tabel
viii	Daftar Grafik
x	Indikator Ekonomi Dan Perbankan Provinsi Maluku Utara
xii	Ringkasan Eksekutif

BAB I

Perkembangan Ekonomi

1.1.	Kondisi Umum	02
1.2.	Perkembangan PDRB dari Sisi Pengeluaran	02
1.2.1.	Konsumsi Rumah Tangga	03
1.2.2.	Kegiatan Ekspor – Impor	04
1.2.3.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	07
1.2.4.	Konsumsi Pemerintah	08
1.3.	Perkembangan PDRB dari Sisi Lapangan Usaha	09
1.3.1.	LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10
1.3.2.	LU Perdagangan Besar dan Eceran	12
1.3.3.	LU Pertambangan dan Industri Pengolahan	13
	Boks 1: Optimalisasi Kota Pusaka Ternate: Pariwisata Berbasis Pusaka untuk Penguatan Nilai Tambah Lokal	16

BAB II

Perkembangan Inflasi Provinsi Maluku Utara

2.1.	Kondisi Umum Inflasi IHK Maluku Utara	22
2.2.	Perkembangan Inflasi IHK Maluku Utara	22
2.3.	Perkembangan Inflasi Spasial Provinsi Maluku Utara	25
2.4.	Prakiraan Inflasi Triwulan III 2026	26
2.5.	Koordinasi Pengendalian Inflasi di Maluku Utara	27
	Boks 2: Strategi TPID Maluku Utara dalam Menjaga Stabilitas Harga pada Momen HBKN Iduladha Tahun 2026	31

BAB III

Stabilitas Keuangan Daerah

3.1.	Stabilitas Keuangan Daerah	36
3.1.1.	Asesmen Sektor Rumah Tangga	36
3.1.2.	Asesmen Sektor Korporasi	38
3.1.3.	Asesmen Sektor Institusi Keuangan (Perbankan)	41
3.2.	Pengembangan Akses Keuangan Dan (UMKM)	44

BAB IV

PENYELENGGARAAN SP DAN PUR

4.1	Kondisi Umum	48
4.2	Perkembangan Sistem Pembayaran Tunai	48
4.2.1	Aliran Uang Masuk/Keluar (<i>Inflow/Outflow</i>)	48
4.2.2	Upaya Menjaga Kebutuhan Uang Tunai	49
4.3	Perkembangan Sistem Pembayaran Non Tunai	49
4.3.1	Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)	49
4.3.2	Transaksi Bank Indonesia - Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)	50
4.3.3	Transaksi Bank Indonesia Fast Payment (BI-FAST)	51
4.3.4	Perkembangan Implementasi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)	51
4.3.5	Transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)	53
4.3.6	Transaksi <i>E-Commerce</i>	54
4.4	Prospek Sistem Pembayaran Triwulan III Tahun 2026	55

BAB V

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

5.1.	Perkembangan Ketenagakerjaan	58
5.1.1	Tenaga Kerja	58
5.1.2	Pengangguran	59
5.2.	Kondisi Umum Kesejahteraan	59
5.2.1	Kemiskinan dan Kesenjangan	60
5.2.2	Kesejahteraan Petani	62

BAB VI

Prospek Perekonomian

6.1.	Prospek Pertumbuhan Ekonomi	66
6.1.1.	Sisi Pengeluaran	66
6.1.2.	Sisi Lapangan Usaha	67
6.2.	Outlook Inflasi Daerah	68

DAFTAR ISTILAH	71
----------------	----

DAFTAR SINGKATAN	73
------------------	----



Daftar Gambar

Gambar 1.1	Profil Pertumbuhan Ekonomi Anggota Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI)	16
Gambar 2.1.	Perkembangan Inflasi Spasial Maluku Utara	26
Gambar 2.2.	Pelaksanaan HLM TPID TP2DD se-Maluku Utara Mei 2026	

Daftar Tabel

Tabel 1.1.	Pertumbuhan Provinsi Maluku Utara ADHK Menurut Pengeluaran (Rp Miliar)	03
Tabel 1.2.	PDRB ADHK Provinsi Maluku Utara Menurut Pengeluaran (% , YOY)	03
Tabel 1.3.	Pertumbuhan Sektoral PDRB Sisi Lapangan Usaha (% YoY)	10
Tabel 2.1.	Inflasi tahunan (yoy) triwulan I 2025 – triwulan II 2026 Maluku Utara	23
Tabel 3.1.	Porsi Pengeluaran Rumah Tangga Berdasarkan Kelompok Pengeluaran (%)	37
Tabel 3.2.	Perkembangan Kredit UMKM Sektoral	45
Tabel 5.1.	Perkembangan Ketenagakerjaan di Maluku Utara (Ribu Jiwa)	58
Tabel 5.2.	Nilai Tukar Petani (NTP) Rata-rata Sulampua	59
Tabel 5.3.	IPM Provinsi Maluku Menurut Komponen Penyusunnya	61

Daftar Grafik

Grafik 1.1.	PDRB Seluruh Provinsi di Indonesia pada Triwulan II 2026	02	Grafik 2.5.	Perkembangan Harga Beras, Minyak Goreng, dan Gula Pasir	24
Grafik 1.2.	Pertumbuhan PDRB Provinsi di Sulampua hingga Triwulan I dan II 2026	02	Grafik 2.6.	Perkembangan Harga Bumbu-bumbuan	24
Grafik 1.3.	Perkembangan IKK, IEK, IEK	04	Grafik 2.7.	Pergerakan Harga Emas Global	25
Grafik 1.4.	Kinerja Kredit Konsumsi	04	Grafik 2.8.	Perkembangan Inflasi (mtm) Jelang HBKN Iduladha	31
Grafik 1.5.	Perkembangan Volume Ekspor LN	06	Grafik 3.1.	Indeks Penghasilan dan Ketersediaan Lapangan Kerja Saat Ini	36
Grafik 1.6.	Perkembangan Nilai Ekspor LN	06	Grafik 3.2.	Kontribusi Konsumsi RT terhadap PDRB Maluku Utara	36
Grafik 1.7.	Perkembangan Volume Impor LN	07	Grafik 3.3.	Pangsa Kredit dan DPK Rumah Tangga	36
Grafik 1.8.	Perkembangan Nilai Impor LN	07	Grafik 3.4.	Indeks Ekspektasi Penghasilan dan Ketersediaan Lapangan Kerja	36
Grafik 1.9.	Perkembangan Volume Impor Bahan Baku LN	07	Grafik 3.5.	Porsi Pengeluaran RT Maluku Utara	37
Grafik 1.10.	Perkembangan Nilai Impor Barang Modal LN	07	Grafik 3.6.	Pertumbuhan Kredit Sektor Rumah Tangga	38
Grafik 1.11.	Realisasi PMA dan PMDN Maluku Utara	08	Grafik 3.7.	Pertumbuhan NPL Kredit RT	38
Grafik 1.12.	Kredit Investasi Maluku Utara	08	Grafik 3.8.	Komposisi DPK Sektor Rumah Tangga	38
Grafik 1.13.	Total Investasi PMA dan PMDN Berdasarkan Sektor Triwulan II 2026	08	Grafik 3.9.	Pangsa DPK Sektor Rumah Tangga	38
Grafik 1.14.	Total Investasi PMA dan PMDN Menurut Kabupaten/ Kota di Maluku Utara Triwulan II 2026	08	Grafik 3.10.	Komposisi Impor Maluku Utara	39
Grafik 1.15.	Harga Minyak Global (WTI)	11	Grafik 3.11.	<i>Liaison</i> Komposisi Biaya Korporasi	39
Grafik 1.16.	Luas Panen Padi Maluku Utara	11	Grafik 3.12.	Presentase Penduduk Bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan	39
Grafik 1.17.	Produksi Padi Maluku Utara	11	Grafik 3.13.	PMI Negara Mitra Dagang	40
Grafik 1.18.	Kredit pada Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan Maluku Utara	11	Grafik 3.14.	Pertumbuhan Kredit Korporasi	40
Grafik 1.19.	Survei Konsumen	12	Grafik 3.15.	NPL Kredit Korporasi	40
Grafik 1.20.	Kredit Konsumsi Maluku Utara	12	Grafik 3.16.	Perkembangan Kredit Berdasarkan Sektor <i>Tradable</i>	40
Grafik 1.21.	Impor Bahan Baku Maluku Utara	12	Grafik 3.17.	Perkembangan Kredit Berdasarkan Sektor <i>Non-Tradable</i>	41
Grafik 1.22.	Kredit pada Sektor Pertambangan Maluku Utara	15	Grafik 3.18.	Pertumbuhan DPK Korporasi Maluku Utara	41
Grafik 1.23.	Perkembangan Volume Ekspor MHP	15	Grafik 3.19.	Rasio ROA Perbankan di Maluku Utara	41
Grafik 1.24.	Perkembangan Volume Ekspor Ferronickel	15	Grafik 3.20.	Rasio BOPO Perbankan di Maluku Utara	41
Grafik 1.25.	Perkembangan Volume Ekspor Nickel Matte	15	Grafik 3.21.	Pertumbuhan Kredit Perbankan Maluku Utara	42
Grafik 1.26.	Kredit pada Sektor Industri Pengolahan	15	Grafik 3.22.	NPL Perbankan di Maluku Utara	42
Grafik 1.27.	Perkembangan Harga Nickel Global	15	Grafik 3.23.	Pertumbuhan DPK Perbankan Maluku Utara	42
Grafik 2.1.	Laju Inflasi Tahunan (yoy) Maluku Utara Dibandingkan dengan Nasional	22	Grafik 3.24.	LDR Perbankan di Maluku Utara	43
Grafik 2.2.	Perbandingan Inflasi Gabungan Kota IHK Provinsi di Sulampua	22	Grafik 3.25.	Pangsa Pembiayaan Syariah	43
Grafik 2.3.	Perkembangan Inflasi Bulanan (mtm)	22	Grafik 3.26.	Penyaluran Pembiayaan Syariah	43
Grafik 2.4.	Perkembangan Harga Daging Ayam, Daging Sapi, dan Telur Ayam	24	Grafik 3.27.	Pangsa Pembiayaan Syariah Terhadap Total Penyaluran Kredit Perbankan	43
			Grafik 3.28.	Penghimpunan DPK Syariah	44
			Grafik 3.29.	Komposisi DPK Syariah	44
			Grafik 3.30.	Pangsa DPK Syariah Terhadap Total DPK Perbankan	44

Daftar Grafik

Grafik 3.31.	Pertumbuhan Kredit UMKM	44	Grafik 4.13.	Perkembangan <i>Merchant</i> QRIS di Maluku Utara	53
Grafik 3.32.	Pertumbuhan Sub Kredit UMKM	45	Grafik 4.14.	Perkembangan Volume Transaksi QRIS di Maluku Utara	53
Grafik 3.33.	Rasio NPL Kredit UMKM	45	Grafik 4.15.	Perkembangan Nominal Transaksi QRIS di Maluku Utara	53
Grafik 3.34.	Pangsa Kredit UMKM Terhadap Total Kredit	45	Grafik 4.16.	Perkembangan Jumlah Pengguna QRIS di Maluku Utara	53
Grafik 4.1.	Perkembangan Transaksi Tunai di Maluku Utara s.d Periode Triwulan II 2026	49	Grafik 4.17.	Perkembangan Nominal Transaksi <i>E-Commerce</i> di Maluku Utara	54
Grafik 4.2.	Perkembangan Komposisi Inflow Maluku Utara s.d Periode TW II 2026	49	Grafik 4.18.	Pilihan Metode Pembayaran <i>E-Commerce</i> di Maluku Utara Triwulan II 2026	54
Grafik 4.3.	Perkembangan Komposisi Outflow Maluku Utara s.d Periode TW II 2026	49	Grafik 4.19.	Pilihan Kategori Produk <i>E-Commerce</i> Triwulan II 2026	54
Grafik 4.4.	Perkembangan Jumlah Lembar Warkat SKNBI Maluku Utara	50	Grafik 5.1.	Penduduk Bekerja Menurut Kegiatan Formal/Informal	58
Grafik 4.5.	Perkembangan Nominal Transaksi SKNBI Maluku Utara	50	Grafik 5.2.	Jumlah Penduduk Miskin di Maluku Utara	60
Grafik 4.6.	Perkembangan Jumlah Transaksi RTGS Maluku Utara	50	Grafik 5.3.	Indeks Kedalaman Kemiskinan	60
Grafik 4.7.	Perkembangan Nominal RTGS Maluku Utara	50	Grafik 5.4.	Indeks Keparahan Kemiskinan	61
Grafik 4.8.	Perkembangan Volume Transaksi BI-Fast di Maluku Utara	51	Grafik 5.5.	Perkembangan Gini Ratio Maluku Utara	61
Grafik 4.9.	Perkembangan Nominal Transaksi BI-Fast di Maluku Utara	51	Grafik 5.6.	Perkembangan NTP Maluku Utara	62
Grafik 4.10.	Perkembangan Penggunaan Kartu ATM/Debit di Maluku Utara	52	Grafik 5.7.	Perkembangan Rata-Rata NTUP Maluku Utara	62
Grafik 4.11.	Perkembangan Volume Kartu Kredit di Maluku Utara	52	Grafik 5.8.	Indeks yang Diterima & Dibayar Petani	63
Grafik 4.12.	Perkembangan Nominal dan NPL Kartu Kredit di Maluku Utara	52			

Indikator Ekonomi dan Perbankan

Provinsi Maluku Utara

A. Inflasi dan PDRB

INDIKATOR	2025								2026			
	TW I	%yoy	TW II	%yoy	TW III	%yoy	TW IV	%yoy	TW I	%yoy	TW II	%yoy
Indeks Harga Konsumen	109,23		110,19		108,48		110,08		112,03		115,76	
Laju Inflasi Tahunan (% yoy)		2,32		2,01		-0,17		1,63		2,56		5,05
PDRB - harga konstan (Rp miliar)	16.765,78	34,58	17.630,67	32,09	18.896,07	39,10	21.207,85	29,81	20.117,22	19,64	20.616,27	15,35
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.613,96	3,99	1.647,54	2,58	1.733,97	1,34	1.708,42	4,93	1682,44	4,24	1.715,18	4,11
Pertambangan dan Penggalian	3.724,71	48,38	4.020,27	60,57	4.654,32	77,33	4.610,26	35,06	4141,78	11,2	3.687,87	-8,27
Industri Pengolahan	6.309,99	75,30	6.701,87	57,51	8.482,91	70,06	9.246,20	50,93	8716,56	37,09	9.452,39	35,84
Pengadaan Listrik, Gas dan Produksi Es	17,24	65,34	17,35	69,59	17,62	61,27	17,77	3,61	18,05	4,74	18,40	6,08
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,65	8,12	7,67	6,85	7,98	7,47	7,72	3,10	7,91	3,5	8,01	4,31
Konstruksi	569,83	3,22	622,14	9,21	693,77	15,90	739,19	23,02	602,16	5,67	680,56	9,39
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.625,41	9,17	1.640,35	8,95	1.806,12	8,61	1.809,24	15,16	1839,77	14,6	1.869,91	13,99
Transportasi dan Pergudangan	441,68	9,03	446,00	8,20	484,27	9,61	490,07	13,79	488,29	10,55	484,57	7,76
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	34,57	3,51	35,11	1,73	38,49	5,52	37,21	7,94	39,81	14,7	38,52	7,76
Informasi dan Komunikasi	389,45	3,12	390,71	2,42	399,82	1,76	395,42	2,30	396,70	1,86	402,94	3,13
Jasa Keuangan dan Asuransi	301,86	13,78	292,12	8,89	342,06	9,05	342,59	7,58	324,13	7,38	310,98	6,46
Real Estate	9,43	6,62	9,47	4,35	9,87	3,24	10,44	10,92	10,44	10,75	10,57	11,65
Jasa Perusahaan	26,54	5,79	26,95	6,52	28,44	7,42	28,37	9,00	28,75	8,33	28,11	4,30
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.226,74	4,57	1.282,51	[0,06]	1.241,87	1,01	1.233,10	-3,91	1287,29	4,92	1.381,25	9,39
Jasa Pendidikan	243,80	4,09	246,56	2,04	259,49	5,09	264,65	9,12	266,72	9,40	268,43	8,87
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	175,02	5,20	175,54	3,43	186,47	4,91	191,36	9,99	191,15	9,21	185,90	5,90
Jasa lainnya	68,00	6,23	68,49	5,67	71,58	6,54	75,83	12,40	75,28	10,7	72,67	6,11
Konsumsi Rumah Tangga	4.295,60	4,92	4.424,22	4,58	4383,7	5,71	4630,1	5,18	4.510,70	4,94	4.618,47	4,39
Konsumsi Lembaga Nonprofit Rumah Tangga	113,54	[0,65]	112,93	1,77	105,81	-3,14	111,81	-2,09	113,94	1,78	116,85	3,47
Konsumsi Pemerintah	1.724,19	9,87	2.068,02	-3,40	2.158,50	-5,65	2.497,96	-24,28	1.947,28	12,94	2.064,13	-0,19
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	6.551,10	19,70	7.448,67	15,04	8.645,78	30,47	10.057,81	26,04	7.735,44	17,57	8.478,41	10,77
Perubahan Inventori	[168,27]	[146,38]	[320,47]	-341,62	284,67	316,84	283,58	-160,16	[214,81]	27,66	[391,61]	22,20
Ekspor Barang dan Jasa	46.126,79	51,17	48.176,88	32,58	52.784,20	56,19	53.346,42	24,96	53.247,31	15,23	55.078,10	14,07
Impor Barang dan Jasa	41.857,10	41,15	44.279,57	40,21	50.287,63	47,73	49.719,80	19,30	47.222,64	31,37	49.348,08	11,27

B. Perbankan

	2025								2026			
	TW I	%yoy	TW II	%yoy	TW III	%yoy	TW IV	%yoy	TW I	%yoy	TW II	%yoy
Bank Umum												
Total Aset (Rp Miliar)	18.323	7,37	19.109	10,66	20.604	12,45	23.334	22,11	21.164	15,51	23.909	25,12
DPK (Rp miliar)	13.282	4,14	15.091	13,59	15.845	19,30	16.863	11,74	16.915	27,35	19.543	29,50
- Giro	4.112	-15,24	5.704	13,38	4.982	21,17	6.897	20,92	6.979	69,73	9.221	61,66
- Tabungan	7.394	17,66	7.559	13,18	8.895	20,30	8.093	7,07	8.182	10,66	8.299	9,79
- Deposito	1776,27	9,72	1.829	16,04	1.968	10,81	1.873	2,42	1.754	-1,25	2.023	10,61
Kredit (Rp miliar)	33.971	35,03	33.443	23,12	32.786	-3,49	35.109	4,98	33.969	-0,01	34.218	2,32
- Modal Kerja	9.153	15,97	8.893	3,85	8.573	-6,33	9.197	3,42	8.255	-9,80	8.477	-4,67
- Investasi	14.056	94,35	13.631	64,56	13.041	-7,22	14.458	6,07	14.068	0,08	14.327	5,11
- Konsumsi	10.762	7,27	10.919	5,84	11.173	3,81	11.454	4,90	11.646	8,21	11.413	4,52
LDR (%)	255,76		221,60		206,92		87,36		96,87	-62,13	84,85	-61,71
NPL Korporasi (%)	1,28		1,46		2,23		1,98		1,94		1,86	

C. Sistem Pembayaran

INDIKATOR	2025								2026			
	TW I	%yoy	TW II	%yoy	TW III	%yoy	TW IV	%yoy	TW I	%yoy	TW II	%yoy
Inflow (Rp miliar)	655,5	-19,4	560,24	-20,4	363,95	-27,90	201,98	-34,10	814,05	24,19	454,77	-18,83
Outflow (Rp miliar)	837,2	30,8	477,09	-61,0	863,62	-0,84	1131,76	-15,28	725,96	-13,29	417,87	-12,41
Nominal Kliring (Rp miliar)	433,6	19,1	439,22	3,5	629,23	28,49	721,75	25,11	484,03	11,63	442,209	0,68
Nominal RTGS (Rp miliar)	2403,1	61,4	2028,01	10,5	2145,57	17,24	2.809,39	12,20	1.837,43	-23,54	2580,42	27,24

Ringkasan Eksekutif

Perkembangan Ekonomi Daerah

Perekonomian Provinsi Maluku Utara pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 15,35% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 19,64% (yoy). Perlambatan tersebut terutama dipengaruhi oleh terbatasnya pasokan bijih nikel. Meski demikian, Maluku Utara tetap menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, ditopang oleh berlanjutnya ekspor produk hilir nikel dan mulai berkembangnya ekspor komoditas aluminium.

Dari sisi pengeluaran, Perlambatan terutama disebabkan oleh melambatnya PMTB seiring sikap wait and see pelaku usaha menanti kepastian evaluasi kuota RKAB, perlambatan konsumsi pemerintah akibat keterbatasan ruang fiskal daerah, serta perlambatan ekspor luar negeri sejalan dengan penurunan produksi akibat keterbatasan kuota RKAB. Dari sisi lapangan usaha, perlambatan terutama terjadi pada LU Pertambangan dan Penggalian serta LU Industri Pengolahan seiring pemangkasan kuota RKAB Minerba yang menahan aktivitas pertambangan bijih nikel di sisi hulu dan membatasi pasokan bahan baku bagi industri pengolahan di sisi hilir. Kuota RKAB yang diterima KI Weda Bay masih di bawah kebutuhan produksi dan telah terserap sepenuhnya pada April 2026, sehingga kapasitas peningkatan produksi menjadi terbatas.

Perkembangan Inflasi Daerah

IHK Maluku Utara pada triwulan II 2026 tercatat mengalami inflasi sebesar 5,05% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan I 2026 sebesar 2,56% (yoy) dan berada di atas rentang sasaran inflasi nasional $2,5 \pm 1\%$. Tekanan inflasi terutama bersumber dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang mencatat inflasi 6,73% (yoy) dengan andil 2,34% (andil yoy), diikuti Kelompok Transportasi sebesar 12,22% (yoy) dengan andil 1,25% (andil yoy), serta Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 6,69% (yoy) dengan andil 0,49% (andil yoy). Dari sisi komoditas, tekanan terutama berasal dari tarif angkutan udara, ikan cakalang/ikan sisik, bensin, emas perhiasan, dan bahan bakar rumah tangga.



Meski meningkat, sumber tekanan inflasi relatif teridentifikasi dan terutama dipengaruhi oleh gangguan pasokan pangan serta penyesuaian harga energi dan transportasi. Kenaikan harga ikan segar dipengaruhi kondisi perairan yang kurang kondusif dan tingginya biaya operasional nelayan, sementara pasokan hortikultura terkendala gangguan produksi di sejumlah daerah pemasok. Tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan tarif angkutan laut seiring pemberian subsidi pemerintah daerah serta deflasi pada beberapa komoditas pangan. Memasuki triwulan III 2026, tekanan inflasi diperkirakan berangsur mereda didukung normalisasi harga hortikultura dan perbaikan pasokan ikan segar, meskipun perkembangan harga energi dan biaya distribusi tetap perlu dicermati.

Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan & UMKM

Indeks Keyakinan Konsumen di Maluku Utara pada triwulan II 2026 tetap tinggi sebesar 146,76 menunjukkan adanya optimisme masyarakat yang tinggi terhadap kondisi perekonomian pada triwulan II 2026.

Secara keseluruhan NPL kredit di Maluku Utara masih berada di bawah 5%. NPL keseluruhan pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 1,86%, yang menunjukkan tren yang membaik dan mencatatkan bahwa risiko kredit tetap terjaga pada level yang aman. Hal ini mengindikasikan bahwa stabilitas sistem keuangan di Provinsi Maluku Utara pada triwulan II 2026 masih terkendali di tengah pertumbuhan ekonomi melambat.

Perkembangan Sistem Pembayaran

Pada triwulan II 2026, digitalisasi sistem pembayaran di Maluku Utara terus menunjukkan penguatan. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan volume transaksi QRIS secara yang mencapai 239% (yoy) serta pertumbuhan volume transaksi BI-FAST yang tetap tinggi sebesar 53,45% (yoy). Perkembangan tersebut menunjukkan semakin luasnya penggunaan instrumen pembayaran digital oleh

masyarakat dalam berbagai aktivitas ekonomi sehari-hari.

Dari sisi transaksi tunai, kebutuhan uang kartal tetap terjaga, dengan transaksi kas yang mencatatkan net inflow sebesar Rp36,92 miliar pada Triwulan II 2026. Secara keseluruhan, perkembangan sistem pembayaran di Maluku Utara menunjukkan berlanjutnya transformasi menuju ekosistem pembayaran yang semakin digital, dengan tetap didukung oleh kecukupan uang Rupiah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Kondisi ketenagakerjaan di Maluku Utara menunjukkan peningkatan, namun diikuti dengan tantangan pada indikator kesejahteraan. Dari sisi pasar tenaga kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tercatat meningkat 0,44 persen poin dibandingkan periode sebelumnya, sejalan dengan bertambahnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) sebanyak 3,97 ribu orang. Sejalan dengan itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) membaik menjadi 4,40%, turun 0,06 persen poin dibandingkan periode pencatatan sebelumnya (4,46%).

Meskipun indikator ketenagakerjaan membaik, tingkat kemiskinan di Maluku Utara mengalami peningkatan. Penduduk miskin tercatat sebesar 77,85 ribu orang, bertambah 3,04 ribu orang yang tersebar baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Kenaikan angka kemiskinan ini utamanya didorong oleh peningkatan Garis Kemiskinan (GK) sebesar 4,61%. Peningkatan tekanan harga ini turut menekan daya beli masyarakat perdesaan, tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) Triwulan II 2026 yang menurun menjadi 101,71, lebih rendah dibandingkan Triwulan I 2026 sebesar 102,57.

Prospek Perekonomian

Perekonomian Provinsi Maluku Utara pada tahun 2026 diperkirakan tumbuh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Perlambatan pertumbuhan ekonomi terutama dipengaruhi oleh penurunan kuota RKAB

nikel tahun 2026 dengan alokasi yang disetujui lebih rendah dibandingkan tahun 2025, serta keterbatasan pasokan sulfur yang berpotensi menghambat proses pengolahan limonit sebagai bahan baku utama industri pengolahan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga diperkirakan tertahan oleh menurunnya alokasi belanja pemerintah pada tahun 2026 dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga dukungan stimulus fiskal terhadap perekonomian menjadi lebih terbatas.

Inflasi Maluku Utara tahun 2026 diproyeksikan tetap dalam sasaran $2,5\% \pm 1\%$ (yoy), meski menghadapi risiko dari gangguan cuaca, lonjakan permintaan HBKN, penyesuaian tarif energi, serta moderasi harga emas global. Tekanan tersebut diperkirakan dapat diredam oleh peningkatan produktivitas tangkapan ikan dan hasil tani hortikultura seiring dengan fenomena El-Nino lemah, tidak adanya kenaikan cukai rokok, serta penguatan sinergi pengendalian inflasi melalui strategi 4K oleh TPID se-Provinsi Maluku Utara.







01

PERKEMBANGAN EKONOMI

PDRB Maluku Utara pada Triwulan II 2026 tumbuh 15,35% (yoy)

Perekonomian Provinsi Maluku Utara pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 15,35% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 19,64% (yoy). Perlambatan tersebut terutama dipengaruhi oleh terbatasnya pasokan bijih nikel. Meski demikian, Maluku Utara tetap menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, ditopang oleh berlanjutnya ekspor produk hilir nikel dan mulai berkembangnya ekspor komoditas aluminium.

Dari sisi pengeluaran, perlambatan terutama didorong oleh melambatnya PMTB seiring sikap *wait and see* pelaku usaha menanti kepastian evaluasi kuota RKAB, disertai perlambatan konsumsi pemerintah akibat keterbatasan ruang fiskal daerah. Dari sisi lapangan usaha, perlambatan terutama terjadi pada LU Pertambangan dan Penggalian serta LU Industri Pengolahan seiring pemangkasan kuota RKAB Minerba yang menahan aktivitas pertambangan bijih nikel di sisi hulu dan membatasi pasokan bahan baku bagi industri pengolahan di sisi hilir. Kuota RKAB yang diterima KI Weda Bay masih di bawah kebutuhan produksi dan telah terserap sepenuhnya pada April 2026, sehingga kapasitas peningkatan produksi menjadi terbatas.

Pertumbuhan yoy
Triwulan II 2026

15,35%

Pertumbuhan qtg
Triwulan II 2026

2,48%

1.1. Kondisi Umum

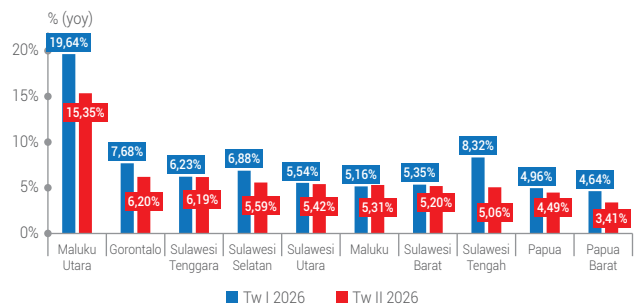
Ekonomi Provinsi Maluku Utara pada triwulan II 2026 tumbuh positif sebesar 15,35% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 19,64% (yoy). Walaupun demikian, pertumbuhan tersebut kembali menempatkan Provinsi Maluku Utara sebagai provinsi dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia sejalan dengan masih berlanjutnya aktivitas industri pengolahan nikel.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada triwulan II 2026 terutama bersumber dari LU Industri Pengolahan, diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Administrasi Pemerintahan, serta Konstruksi. Perlambatan tersebut sejalan dengan telah terealisasinya sepenuhnya kuota RKAB kawasan Weda Bay pada April 2026, sehingga ruang peningkatan produksi pertambangan menjadi lebih terbatas. Di sisi lain, pertumbuhan LU Industri Pengolahan tetap kuat seiring berlanjutnya operasional dan penambahan kapasitas smelter nikel di Kawasan Industri Weda Bay.

Dari sisi pengeluaran, perlambatan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada triwulan II 2026 terutama dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan PMTB, ekspor barang dan jasa, serta konsumsi rumah tangga, disertai kontraksi konsumsi pemerintah. Perlambatan tersebut terutama tercermin dari perlambatan pertumbuhan PMTB seiring sikap wait and see pelaku usaha dalam merealisasikan investasi menunggu kepastian hasil evaluasi RKAB, sementara konsumsi pemerintah turut menahan pertumbuhan sejalan dengan keterbatasan ruang fiskal di daerah akibat pemangkasan TKDD tahun 2026.

Meskipun melambat sejalan dengan kendala pasokan bijih nikel di LU Tambang, ekspor barang dan jasa masih menjadi sumber pertumbuhan utama dengan andil

Grafik 1.2. Pertumbuhan PDRB Provinsi di Sulampua hingga Triwulan I dan II 2026



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

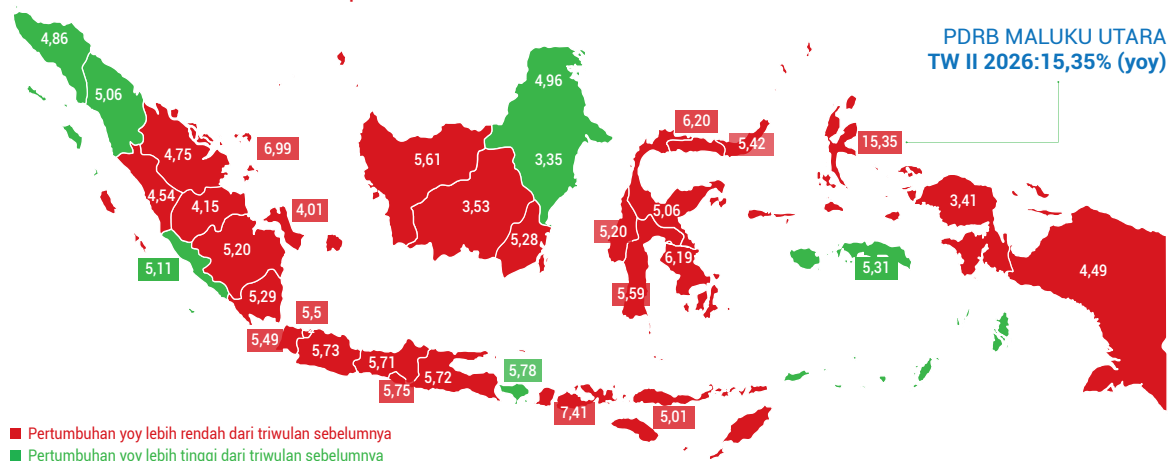
terbesar sebesar 38,02% (yoy), didukung oleh tetap kuatnya aktivitas industri pengolahan nikel serta mulai terealisasinya ekspor perdana produk turunan aluminium.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2026 terjadi di sebagian besar wilayah Sulampua, dengan 9 dari 10 provinsi mencatat pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Meskipun demikian, Maluku Utara tetap mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi di kawasan Sulampua maupun secara nasional.

1.2. Perkembangan PDRB dari Sisi Pengeluaran

Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada triwulan II 2026 tetap tinggi dan tercatat sebagai yang tertinggi secara nasional. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Maluku Utara Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada triwulan II 2026 sebesar Rp20,62 triliun atau tumbuh 15,35% (yoy), melambat dibandingkan triwulan I 2026 yang tumbuh 19,64% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tetap berada jauh di atas nasional yang tumbuh 5,29% (yoy). Dibandingkan provinsi lainnya, Maluku Utara tercatat

Grafik 1.1. PDRB Seluruh Provinsi di Indonesia pada Triwulan II 2026



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Tabel 1.1. Pertumbuhan Provinsi Maluku Utara ADHK Menurut Pengeluaran (Rp Miliar)

Komponen Pengeluaran	2025 *					2026 **	
	I	II	III	IV	Tahunan	I	II
Konsumsi Rumah Tangga	4,99	4,58	5,71	5,18	5,12	6,11	4,39
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-2,04	1,77	-3,14	-2,09	-1,38	1,78	3,47
Konsumsi Pemerintah	9,87	-3,4	-5,65	-24,28	-9,12	13,99	-0,19
Pembentukan Modal Tetap Bruto	20,21	18,21	35,85	26,04	25,38	17,85	10,77
Ekspor Barang dan Jasa	51,43	33,56	56,05	24,96	40,13	15,23	14,07
Impor Barang dan Jasa	41,45	24,29	47,05	19,3	31,91	12,78	11,27
PDRB	34,8	31,77	41,36	29,81	34,17	19,64	15,35

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional. Secara umum, perlambatan terutama bersumber dari LU Industri Pengolahan dan LU Pertambangan sejalan dengan pemangkasan kuota RKAB Minerba yang terjadi di seluruh kawasan industri di Maluku Utara, yaitu KI Weda Bay, KI Pulau Obi, dan KI Buli.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara ditopang oleh Ekspor, PMTB, Konsumsi RT, dan Konsumsi LNPRT. Ekspor barang dan jasa tumbuh 14,07% (yoy), tetap tinggi meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 15,23% (yoy), didorong oleh mulai direalisasikan ekspor komoditas baru berupa aluminium ingot dan Nickel Cobalt Manganese Hydroxide (NCMH) dari Kawasan Industri Weda Bay serta kuatnya kinerja produk hilir seperti nickel matte dan nickel plate, di tengah tertahannya volume ekspor feronikel dan Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) akibat keterbatasan pasokan bijih nikel dan gangguan pasokan sulfur global. PMTB tumbuh 10,77% (yoy), sejalan dengan tetap kuatnya realisasi penanaman modal yang mencapai Rp40,25 triliun atau tumbuh 105,34% (yoy) dan terkonsentrasi pada sektor industri logam dasar serta pertambangan di Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan, serta

berlanjutnya penambahan kapasitas produksi di kawasan industri, antara lain beroperasinya fasilitas Guang Tsing dan smelter aluminium. Konsumsi RT tumbuh 4,39% (yoy) seiring aktivitas ekonomi pada periode HBKN Idulfitri dan Iduladha, sementara Konsumsi LNPRT terakselerasi menjadi 3,47% (yoy) didorong meningkatnya aktivitas lembaga keagamaan dan sosial, antara lain penyaluran 100 ekor sapi kurban oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

1.2.1. Konsumsi Rumah Tangga

Pertumbuhan total konsumsi pada Triwulan II 2026 tercatat melambat dibandingkan triwulan sebelumnya, sejalan dengan perlambatan pada konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Sementara itu, konsumsi LNPRT masih tumbuh positif dan menjadi komponen yang menopang kinerja total konsumsi pada triwulan berjalan.

Konsumsi RT tumbuh 4,39% (yoy) pada triwulan II 2026, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,11% (yoy). Perlambatan konsumsi rumah tangga turut dipengaruhi oleh pemangkasan kuota RKAB yang menyebabkan pengurangan tenaga kerja khususnya

Tabel 1.2. PDRB ADHK Provinsi Maluku Utara Menurut Pengeluaran (% ,YOY)

Komponen Pengeluaran	2025*					2026**	
	I	II	III	IV	Tahunan	I	II
Konsumsi RT	4.298	4.424	4.384	4.630	17.736	4.561	4.619
Konsumsi LNPRT	112	113	106	112	443	114	117
Konsumsi Pemerintah	1.724	2.068	2.159	2.498	8.449	1.965	2.064
PMTB	6.579	7.654	9.003	10.058	33.294	7.754	8.478
Perubahan Inventori	-160	-321	284	284	87	-215	-392
Ekspor	46.209	48.283	52.926	53.346	200.764	53.247	55.078
Impor	41.948	44.350	49.964	49.720	185.982	47.309	49.348
PDRB	16.814	17.872	18.896	21.208	74.790	20.117	20.616

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

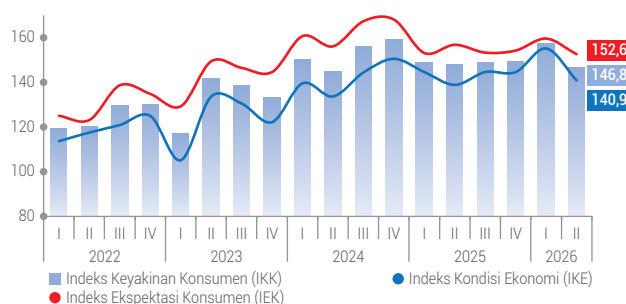
di sektor pertambangan dan menahan aktivitas usaha terkait, sehingga berdampak pada terbatasnya daya beli masyarakat. Kinerja konsumsi rumah tangga yang melambat turut tercermin dari perkembangan keyakinan konsumen pada triwulan II 2026.

Kinerja konsumsi rumah tangga yang melambat turut tercermin dari perkembangan keyakinan konsumen pada triwulan II 2026. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tercatat sebesar 146,8, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 157,4. Penurunan IKK tersebut sejalan dengan perkembangan Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang masing-masing tercatat sebesar 140,9 dan 152,6, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang masing-masing sebesar 155,2 dan 159,6. Penurunan IKE dan IEK tersebut turut tercermin dari beberapa indeks penyusunnya yang secara umum menunjukkan penurunan, baik pada indeks penghasilan saat ini dan ketersediaan lapangan kerja maupun indeks pembelian barang tahan lama.

Sejalan dengan perkembangan konsumsi rumah tangga, penyaluran kredit konsumsi juga mengalami perlambatan. Kredit konsumsi pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 4,52% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,21% (yoy). Perlambatan tersebut turut dipengaruhi oleh pemangkasan tunjangan penghasilan pegawai ASN di Provinsi Maluku Utara akibat keterbatasan fiskal daerah yang berpotensi menahan daya beli masyarakat. Selain itu, pertumbuhan kredit konsumsi pada triwulan I 2026 relatif tinggi sejalan dengan peningkatan aktivitas konsumsi selama periode HBKN Idulfitri, sehingga turut membentuk *low base effect* pada triwulan II 2026.

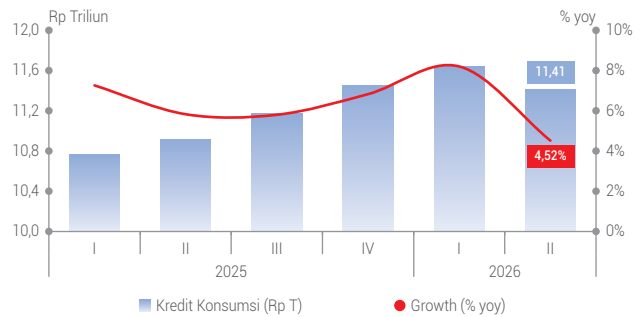
Di lain sisi, komponen konsumsi lembaga non-profit rumah tangga (LNPR) tercatat mengalami akselerasi dengan pertumbuhan sebesar 3,47% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar

Grafik 1.3. Perkembangan IKK, IEK, IEK



Sumber: Survei Konsumen BI

Grafik 1.4. Kinerja Kredit Konsumsi



Sumber: LBUT, diolah

1,78% (yoy). Akselerasi pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan aktivitas lembaga keagamaan dan sosial pada triwulan II 2026, antara lain seiring pelaksanaan rangkaian kegiatan Iduladha serta penyaluran bantuan keagamaan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara berupa penyaluran 100 ekor sapi kurban.

1.2.2. Kegiatan Ekspor – Impor

Kinerja ekspor barang dan jasa Maluku Utara pada triwulan II 2026 masih menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah dan mengalami deselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya. Ekspor barang dan jasa tercatat tumbuh sebesar 14,07% (yoy), melambat dari pertumbuhan triwulan I 2026 sebesar 15,23% (yoy). Sementara itu, impor barang dan jasa mengalami deselerasi dengan pertumbuhan sebesar 11,27% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 12,78% (yoy).

Perlambatan tersebut terutama bersumber dari kinerja ekspor luar negeri, seiring terbatasnya pasokan bijih nikel akibat pemangkasan kuota RKAB Minerba yang menahan aktivitas produksi dan volume ekspor produk olahan nikel.

Kondisi tersebut terkonfirmasi dari data ekspor luar negeri Maluku Utara. Volume ekspor luar negeri pada triwulan II 2026 tercatat berkontraksi 2,88% (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 3,28% (yoy). Sebaliknya, nilai ekspor luar negeri masih tumbuh tinggi sebesar 27,98% (yoy) menjadi bahkan lebih tinggi dibandingkan 25,44% (yoy) pada triwulan I 2026. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan nilai ekspor tidak semata berasal dari kenaikan volume, tetapi juga didukung oleh perubahan komposisi produk ekspor dengan mulai direalisasikannya ekspor produk baru, yaitu aluminium ingot dan Luppen FeNi dari Kawasan Weda Bay.

Tertahannya volume ekspor terutama terjadi pada komoditas olahan nikel yang menjadi tumpuan utama ekspor daerah. Di Kawasan Industri (KI) Weda Bay, aktivitas pertambangan dan pengolahan nikel mengalami penyesuaian seiring pemangkasan kuota RKAB Minerba yang disetujui, dari sekitar 42 juta WMT pada tahun sebelumnya menjadi 12 juta WMT pada 2026. Kuota tersebut telah terealisasi sepenuhnya pada April 2026, sehingga keterbatasan pasokan bijih nikel sebagai bahan baku mendorong pelaku usaha melakukan penyesuaian operasional dengan menurunkan aktivitas produksi yang selanjutnya turut menahan volume ekspor produk olahan nikel.

Kondisi tersebut tercermin pada kinerja dua komoditas ekspor utama, yaitu feronikel yang berkontraksi sebesar 8,76% (yoy) pada triwulan II 2026, berbalik dari pertumbuhan sebesar 3,43% (yoy) pada triwulan I 2026, serta Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) yang berkontraksi sebesar 12,51% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya masih tumbuh sebesar 6,92% (yoy).

Tekanan pada produksi MHP semakin diperberat oleh gangguan rantai pasok bahan baku kimia pendukung di pasar internasional, seiring gangguan distribusi sulfur dari Timur Tengah akibat konflik di kawasan Selat Hormuz dan restriksi ekspor asam sulfat oleh Tiongkok untuk mengamankan pasokan bagi kebutuhan industri domestik. Kondisi tersebut terutama berdampak pada smelter berbasis High Pressure Acid Leaching (HPAL) di Kawasan Weda Bay yang mengalami penurunan produksi sekitar 50% pada triwulan II 2026. Sementara itu, aktivitas smelter berbasis Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) di kawasan tersebut relatif stabil.

Tekanan tersebut turut tercermin pada kinerja produk turunan berbasis HPAL lainnya. Ekspor *electrolyte cobalt* berkontraksi sebesar **51,45% (yoy)**, sementara ekspor *nickel sulphate* dan *cobalt sulphate* berkontraksi sebesar **4,45% (yoy)** pada triwulan II 2026.

Perlambatan pertumbuhan ekspor barang dan jasa pada triwulan II 2026 lebih dalam dapat tertahan oleh mulai terealisasinya ekspor komoditas baru serta kuatnya kinerja produk hilir. Ekspor *nickel matte* triwulan II 2026 tumbuh sebesar 90,52% (yoy), meningkat signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,62% (yoy), sementara ekspor *nickel plate* tumbuh sebesar 212,99% (yoy). Selain itu, mulai direalisasikannya ekspor aluminium ingot dan Nickel Cobalt Manganese Hydroxide (NCMH) turut menopang kinerja ekspor pada periode berjalan, sehingga kontraksi volume ekspor tidak terjadi lebih dalam di tengah terbatasnya pasokan bijih nikel.

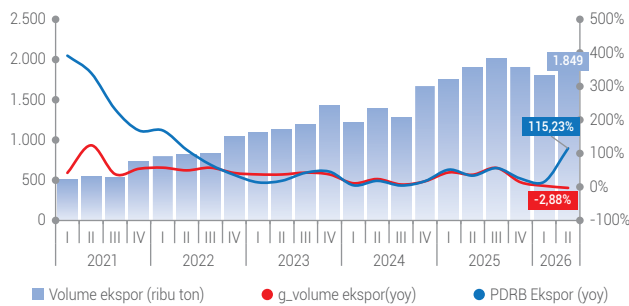
Di tengah tertahannya produksi komoditas utama akibat keterbatasan pasokan bijih nikel, kinerja ekspor yang lebih dalam tertahan oleh relatif stabilnya aktivitas produksi di Kawasan Industri Pulau Obi. Produksi MHP di kawasan tersebut relatif terjaga karena pelaku usaha telah mengamankan persediaan sulfur yang masih mencukupi kebutuhan produksi untuk beberapa bulan ke depan, sehingga gangguan pasokan bahan baku kimia global belum berdampak signifikan terhadap aktivitas pengolahan. Kondisi tersebut turut menopang kinerja ekspor Maluku Utara di tengah tekanan produksi pada kawasan industri lainnya.

Di tengah keterbatasan pasokan bijih nikel dan tertahannya kinerja ekspor komoditas utama, aktivitas pengembangan kapasitas produksi di Kawasan Industri Weda Bay tetap berlanjut. Fasilitas produksi Blue Sparking berkapasitas 402.402 ton per tahun dan smelter aluminium berkapasitas 250 ribu ton per tahun telah beroperasi dengan tingkat utilisasi yang tinggi, sementara fasilitas Guang Tsing berkapasitas 467 ribu ton per tahun telah menyelesaikan tahap commissioning dan mulai beroperasi pada triwulan II 2026. Bertambahnya kapasitas produksi tersebut mendukung peningkatan pasokan produk hilir dan komoditas baru, sehingga turut menahan dampak tertahannya produksi komoditas utama terhadap kinerja ekspor. Ke depan, beroperasinya fasilitas produksi baterai REPT Battero berkapasitas 9 GWh sejak Mei 2026 diperkirakan semakin memperkuat prospek ekspor produk hilir Maluku Utara.

Pada triwulan III 2026, kinerja ekspor barang dan jasa Maluku Utara diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan laporan. Prospek tersebut terutama didorong oleh diterimanya tambahan kuota RKAB Minerba sebesar 25 juta wmt untuk KI Weda Bay pada Agustus 2026, yang melonggarkan kembali pasokan bijih nikel domestik sehingga pabrik pengolahan di hilir dapat meningkatkan tingkat utilitasnya. Prospek tersebut juga didukung oleh bertambahnya kapasitas produksi di kawasan, seiring telah beroperasinya fasilitas Guang Tsing berkapasitas 467 ribu ton per tahun serta rencana pengoperasian industri alat berat listrik pada triwulan III 2026 dengan kapasitas sekitar 2.000 unit *loader* dan 2.000 unit *excavator* per tahun.

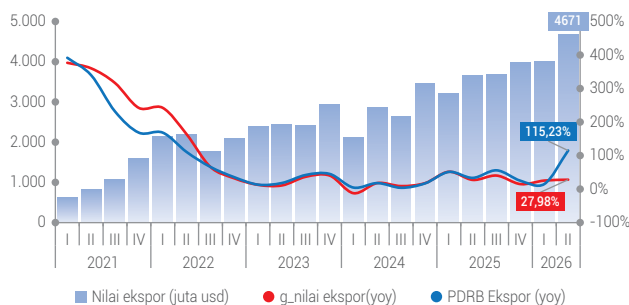
Namun demikian, pemulihan ekspor diperkirakan belum berlangsung merata pada seluruh komoditas. Keterbatasan pasokan sulfur masih menjadi kendala produksi MHP hingga triwulan III 2026, dengan tingkat produksi yang masih berada sekitar 50% dari kondisi normal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemulihan produk berbasis hidrometalurgi masih menghadapi

Grafik 1.5. Perkembangan Volume Ekspor LN



Sumber: Bea Cukai Maluku Utara

Grafik 1.6. Perkembangan Nilai Ekspor LN



Sumber: Bea Cukai Maluku Utara

kendala pasokan bahan baku, di tengah gangguan produksi dan distribusi sulfur global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Dengan demikian, pelanggaran kuota RKAB Minerba diperkirakan lebih banyak mendorong pemulihan komoditas berbasis pirometalurgi, seperti feronikel dan nickel matte. Sementara itu, kinerja produk berbasis hidrometalurgi masih berpotensi tertahan hingga pasokan sulfur kembali normal.

Komponen impor barang dan jasa pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 11,27% (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan I 2026 sebesar 12,78% (yoy). Perlambatan tersebut tercermin pada kinerja impor luar negeri Maluku Utara yang mengalami perlambatan baik dari sisi nilai maupun volume.

Dari sisi nilai, impor luar negeri tumbuh sebesar 36,34% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 59,65% (yoy). Sementara itu, dari sisi volume, pertumbuhan impor luar negeri juga melambat dari 80,97% (yoy) pada triwulan I 2026 menjadi 61,94% (yoy) pada triwulan II 2026.

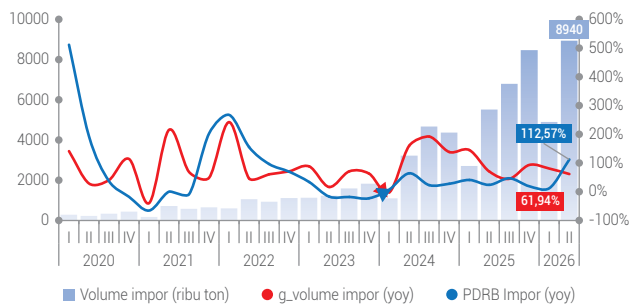
Perlambatan impor pada triwulan II 2026 terutama dipengaruhi oleh perlambatan kinerja impor barang modal. Impor barang modal terkontraksi sebesar 24,20% (yoy), dibandingkan dengan pertumbuhan sebesar -0,54% (yoy) pada triwulan I 2026. Kontraksi tersebut terutama berasal dari kelompok mesin dan peralatan mekanis mengalami kontraksi sebesar 70,92% (yoy). Perkembangan tersebut sejalan dengan masih terbatasnya permintaan barang modal, di tengah sikap *wait-and-see* pelaku usaha di kawasan industri.

Di sisi lain, impor bahan baku tumbuh 78,36% (yoy) pada triwulan II 2026, meningkat dibandingkan pertumbuhan sebesar 61,73% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Impor bijih logam dalam kelompok tersebut meningkat sebesar 83,5% (yoy), antara lain untuk memenuhi kebutuhan bahan baku di tengah terbatasnya pasokan bijih nikel domestik akibat pemangkasan kuota RKAB Minerba. Keterbatasan pasokan tersebut mendorong pemenuhan kebutuhan bahan baku melalui impor bijih nikel dari Filipina, terutama untuk mendukung aktivitas produksi di KI Weda Bay. Sementara itu, kebutuhan bahan baku untuk KI Pulau Obi masih dapat dipenuhi dari pasokan domestik sehingga belum memerlukan impor bijih nikel.

Pada triwulan III 2026, kinerja impor luar negeri Maluku Utara diperkirakan melambat, terutama pada kelompok bahan baku. Tambahan kuota RKAB sebesar 25 juta WMT bagi pelaku usaha di KI Weda Bay diperkirakan meningkatkan pasokan bijih nikel domestik, sehingga kebutuhan pemenuhan bahan baku melalui impor bijih nikel turut menurun. Selain itu, impor bahan baku kimia khususnya sulfur diperkirakan masih tertahan seiring belum membaiknya gangguan produksi dan distribusi sulfur global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah, termasuk belum normalnya jalur perdagangan melalui Selat Hormuz.

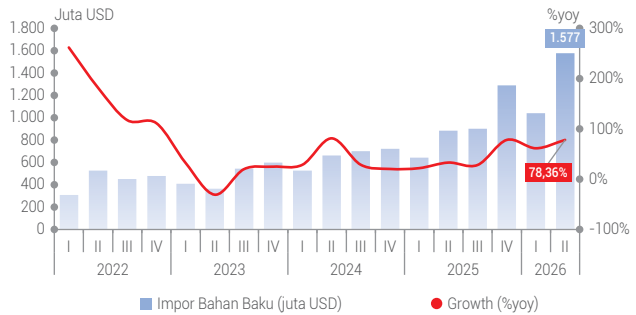
Ke depan, realisasi impor masih dibayangi risiko kecepatan penyerapan tambahan kuota RKAB di lapangan, keberlanjutan tahapan commissioning fasilitas produksi baru yang dapat menahan penurunan impor barang modal, serta perkembangan geopolitik global yang memengaruhi pasokan bahan baku kimia dan bahan bakar.

Grafik 1.7. Perkembangan Volume Impor LN



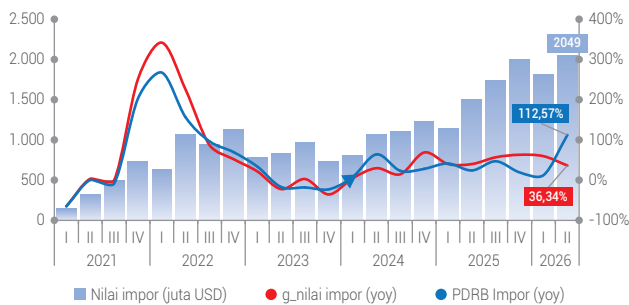
Sumber : Bea Cukai Maluku Utara, diolah

Grafik 1.9. Perkembangan Volume Impor Bahan Baku LN



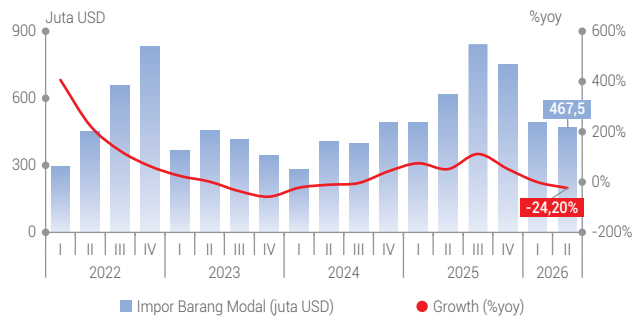
Sumber : Bea Cukai Maluku Utara, diolah

Grafik 1.8. Perkembangan Nilai Impor LN



Sumber : Bea Cukai Maluku Utara, diolah

Grafik 1.10. Perkembangan Nilai Impor Barang Modal LN



Sumber : Bea Cukai Maluku Utara, diolah

1.2.3. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Maluku Utara pada triwulan II 2026 tetap tumbuh positif, namun mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya. PMTB tercatat tumbuh sebesar 10,77% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan I 2026 yang tumbuh sebesar 17,85% (yoy).

Perlambatan PMTB pada triwulan II 2026 sejalan dengan belum adanya kepastian terkait hasil evaluasi kuota RKAB. Evaluasi kuota RKAB untuk kawasan Weda Bay baru akan dilakukan pada sekitar Juli 2026, sehingga pelaku usaha masih mencermati kepastian kuota produksi sebelum merealisasikan penambahan kapasitas pengolahan nikel baru. Kondisi tersebut mendorong pelaku usaha menahan ekspansi kapasitas baru dan mengambil sikap *wait and see*, sehingga turut menahan pertumbuhan PMTB pada triwulan II 2026.

Meskipun demikian, realisasi penanaman modal, baik PMA maupun PMDN, pada triwulan II 2026 masih menunjukkan kinerja yang kuat. Realisasi penanaman modal pada triwulan II 2026 menunjukkan kinerja yang kuat dengan nilai Rp40,25 triliun, tumbuh 105,34% (yoy). Realisasi investasi tercatat sebesar Rp40,25 triliun, dengan investasi

terutama terkonsentrasi di Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Selatan sebagai lokasi utama pengembangan industri hilirisasi nikel di Maluku Utara. Nilai tersebut meningkat dibandingkan realisasi pada triwulan I 2026 yang tercatat sebesar Rp25,20 triliun. Realisasi tersebut masih didominasi oleh PMA sebesar Rp39,50 triliun atau 98,14% dari total investasi, sementara PMDN tercatat sebesar Rp749,72 miliar atau 1,86%, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 9.400 orang. Secara sektoral, investasi masih terkonsentrasi pada sektor Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya serta sektor Pertambangan, dengan total investasi sebesar Rp35,62 triliun atau 88,50% dari total realisasi investasi pada triwulan II 2026. Selanjutnya, investasi pada sektor Listrik, Gas, dan Air tercatat sebesar Rp1,71 triliun (4,25%), sektor Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran sebesar Rp1,39 triliun (3,44%), serta sektor Industri Mineral Non Logam sebesar Rp645,52 miliar (1,60%).

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa investasi di Maluku Utara masih bertumpu pada pengembangan industri hilirisasi nikel beserta infrastruktur pendukungnya. Peningkatan investasi pada sektor Listrik, Gas, dan Air, dari Rp509,19 miliar pada triwulan I 2026 menjadi Rp1,71 triliun

pada triwulan II 2026, mengindikasikan bahwa investasi yang berjalan antara lain diarahkan untuk memperkuat infrastruktur energi guna mendukung fasilitas pengolahan yang telah beroperasi. Dari sisi asal negara, realisasi PMA masih didominasi oleh Hong Kong dan RRT sebesar Rp28,65 triliun, diikuti Singapura sebesar Rp7,54 triliun dan Republik Rakyat Tiongkok sebesar Rp3,31 triliun.

Namun demikian, pembiayaan investasi masih menunjukkan peningkatan. Kredit investasi pada triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp14,33 triliun, tumbuh 5,11% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar Rp14,07 triliun dengan pertumbuhan sebesar 0,08% (yoy). Perkembangan tersebut mengindikasikan bahwa aktivitas investasi masih berlangsung, meskipun ekspansi kapasitas baru cenderung tertahan seiring masih adanya ketidakpastian terkait kuota produksi.

Pada triwulan III 2026, pertumbuhan PMTB Maluku Utara diperkirakan mengalami deselerasi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh tertahannya keputusan investasi pelaku usaha seiring proses evaluasi dan penetapan tambahan kuota RKAB nikel untuk kawasan Weda Bay yang baru memperoleh kepastian pada awal Agustus 2026. Hasil evaluasi menetapkan tambahan kuota RKAB untuk kawasan Weda Bay sebesar 25 juta WMT, lebih rendah

dibandingkan usulan tambahan kuota sebesar 30 juta WMT. Penetapan kuota yang lebih rendah dari usulan tersebut diperkirakan mendorong pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi kapasitas pengolahan maupun investasi baru, sehingga berpotensi menahan pertumbuhan PMTB pada triwulan III 2026.

1.2.4. Konsumsi Pemerintah

Kinerja Konsumsi Pemerintah Maluku Utara pada triwulan II 2026 tercatat mengalami kontraksi sebesar 0,19% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 13,99% (yoy). Perlambatan tersebut terutama dipengaruhi oleh normalisasi belanja pemerintah pasca-periode belanja musiman pada triwulan I 2026 serta penyesuaian kebijakan belanja pegawai di tingkat pemerintah provinsi.

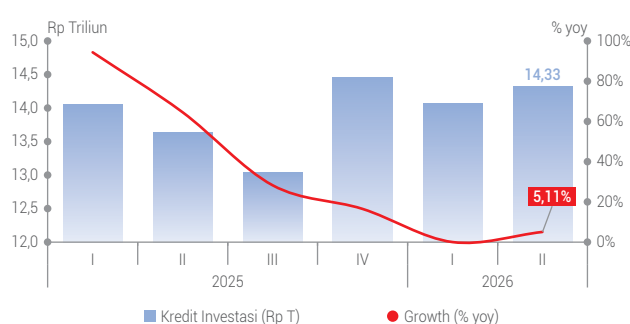
Kontraksi konsumsi pemerintah pada triwulan II 2026 sejalan dengan normalisasi belanja setelah realisasi belanja musiman yang tinggi pada triwulan sebelumnya. Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada ASN yang terkonsentrasi pada triwulan I 2026, sehingga menahan pertumbuhan belanja pegawai secara keseluruhan. Selain itu, pelaksanaan program mudik bersubsidi angkutan

Grafik 1.11. Realisasi PMA dan PMDN Maluku Utara



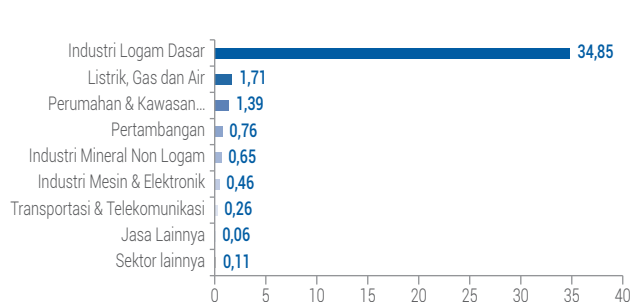
Sumber: Bea Cukai

Grafik 1.12. Kredit Investasi Maluku Utara



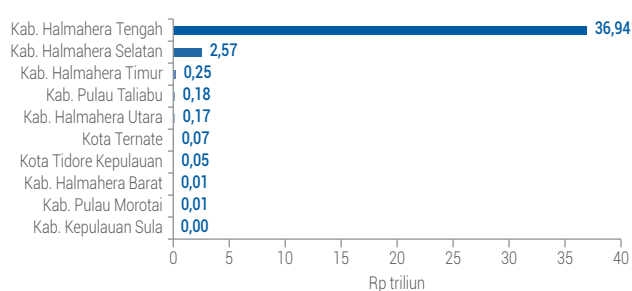
Sumber: Bea Cukai

Grafik 1.13. Total Investasi PMA dan PMDN Berdasarkan Sektor Triwulan II 2026



Sumber: Bea Cukai

Grafik 1.14. Total Investasi PMA dan PMDN Menurut Kabupaten/Kota di Maluku Utara Triwulan II 2026



Sumber: Bea Cukai

Lebaran tahun 2026 oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk moda transportasi kapal laut dan feri pada triwulan I 2026 menciptakan high base effect, sehingga turut menahan konsumsi pemerintah pada triwulan II 2026. Di samping faktor musiman tersebut, pemangkasan komponen Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN Pemerintah Provinsi Maluku Utara sesuai kelas dan jabatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 3 Tahun 2026 diprakirakan menahan realisasi belanja pegawai pada level yang lebih tinggi.

Perkembangan tersebut sejalan dengan realisasi fiskal daerah. Realisasi belanja daerah pada APBD konsolidasi Maluku Utara hingga Mei 2026 tercatat sebesar Rp3,38 triliun, terkontraksi 0,65% (yoy). Realisasi tersebut masih terkonsentrasi pada komponen belanja rutin, tercermin dari belanja gaji dan tunjangan ASN daerah sebesar Rp1,49 triliun atau 44,25% dari total realisasi belanja daerah. Ruang belanja pemerintah daerah juga dipengaruhi oleh Transfer ke Daerah (TKD) yang tercatat mengalami kontraksi sebesar 16,53% (yoy). Penyaluran TKD tersebut masih menghadapi kendala administratif, antara lain tingginya retur penyaluran Tunjangan Guru ASN Daerah akibat permasalahan data rekening penerima serta penyesuaian petunjuk teknis penyaluran DAU Specific Grant, sehingga sebagian belanja pemerintah daerah belum terealisasi secara optimal.

Pada triwulan III 2026, pertumbuhan konsumsi pemerintah Maluku Utara diprakirakan tumbuh positif. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh tambahan ruang fiskal pemerintah daerah seiring penyaluran tambahan transfer dari pemerintah pusat pada Agustus 2026 sebesar Rp397,80 miliar, yang terdiri atas Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (KBDBH) sebesar Rp379,72 miliar dan DAU Tambahan sebesar Rp18,08 miliar. Selain itu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara memperoleh penyaluran kurang bayar DBH sebesar Rp568,14 miliar, dengan sekitar Rp446,13 miliar bersumber dari DBH sumber daya alam, terutama sektor minerba sebesar Rp440,90 miliar. Tambahan transfer tersebut diarahkan untuk mendukung kebutuhan penggalangan ASN daerah dan peningkatan kapasitas fiskal, sehingga berpotensi meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan membuka ruang percepatan realisasi belanja pemerintah. Ruang percepatan tersebut juga didukung oleh upaya pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik yang harus disampaikan paling lambat 22 Juli 2026, di tengah keterbatasan realisasi DAK fisik. Meskipun demikian, realisasi fiskal daerah bergantung pada kecepatan penyerapan dan jenis belanja yang direalisasikan.

1.3. Perkembangan PDRB dari Sisi Lapangan Usaha

Dari sisi lapangan usaha (LU), perlambatan pertumbuhan ekonomi terutama dipengaruhi oleh kinerja LU Pertambangan yang terkontraksi pada triwulan II 2026. Kontraksi ini sejalan dengan pemotongan kuota RKAB Minerba tambang bijih nikel, dimana kuota untuk KI Weda Bay sendiri telah terealisasi sepenuhnya pada April 2026.

Keterbatasan pasokan bahan baku (bijih nikel) turut menahan kinerja LU Industri Pengolahan dan LU Perdagangan Besar dan Eceran. Kendati demikian, ekonomi Maluku Utara tetap tumbuh positif karena kinerja LU Industri Pengolahan yang tetap tumbuh tinggi seiring dengan fasilitas produksi komoditas aluminium di KI Weda Bay yang beroperasi penuh dengan tingkat utilisasi yang optimal.

Dari 17 (tujuh belas) LU penyumbang pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha, terdapat 11 (sebelas) LU tercatat mengalami perlambatan, sedangkan 6 (enam) lapangan usaha tercatat mengalami peningkatan pertumbuhan. Adapun pertumbuhan masing-masing LU pada triwulan II 2026 dapat dilihat pada tabel 1.3.

LU Industri Pengolahan tetap menjadi kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada triwulan II 2026, dengan andil sebesar 13,95% terhadap pertumbuhan PDRB yang tercatat 15,35% (yoy). Kontribusi berikutnya berasal dari LU Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 1,29% serta LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,38%. Sebaliknya, LU Pertambangan dan Penggalian mencatatkan andil negatif sebesar 1,86% dan menjadi penahan utama pertumbuhan pada periode laporan.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2026 bersumber dari pemangkasan kuota RKAB Minerba tahun 2026 yang menahan kinerja industri nikel, baik di sisi hulu maupun hilir. KI Weda Bay hanya memperoleh kuota 12 juta *Wet Metric Tonne* (WMT) atau turun sekitar 71% dibandingkan tahun 2025, dan kuota tersebut telah terealisasi sepenuhnya pada April 2026 sehingga aktivitas penambangan terhenti dalam dua bulan terakhir. Keterbatasan pasokan bijih nikel domestik tersebut mendorong penurunan utilisasi kapasitas produksi smelter, terutama pada industri penghasil *Mixed Hydroxide Precipitate* (MHP) dan feronikel.

Tabel 1.3. Pertumbuhan Sektoral PDRB Sisi Lapangan Usaha (% YoY)

Lapangan Usaha	2024				2024	2025				2025	2026	
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,46	4,54	6,58	3,45	4,51	3,99	2,58	1,34	4,93	3,2	4,24	4,11
Pertambangan dan Penggalian	17,68	0,07	-8,36	29,52	9,48	48,38	60,57	76,65	35,06	53,27	11,2	-8,27
Industri Pengolahan	10,93	21,06	12,87	53,81	25,44	76,64	55,68	74,37	50,93	62,64	37,09	35,84
Pengadaan Listrik dan Gas	21,87	8,67	9,45	65,26	27,22	65,34	69,59	61,27	3,61	43,52	4,74	6,08
Pengadaan Air	6,17	9,49	6,69	4,67	6,71	8,12	6,85	7,47	3,1	6,34	3,5	4,31
Konstruksi	8,02	9,74	7,78	7,21	8,17	3,22	9,21	15,9	23,02	13,05	5,67	9,39
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,73	15,97	12,88	10,84	14,24	7,83	8,95	8,61	15,16	10,19	14,6	13,99
Transportasi dan Pergudangan	12,16	6,95	2,36	5,22	6,51	9,03	9,1	9,17	13,79	10,31	10,55	7,76
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,17	7,85	3,48	2,12	4,12	3,92	3,57	7,22	7,94	5,67	14,7	7,76
Informasi dan Komunikasi	2,85	3,3	3,78	3,67	3,4	3,12	2,42	1,76	2,3	2,4	1,86	3,13
Jasa Keuangan	10,44	10,21	16,53	26,47	16,02	13,78	8,89	9,05	7,58	9,7	7,38	6,46
Real Estate	4,83	7,19	6,92	8,77	6,94	6,62	4,35	3,24	10,92	6,31	10,75	11,65
Jasa Perusahaan	5,86	6,06	2,76	4,52	4,78	5,79	6,52	7,42	9	7,2	8,99	4,3
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	16,57	25,17	4,93	1,32	11,34	4,58	-1,61	1,37	-3,91	-0,04	4,92	9,39
Jasa Pendidikan	1,69	2,93	1,6	2,37	2,15	4,09	2,04	4,67	9,12	4,99	9,4	8,87
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,21	3,38	2,6	3,15	2,84	5,2	3,43	4,32	9,99	5,76	9,21	5,9
Jasa Lainnya	5,14	5,42	3,73	6,55	5,21	6,23	5,67	6,54	12,4	7,76	10,7	6,11
PDRB	11,74	11,98	5,84	25,43	13,92	34,8	31,77	41,36	29,81	34,17	19,64	15,35

Tekanan pada sisi hilir diperberat oleh gangguan pasokan bahan baku penunjang, yaitu sulfur dan asam sulfat, seiring terhambatnya distribusi dari Timur Tengah dan restriksi ekspor oleh Tiongkok. Kondisi tersebut secara spesifik menekan jalur pengolahan hidrometalurgi berbasis *High Pressure Acid Leaching* (HPAL), sementara jalur pirometalurgi melalui *Rotary Kiln Electric Furnace* (RKEF) relatif stabil karena tidak bergantung pada asam sulfat dan tertopang oleh impor bijih nikel dari Filipina. Perlambatan pada kedua LU tersebut turut tertransmisikan ke LU Perdagangan Besar dan Eceran melalui penurunan volume perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapan pendukung kawasan industri, serta melalui berkurangnya tenaga kerja sektor pertambangan yang menahan konsumsi pada perdagangan eceran. Sementara itu, LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan melambat terutama akibat cuaca ekstrem yang membatasi aktivitas perikanan tangkap dan kenaikan biaya melaut.

Perlambatan yang lebih dalam tertahan oleh 6 (enam) LU yang mengalami akselerasi, terutama LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib yang tumbuh 9,39% (yoy) dari 4,92% (yoy) pada triwulan sebelumnya, sejalan dengan perluasan program Makan Bergizi Gratis yang ditargetkan menjangkau seluruh

kabupaten/kota pada akhir tahun 2026, serta LU Konstruksi dan LU Real Estate. Pada triwulan III 2026, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara diperkirakan tetap tumbuh tinggi, ditopang oleh beroperasinya fasilitas produksi baru dan berlanjutnya hilirisasi di kawasan industri, sementara kinerja LU Pertambangan dan Penggalian diperkirakan masih tertahan hingga terdapat kepastian relaksasi kuota RKAB Minerba.

1.3.1. LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Kinerja LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada triwulan II 2026 tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Meski melambat, pertumbuhan LU pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 4,11% (yoy) pada triwulan II 2026, relatif stabil dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,24% (yoy). Perlambatan kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada triwulan II 2026 terutama disebabkan oleh hambatan pada aktivitas perikanan tangkap Maluku Utara seiring dengan cuaca ekstrem disertai angin kencang dengan ketidakpastian tinggi pada bulan Mei 2026. Selain itu, peningkatan biaya bahan bakar melaut seiring dengan kenaikan harga minyak dunia (*West Texas Intermediate*/WTI) yang mencapai rata-rata USD 93,21 per barel (45,94%, yoy) turut mempengaruhi

tingkat produksi perikanan tangkap laut Maluku Utara pada triwulan II 2026. Penurunan produksi perikanan tangkap laut pada triwulan II 2026 turut memberikan andil tekanan inflasi melalui komoditas ikan cakalang/ikan sisik sebesar 0,73% (andil yoy), ikan malalugis/ikan sorihi 0,20%, serta ikan tuna 0,19%.

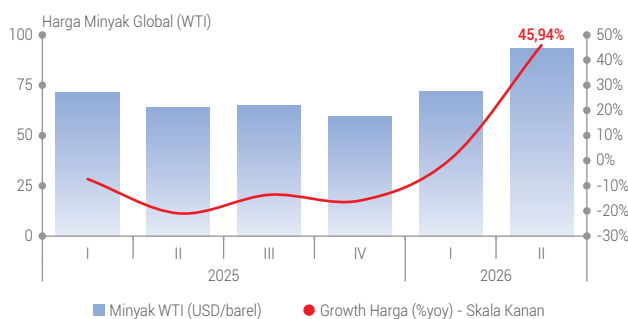
Kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada triwulan II 2026 yang tetap tumbuh positif dan stabil, sejalan dengan peningkatan luas panen dan produksi padi di Maluku Utara. Data Kerangka Sampel Area (KSA) BPS menunjukkan luas panen padi tumbuh 12,8% (yoy) dan produksi gabah kering giling tumbuh 10,8% (yoy) pada triwulan II 2026. Capaian tersebut berbalik dari triwulan sebelumnya dimana luas panen -27,6% (yoy) dan produksi -24,3% (yoy). Selain itu, pada sisi perkebunan, kakao dan pala memasuki masa panen di sejumlah wilayah Maluku Utara, turut berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja lokal. Lebih lanjut, produksi komoditas kelapa bertumbuh sejalan dengan kinerja industri makanan dan minuman pada triwulan II 2026. Sementara itu, produksi hortikultura lokal, khususnya aneka cabai dan bawang merah, belum memadai untuk memenuhi kebutuhan daerah sehingga pemenuhannya masih bergantung pada pasokan dari luar Maluku Utara. Pada subsektor peternakan, perayaan Iduladha turut memberikan dorongan melalui lonjakan

permintaan sapi kurban. Distribusi ternak antarapulau yang menuntut aktivitas logistik tambahan, ikut menambah nilai tambah ekonomi.

Selanjutnya, pembiayaan pada sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan pada triwulan II 2026 tumbuh 90% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 95,2% (yoy). Pertumbuhan kredit ini sejalan dengan perlambatan pertumbuhan LU pertanian kehutanan.

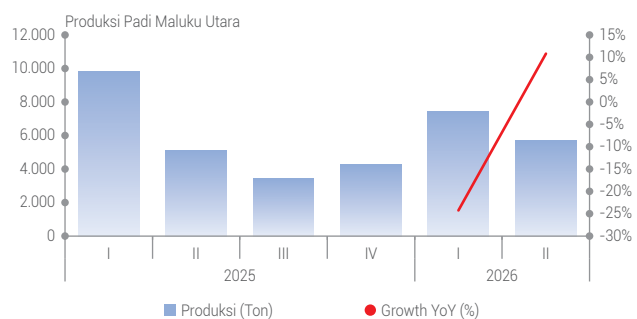
Pada triwulan III 2026, LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan diperkirakan tetap tumbuh positif dan berpotensi meningkat. Kondisi tersebut terutama didorong oleh membaiknya subsektor perikanan seiring adanya fenomena *upwelling* yang diperkirakan terjadi seiring transisi menuju El Niño, sehingga berpotensi meningkatkan kelimpahan ikan di perairan tangkap, serta prakiraan puncak musim tangkap ikan cakalang yang berdasarkan pola historis umumnya terjadi pada Triwulan III 2026. Meski demikian, terdapat risiko penahan laju pertumbuhan LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu fenomena Siklon Tropis Bavi di Laut Filipina dan Siklon Tropis Haishen di Samudra Pasifik Utara Papua yang berisiko memicu angin kencang dan gelombang tinggi di perairan, sehingga membatasi aktivitas melaut dan menghambat optimalisasi musim tangkap ikan.

Grafik 1.15. Harga Minyak Global (WTI)



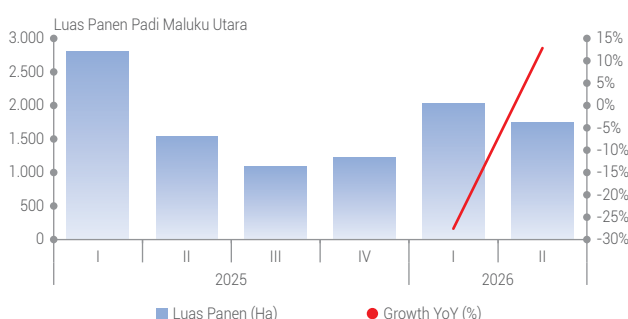
Sumber : Bloomberg

Grafik 1.17. Produksi Padi Maluku Utara



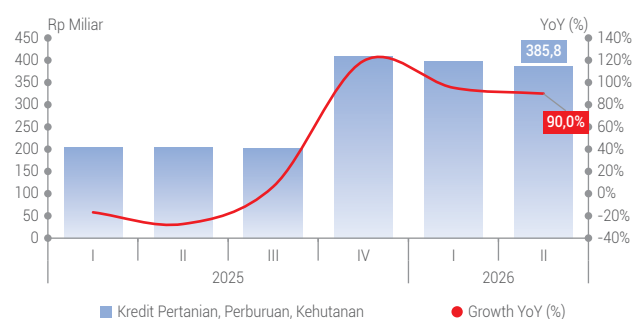
Sumber : KSA Badan Pusat Statistik, Diolah

Grafik 1.16. Luas Panen Padi Maluku Utara



Sumber : KSA Badan Pusat Statistik, Diolah

Grafik 1.18. Kredit pada Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan Maluku Utara



Sumber : LBUT, Diolah

1.3.2. Perdagangan Besar dan Eceran

LU perdagangan besar dan eceran tercatat mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan II 2026 LU perdagangan besar & eceran tercatat tumbuh 13,99%, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 14,60% (yoy). Perlambatan LU ini utamanya berasal dari subsektor perdagangan besar seiring dengan penurunan volume barang yang diperdagangkan pada rantai pasok bijih nikel domestik akibat terhentinya aktivitas penambangan, khususnya di KI Weda Bay akibat kuota yang telah terealisasi seluruhnya sejak April 2026. Lebih lanjut, pemotongan kuota produksi tambang nikel, turut mendorong efisiensi tenaga kerja di sektor pertambangan, dengan jumlah pekerja yang berkurang sebesar 1,56 ribu orang sepanjang Februari – Mei 2026, sehingga turut menahan pertumbuhan konsumsi pada perdagangan eceran.

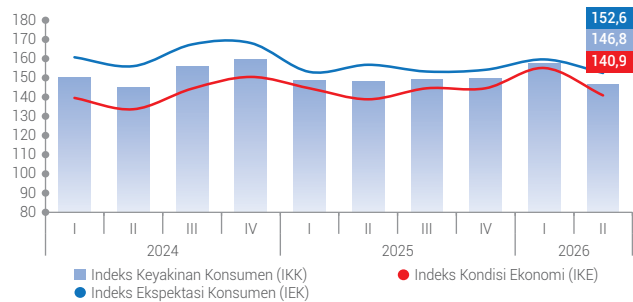
Selain itu, perlambatan pertumbuhan juga didorong oleh penyesuaian tambahan penghasilan pegawai sebesar 10% bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) staf dan PPPK Pemerintah Provinsi, serta pemotongan tunjangan PPPK Kota Tidore Kepulauan sebesar 30%, yang menahan pertumbuhan konsumsi kelompok berpendapatan tetap. Sejalan dengan hal tersebut, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 146,8, melambat dari triwulan sebelumnya (157,4). Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) turut melambat masing-masing menjadi 140,9 dan 152,6, dari triwulan sebelumnya yang tercatat 155,2 dan 159,6, termasuk perlambatan pada indeks pembelian barang tahan lama yang merupakan komponen pembentuk IKE. Kredit konsumsi melambat menjadi 4,52% (yoy) pada triwulan II 2026, dari 8,21% (yoy) pada triwulan sebelumnya.

Meski melambat, LU perdagangan besar dan eceran masih mencatatkan pertumbuhan yang kuat. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan arus barang perantara untuk mendukung rantai pasok kawasan industri Maluku Utara. Nilai impor bahan baku Maluku Utara tumbuh 78,36% (yoy) pada triwulan II 2026, meningkat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 61,73% (yoy), dengan impor bijih logam yang tumbuh 83,5% (yoy). Impor bijih logam (nikel) didatangkan utamanya dari Filipina sebagai upaya perusahaan untuk mengompensasi pasokan bijih nikel yang dulu ditambang di pulau Halmahera, Maluku Utara akibat keterbatasan kuota RKAB. Kegiatan impor tersebut harus melewati importir, fasilitas penyimpanan, dan jasa distribusi, yang tercatat sebagai nilai tambah LU Perdagangan, khususnya subsektor perdagangan besar. Meski demikian, jumlah impor bijih logam (nikel) yang didatangkan dari luar

negeri belum dapat menutup kebutuhan kawasan industri di Maluku Utara.

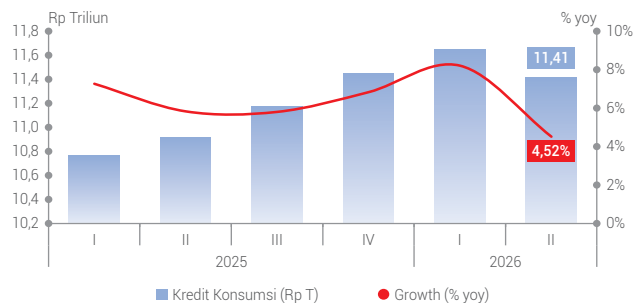
Memasuki triwulan III 2026, kinerja LU perdagangan besar dan eceran diperkirakan dapat tumbuh meningkat. Peningkatan aktivitas fasilitas produksi industri hilir pengolahan nikel (baterai) dan mulai beroperasinya industri alat berat listrik di KI Weda Bay diperkirakan dapat menopang kinerja perdagangan besar melalui aktivitas rantai pasok bahan baku dan penjualan hasil produksi. Kinerja LU perdagangan besar mempunyai ruang tumbuh yang lebih tinggi apabila rencana relaksasi kuota RKAB minerba bijih nikel terealisasi oleh Kementerian ESDM dan ditindaklanjuti oleh perusahaan terkait.

Grafik 1.19. Survei Konsumen



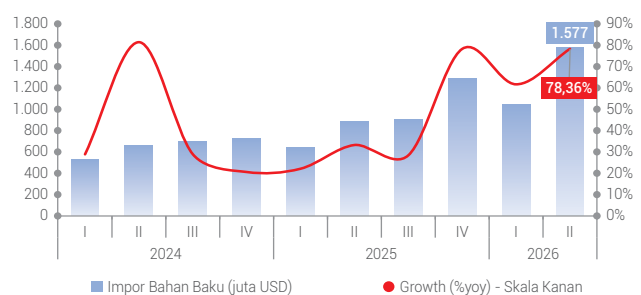
Sumber : Survei Konsumen, Bank Indonesia

Grafik 1.20. Kredit Konsumsi Maluku Utara



Sumber : LBUT, diolah

Grafik 1.21. Impor Bahan Baku Maluku Utara



Sumber : Bea Cukai Maluku Utara, Diolah

1.3.3. LU Pertambangan dan Industri Pengolahan

Pertumbuhan LU Pertambangan mengalami kontraksi dan LU Industri Pengolahan mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan triwulan sebelumnya, disebabkan pemangkasan kuota RKAB Minerba yang berdampak kepada tertahannya kinerja industri pengolahan nikel, baik di sisi hulu maupun hilir.

Kinerja LU Pertambangan mencatatkan kontraksi 8,27% (yoy) pada triwulan II 2026, berbalik arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 11,20% (yoy). Pemangkasan kuota RKAB Nikel tahun 2026 untuk seluruh kawasan Industri Maluku Utara (KI Weda Bay, KI Pulau Obi, dan KI Buli) yang disetujui oleh Kementerian ESDM menyebabkan terbatasnya aktivitas pertambangan nikel pada sektor hulu. Aktivitas pertambangan nikel di Kawasan Industri (KI) Weda Bay mengalami penghentian selama dua bulan terakhir, seiring kuota RKAB yang telah terealisasi sepenuhnya pada April 2026. Kondisi tersebut diperkirakan akan tetap berlangsung hingga adanya kepastian penambahan kuota RKAB. Sebagai informasi, KI Weda Bay hanya memperoleh kuota 12 juta *Wet Metric Tonne* (WMT) untuk tahun 2026 atau turun sekitar 71% dari kuota tahun 2025 yang mencapai sekitar 42 juta WMT. Dampak kontraksi aktivitas pertambangan nikel turut terlihat pada penurunan 1,56 ribu jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertambangan sepanjang Februari – Mei 2026, menjadi tersisa 12,46 ribu orang. Kredit kepada sektor pertambangan tercatat sebesar Rp6,25 triliun atau terkontraksi 1,97% (yoy) pada triwulan II 2026, lebih dangkal dibandingkan kontraksi 13,9% (yoy) pada triwulan sebelumnya.

Pada sisi hilir, LU Industri Pengolahan tumbuh 35,84% (yoy) pada triwulan II 2026, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 37,09% (yoy). Terbatasnya pasokan bijih nikel domestik mendorong pelaku usaha untuk melakukan penyesuaian operasional melalui penurunan utilisasi kapasitas produksi smelter dan kegiatan impor bahan baku biji logam dari luar negeri. Dampak perlambatan utamanya terlihat pada industri pengolahan yang menghasilkan *Mixed Hydroxide Precipitate* (MHP) dan feronikel. Selain kendala pasokan bijih nikel domestik, kinerja sebagian industri pengolahan juga menghadapi tantangan dari terbatasnya ketersediaan bahan baku penunjang produksi, khususnya sulfur dan asam sulfat yang dipengaruhi dinamika rantai pasok global, khususnya jalur pengolahan dengan pelarutan kimia melalui *High Pressure Acid Leaching* (HPAL). Pasokan sulfur global terganggu akibat terhambatnya distribusi dari Timur Tengah melalui Selat Hormuz dan restriksi ekspor asam sulfat oleh Tiongkok. Produksi fasilitas

HPAL di KI Weda Bay mengalami penurunan sekitar 50% dari kondisi normal, sementara KI Pulau Obi relatif aman karena telah terlebih dahulu mengamankan persediaan sulfur untuk beberapa bulan ke depan. Volume ekspor MHP Maluku Utara tercatat sebesar 241,4 ribu ton atau terkontraksi 12,51% (yoy), berbalik dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 58,97% (yoy).

Keterbatasan pasokan bijih nikel domestik turut berdampak kepada produksi komoditas ferronickel. Volume ekspor ferronickel Maluku Utara tercatat 1.341 ribu ton atau terkontraksi 12,83% (yoy), berbalik dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 63,92% (yoy). Meski demikian, produksi komoditas lainnya yang menggunakan jalur pirometalurgi — pengolahan dengan panas tinggi melalui tungku *Rotary Kiln Electric Furnace* (RKEF) relatif stabil & menahan perlambatan kinerja industri pengolahan yang lebih dalam. Volume ekspor Nickel Matte tercatat 56,35 ribu ton atau tumbuh 90,52% (yoy) pada triwulan II 2026, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 74,85% (yoy). Kondisi tersebut didukung oleh kegiatan impor bahan baku dari Filipina oleh perusahaan Maluku Utara dan tercermin dari volume impor biji logam yang tumbuh 83,5% (yoy), menjadi dukungan bagi industri pengolahan nikel khususnya metode Pirolurgi yang tidak bergantung pada pasokan asam sulfat. Walaupun telah dipasok melalui impor biji nikel dari luar negeri, kebutuhan bahan baku industri, khususnya KI Weda Bay, masih tergolong defisit dibandingkan kondisi normal.

Walaupun mengalami perlambatan pertumbuhan, kinerja LU Industri Pengolahan tetap menunjukkan resiliensi yang didukung oleh berlanjutnya investasi hilirisasi nikel di Maluku Utara. Di KI Weda Bay, beberapa fasilitas produksi mulai beroperasi, antara lain smelter feronikel berkapasitas 402.402 ton per tahun, smelter ferronickel berkapasitas 467 ribu ton per tahun telah menyelesaikan tahap *comissioning*, smelter aluminium berkapasitas 250 ribu ton per tahun, serta fasilitas produksi baterai berkapasitas 9 GWh. Beroperasinya fasilitas-fasilitas tersebut turut menopang aktivitas industri pengolahan di tengah perlambatan produksi pada sejumlah smelter eksisting.

Selain itu, perkembangan industri pengolahan juga ditopang oleh berlanjutnya produksi produk lanjutan yang semakin memperluas diversifikasi industri berbasis nikel di Maluku Utara. Pada triwulan II 2026, kawasan industri mempertahankan produksi Nickel Cobalt Manganese Hydroxide (NCMH) sebagai bahan baku prekursor baterai kendaraan listrik. Perkembangan ini menunjukkan bahwa proses hilirisasi nikel di Maluku Utara terus bergerak menuju produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi.

Selain itu, smelter aluminium dengan kapasitas 250 ribu ton per tahun di Weda Bay yang telah beroperasi penuh selama triwulan II 2026, menopang resiliensi pertumbuhan LU Industri Pengolahan.

Aktivitas industri pengolahan nikel di KI Pulau Obi relatif lebih stabil dibandingkan kawasan industri lainnya. Ketersediaan pasokan bahan baku (asam sulfat) yang telah diamankan sebelumnya, mendukung keberlangsungan aktivitas produksi industri pengolahan di kawasan tersebut di tengah tekanan ketidakpastian dan dinamika rantai pasok global khususnya sulfur.

Ke depan, kinerja LU Pertambangan dan Penggalian serta LU Industri Pengolahan diperkirakan membaik seiring potensi penambahan kuota RKAB Minerba dan berlanjutnya investasi hilirisasi di kawasan industri. Prospek tersebut turut didukung oleh penambahan kapasitas produksi smelter yang tengah memasuki tahap *commissioning* serta semakin kuatnya integrasi rantai pasok hulu-hilir dalam ekosistem industri nikel Maluku Utara.

Aktivitas industri pengolahan nikel di Maluku Utara terus menunjukkan perkembangan yang semakin mengarah pada hilirisasi bernilai tambah tinggi. Di tengah berlanjutnya ekspansi industri pengolahan dalam beberapa tahun terakhir, arah pengembangan industri saat ini mulai bergeser dari peningkatan kapasitas smelter primer menuju pendalaman struktur produksi dan diversifikasi produk hilir. Pergeseran tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk menciptakan industri nikel yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan nilai tambah domestik. Penciptaan nilai tambah lebih pada industri lanjutan, tercermin pada kredit yang disalurkan kepada sektor industri pengolahan yang tercatat Rp 9,8 triliun atau tumbuh 22,8% (yoy) pada triwulan II 2026, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp 39,50 triliun atau tumbuh 105,34% (yoy) pada triwulan II 2026, dengan investasi PMA pada industri logam dasar menyumbangkan kontribusi sekitar 88,5% atau Rp 34,85 triliun, khususnya pada Halmahera Tengah.

Kebijakan pemerintah melalui PP No. 28 Tahun 2025 yang membatasi pengembangan smelter nikel kelas dua, seperti feronikel, NPI, MHP, dan nickel matte, diperkirakan turut memengaruhi strategi investasi pelaku usaha. Selain ditujukan untuk mengurangi risiko kelebihan pasokan produk nikel di pasar global, kebijakan tersebut mendorong industri untuk mengembangkan produk turunan yang lebih hilir. Proses hilirisasi nikel di Maluku Utara terus berlanjut melalui peningkatan kompleksitas produk yang dihasilkan.

Perkembangan hilirisasi juga terlihat dari semakin kuatnya keterlibatan Maluku Utara dalam rantai pasok industri baterai kendaraan listrik. Selain memproduksi produk antara seperti feronikel, Mixed Hydroxide Precipitate (MHP), dan nickel matte, industri pengolahan di Maluku Utara mulai menghasilkan produk dengan tingkat pengolahan yang lebih tinggi. Maluku Utara telah merealisasikan ekspor Nickel Cobalt Manganese Hydroxide (NCMH) sebagai komoditas baru yang digunakan sebagai bahan baku prekursor baterai lithium-ion. Diversifikasi produk tersebut menjadi indikasi bahwa proses hilirisasi nikel di Maluku Utara telah bergerak menuju tahapan yang lebih maju dan tidak semata-mata bergantung pada produk antara konvensional. Realisasi ekspor produk bernilai tambah lainnya seperti prekursor nikel dan electrolyte cobalt yang telah berlangsung sejak tahun sebelumnya, serta akan beroperasinya industri alat berat listrik dan baterai pada triwulan ke depan, semakin memperkuat posisi Maluku Utara sebagai salah satu pusat pengembangan ekosistem industri baterai kendaraan listrik nasional. Selain itu, keberadaan industri pengolahan alumina menjadi aluminium berkapasitas 250 ribu ton per tahun turut semakin memperkuat integrasi industri pengolahan Maluku Utara ke dalam rantai nilai global, sekaligus mencerminkan transformasi struktur industri menuju produk dengan nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi.

Memasuki triwulan III 2026, Kinerja LU Pertambangan dan Penggalian diperkirakan masih menghadapi tekanan akibat terbatasnya kuota RKAB nikel yang tersedia bagi sejumlah pelaku usaha di kawasan industri. Keterbatasan pasokan bijih nikel domestik diperkirakan menyebabkan aktivitas produksi tambang belum sepenuhnya kembali ke tingkat optimal, terutama di Kawasan Industri Weda Bay. Sementara itu, hasil pengajuan relaksasi kuota RKAB nikel yang diperkirakan baru terealisasi pada akhir triwulan III 2026 berpotensi belum dapat dimanfaatkan secara optimal mengingat terbatasnya waktu implementasi.

Sementara itu, kinerja LU Industri Pengolahan pada triwulan III 2026 diperkirakan tumbuh & berpotensi meningkat dibandingkan periode sebelumnya. LU industri pengolahan di Maluku Utara diperkirakan tetap menunjukkan resiliensi yang didukung oleh beroperasinya sejumlah fasilitas produksi baru serta berlanjutnya proses hilirisasi antara lain industri alat berat listrik, optimalisasi kapasitas produksi ferronikel yang telah dioperasikan sejak triwulan II 2026, berlanjutnya operasional smelter aluminium, serta beroperasinya fasilitas produksi baterai di KI Weda Bay. Produksi komoditas bernilai tambah tinggi yang terkait dengan rantai pasok industri baterai

kendaraan listrik diperkirakan terus meningkat, sejalan upaya diversifikasi produk industri pengolahan di daerah.

Dari sisi permintaan global, kinerja industri pengolahan nikel Maluku Utara pada triwulan III 2026 diperkirakan masih didukung oleh permintaan yang relatif kuat dari industri stainless steel dan kendaraan listrik dunia Tiongkok. Permintaan global yang kuat turut tercermin dari harga nikel global yang terapresiasi 19,55% (yoy) pada triwulan II 2026 dan diperkirakan dapat berlanjut sampai dengan akhir tahun. Permintaan feronikel diperkirakan tetap terjaga seiring berlanjutnya aktivitas manufaktur stainless steel di Tiongkok yang masih menjadi pasar utama produk nikel Maluku Utara. Selain itu, tren transisi energi dan peningkatan produksi kendaraan listrik global turut menopang permintaan terhadap produk antara

berbasis nikel, termasuk MHP, prekursor, aluminium, serta berbagai bahan baku pendukung industri baterai.

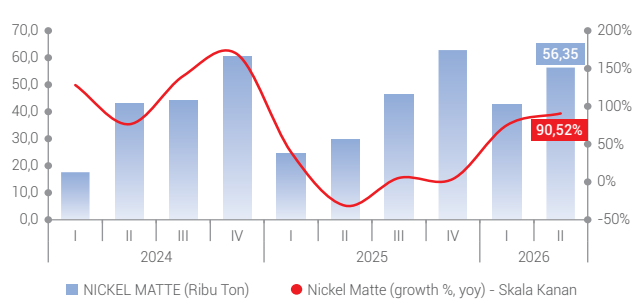
Meskipun demikian, prospek permintaan global masih dibayangi oleh sejumlah risiko. ketidakpastian pertumbuhan ekonomi dunia, meningkatnya tensi perdagangan internasional, serta kondisi kelebihan pasokan (*oversupply*) nikel di pasar global berpotensi menahan laju kenaikan harga dan permintaan produk nikel. Namun, diversifikasi produk hilir yang semakin berkembang di Maluku Utara, termasuk mulai terealisasinya ekspor NCMH, aluminium ingot, dan produk hilir lainnya, diperkirakan dapat memperluas basis pasar ekspor dan meningkatkan ketahanan industri pengolahan daerah terhadap fluktuasi permintaan pada komoditas nikel konvensional.

Grafik 1.22. Kredit pada Sektor Pertambangan Maluku Utara



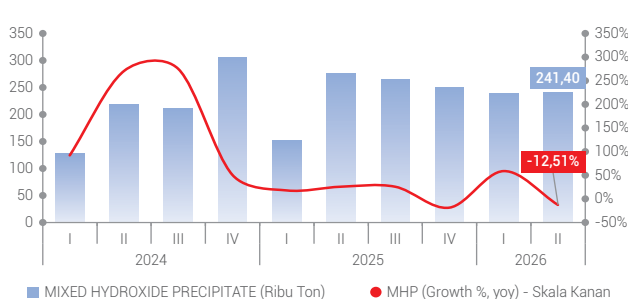
Sumber : LBUT, diolah

Grafik 1.25. Perkembangan Volume Ekspor Nickel Matte



Sumber : Bea Cukai Maluku Utara, Diolah

Grafik 1.23. Perkembangan Volume Ekspor MHP



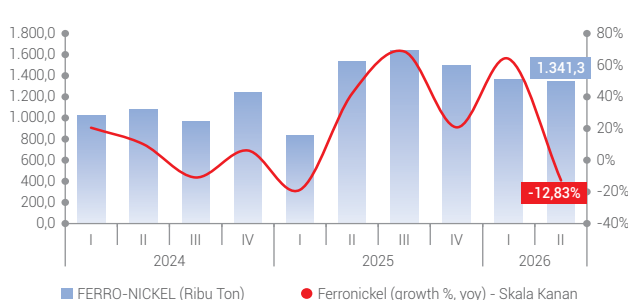
Sumber : Bea Cukai Maluku Utara, Diolah

Grafik 1.26. Kredit pada Sektor Industri Pengolahan



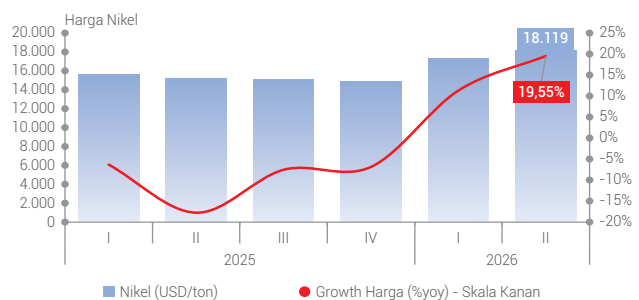
Sumber : LBUT, Diolah

Grafik 1.24. Perkembangan Volume Ekspor Ferronickel



Sumber : Bea Cukai Maluku Utara, Diolah

Grafik 1.27. Perkembangan Harga Nickel Global



Sumber : Bloomberg, Diolah

Boks 1:**Optimalisasi Kota Pusaka Ternate: Pariwisata Berbasis Pusaka untuk Penguatan Nilai Tambah Lokal**

Perekonomian Maluku Utara pada triwulan II 2026 tumbuh 15,35% (yoy), melambat dari 19,64% (yoy) pada triwulan sebelumnya seiring perlambatan pada LU Industri Pengolahan dan LU Pertambangan & Penggalan akibat pemangkasan kuota RKAB Minerba. Dengan pangsa LU industri pengolahan mencapai 48,93% dan pertambangan & penggalan sebesar 16,68% terhadap PDRB, laju pertumbuhan daerah masih sangat ditentukan oleh dinamika sektor berbasis sumber daya alam. Kondisi ini menegaskan bahwa pertumbuhan yang tinggi perlu diikuti penguatan sumber pertumbuhan alternatif yang berbasis potensi lokal dan memiliki keterkaitan lebih luas dengan pelaku ekonomi daerah. Pengembangan Kota Pusaka menjadi salah satu ruang untuk memperkuat diversifikasi sumber pertumbuhan melalui optimalisasi potensi ekonomi lokal.

Sepanjang tahun 2025, perekonomian anggota Jaringan Kota Pusaka mencatatkan kinerja yang relatif kuat dengan Kota Ternate tumbuh 6,50% (yoy) sebagai salah satu yang tertinggi. Namun, dari sisi kontribusi terhadap perekonomian nasional, aktivitas ekonomi Kota Pusaka masih terkonsentrasi pada beberapa kota besar di Pulau Jawa yang skala ekonominya ditopang aktivitas perkotaan yang solid

terutama pada sektor Akmamin serta perdagangan. Ternate berada pada posisi yang berbeda dimana laju pertumbuhannya tergolong tinggi, tetapi belum disertai skala ekonomi yang sebanding.

Perbedaan skala tersebut menunjukkan bahwa Ternate menghadapi tantangan yang tidak sama dengan kota pusaka yang sektor jasa wisatanya telah mapan. Dengan basis Akmamin yang masih tipis dan struktur UMKM yang didominasi usaha mikro, peningkatan jumlah kunjungan berisiko tidak terserap menjadi belanja di dalam kota. Pemanfaatan aset pusaka karenanya perlu diarahkan lebih dahulu pada pembentukan kapasitas usaha dan aktivitas ekonomi kawasan, agar kenaikan kunjungan dapat diterjemahkan menjadi nilai tambah lokal.

Ternate memiliki basis arus ekonomi yang kuat, namun konversinya menjadi nilai tambah pariwisata masih terbatas. Peran kota sebagai hub perdagangan dan transportasi tercermin dari pangsa LU Perdagangan sebesar 27,21% dan LU Transportasi dan Pergudangan sebesar 16,31% terhadap PDRB Ternate, atau secara gabungan mencapai sekitar 43,5%. Di sisi lain, LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada tahun 2025 tercatat hanya

Gambar 1.1 Profil Pertumbuhan Ekonomi Anggota Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI)



0,88% dari PDRB. Sebagai gambaran, pangsa LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di kota pusaka lain tercatat sebesar 3,26% di Semarang dan 12,9% di Yogyakarta. Perbandingan tersebut tidak dimaksudkan sebagai tolok ukur langsung mengingat perbedaan skala dan struktur ekonomi, tetapi menunjukkan bahwa aktivitas pusaka dapat menghasilkan pangsa sektor jasa wisata yang jauh lebih besar dari capaian Ternate saat ini.

Perkembangan indikator akomodasi menunjukkan perbaikan, meskipun masih terdapat ruang penguatan. Tingkat Penghunian Kamar Maluku Utara pada Mei 2026 mencapai 23,95% dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, sementara rata-rata lama menginap naik dari 1,29 malam menjadi 1,41 malam. Dari sisi produksi, LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh 7,76% (yoy) pada triwulan II 2026. Dengan demikian, tantangan utama tidak terletak pada laju pertumbuhan, melainkan pada basis kontribusi yang masih terbatas. Lama tinggal yang masih relatif pendek mengindikasikan ruang perbaikan pada kualitas pengalaman kunjungan, sejalan dengan kondisi aset pusaka yang sebagian besar masih berdiri sebagai objek tersendiri dan belum terhubung dalam satu koridor perjalanan yang mudah diakses, nyaman, serta didukung interpretasi yang memadai.

Di sisi lain, kapasitas pelaku usaha lokal dalam menangkap permintaan masih terbatas. Sekitar 95% UMKM di Ternate berskala mikro, sehingga kenaikan permintaan dari aktivitas kunjungan belum dapat direspons melalui penambahan kapasitas produksi dan layanan secara memadai. Kondisi tersebut berhadapan dengan infrastruktur pendukung yang justru telah terbentuk. Transaksi QRIS Maluku Utara pada triwulan II 2026 tercatat Rp653,02 miliar dengan 6,76 juta transaksi, dengan pertumbuhan volume 361% (yoy) dan nominal 239% (yoy). Semakin luasnya penerimaan pembayaran digital pada pelaku usaha kuliner, kerajinan, transportasi, dan ekonomi kreatif membuka kanal untuk mengonversi belanja pengunjung menjadi transaksi yang tercatat dalam perekonomian daerah.

Pemanfaatan kanal digital tersebut masih dibatasi oleh kapasitas keuangan pelaku usaha. Indeks Inklusi keuangan Maluku Utara tercatat sebesar

77,18% dengan literasi baru mencapai 48,65%, tertinggal dari provinsi *benchmark* Kota Pusaka yang umumnya telah berada di atas 90%. Kondisi ini bersumber dari kesenjangan akses antarwilayah, terbatasnya jangkauan layanan, serta keterbatasan akses permodalan pelaku usaha mikro dan kecil. Perluasan akses karenanya perlu berjalan seiring penguatan literasi agar digitalisasi tidak berhenti pada fungsi pembayaran, melainkan berlanjut menjadi pengelolaan usaha dan akses pembiayaan formal.

Respons kebijakan karenanya perlu diarahkan pada pembentukan rantai nilai, bukan pada penataan aset secara terpisah. Langkah pertama adalah merangkai aset pusaka menjadi satu perjalanan kota, dengan Koridor Benteng Oranje – Kedaton sebagai titik masuk melalui penguatan akses, amenitas, dan aktivitas kawasan. Dalam kerangka tersebut, Benteng Oranje selanjutnya dapat difungsikan melampaui perannya sebagai objek konservasi, yaitu sebagai titik awal perjalanan sekaligus lokasi penjualan produk UMKM terkurasi, pameran ekonomi kreatif, dan penyelenggaraan *event*. Dengan demikian, kawasan pusaka tidak hanya menerima kunjungan tetapi juga menjadi tempat berlangsungnya transaksi ekonomi.

Dengan demikian, fungsi Ternate sebagai hub perdagangan dan transportasi dapat bergeser menjadi gateway pariwisata yang menghasilkan nilai tambah lokal, dan pariwisata berbasis pusaka menjadi salah satu jalur diversifikasi pertumbuhan di tengah struktur ekonomi Maluku Utara yang masih terkonsentrasi pada sektor berbasis SDA.

Pengembangan Kota Pusaka perlu diarahkan pada integrasi aset pusaka ke dalam satu rangkaian pengalaman kota yang ditopang aksesibilitas, amenitas, dan aktivitas ekonomi kawasan. Rangkaian tersebut menjadi dasar untuk mengubah kunjungan wisatawan menjadi belanja melalui paket *heritage*, kuliner, akomodasi, dan produk lokal. Hal ini diperlukan untuk mengangkat pangsa sektor Akmamin yang masih 0,88% PDRB. Agar permintaan tersebut dapat terserap oleh pelaku usaha lokal, pembinaan UMKM perlu diarahkan pada pengembangan klaster yang menghubungkan pelaku usaha dengan pasar dan sumber pembiayaan. Digitalisasi transaksi selanjutnya diarahkan melampaui fungsi

pembayaran hingga membuka akses pembiayaan, disertai penguatan inklusi dan literasi keuangan yang berjalan bersamaan.

Kawasan Kota pusaka pada gilirannya dapat berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi kreatif, bukan semata kawasan konservasi. Seluruh upaya tersebut memerlukan pengelolaan kawasan yang tertata

melalui penguatan kelembagaan, penataan zonasi, revitalisasi koridor, dan dukungan pembiayaan. Dengan demikian, peran Ternate dapat berkembang dari simpul perdagangan dan transportasi menjadi pintu masuk pariwisata yang meningkatkan nilai tambah di dalam kota sekaligus memperluas sumber pertumbuhan ekonomi Maluku Utara.





02

PERKEMBANGAN INFLASI PROVINSI MALUKU UTARA

Inflasi TW II 2026 Meningkat, dengan Prospek Perbaikan Memasuki Triwulan III

IHK Maluku Utara pada triwulan II 2026 tercatat mengalami inflasi sebesar 5,05% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan I 2026 sebesar 2,56% (yoy) dan berada di atas rentang sasaran inflasi nasional $2,5 \pm 1\%$. Tekanan inflasi terutama bersumber dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang mencatat inflasi 6,73% (yoy) dengan andil 2,34% (andil yoy), diikuti Kelompok Transportasi sebesar 12,22% (yoy) dengan andil 1,25% (andil yoy), serta Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 6,69% (yoy) dengan andil 0,49% (andil yoy). Dari sisi komoditas, tekanan terutama berasal dari tarif angkutan udara, ikan cakalang/ikan sisik, bensin, emas perhiasan, dan bahan bakar rumah tangga.

Meski meningkat, sumber tekanan inflasi relatif teridentifikasi dan terutama dipengaruhi oleh gangguan pasokan pangan serta penyesuaian harga energi dan transportasi. Kenaikan harga ikan segar dipengaruhi kondisi perairan yang kurang kondusif dan tingginya biaya operasional nelayan, sementara pasokan hortikultura terkendala gangguan produksi di sejumlah daerah pemasok. Tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan tarif angkutan laut seiring pemberian subsidi pemerintah daerah serta deflasi pada beberapa komoditas pangan. Memasuki triwulan III 2026, tekanan inflasi diperkirakan berangsur mereda didukung normalisasi harga hortikultura dan perbaikan pasokan ikan segar, meskipun perkembangan harga energi dan biaya distribusi tetap perlu dicermati.

Inflasi *mtm*
Triwulan II 2026

2,45%

Inflasi *yoy*
Triwulan II 2026

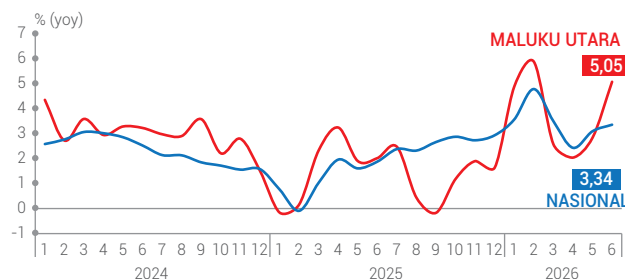
5,05%

2.1. Kondisi Umum Inflasi IHK Maluku Utara

Pada triwulan II 2026, inflasi Maluku Utara tercatat meningkat dan berada di atas rentang sasaran inflasi nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$. Secara tahunan, inflasi Maluku Utara pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 5,05% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan I 2026 yang sebesar 2,56% (yoy). Realisasi tersebut juga lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang pada periode yang sama tercatat sebesar 3,34% (yoy) sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 2.1 Laju Inflasi Tahunan (yoy) Maluku Utara Dibandingkan dengan Nasional.

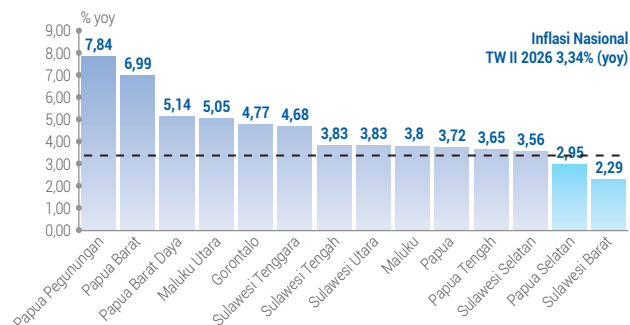
Secara regional, inflasi Maluku Utara pada triwulan II 2026 tercatat sebagai yang tertinggi keempat di antara 14 provinsi di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), setelah Papua Pegunungan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya (Grafik 2.2). Posisi tersebut naik dari posisi inflasi terendah kedua di wilayah Sulampua pada triwulan I 2026. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan tekanan harga di Maluku Utara pada triwulan II 2026 relatif lebih tinggi dibandingkan sebagian besar provinsi lainnya di wilayah Sulampua.

Grafik 2.1. Laju Inflasi Tahunan (yoy) Maluku Utara Dibandingkan dengan Nasional



Sumber : BPS, diolah

Grafik 2.2. Perbandingan Inflasi Gabungan Kota IHK Provinsi di Sulampua



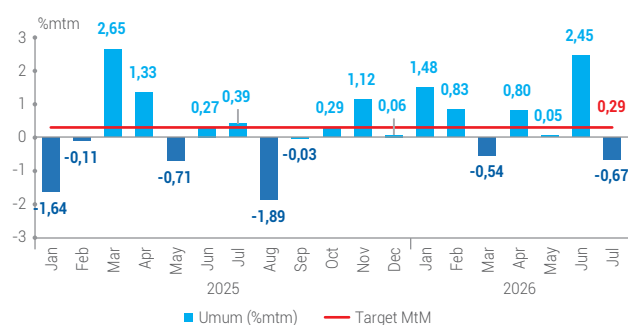
Sumber : BPS, diolah

2.2. Perkembangan Inflasi IHK Maluku Utara

Inflasi Maluku Utara secara tahunan pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 5,05% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan I 2026 yang sebesar 2,56% (yoy). Secara intra-triwulan, laju inflasi tahunan meningkat dari 2,03% (yoy) pada April 2026 menjadi 2,82% (yoy) pada Mei 2026 dan kembali meningkat menjadi 5,05% (yoy) pada Juni 2026. Peningkatan inflasi pada triwulan II 2026 terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas pangan, khususnya ikan segar dan hortikultura, serta meningkatnya tekanan pada kelompok transportasi sejalan dengan perkembangan harga energi.

Dari sisi permintaan, konsumsi masyarakat pada triwulan II 2026 relatif terjaga, meskipun menunjukkan kecenderungan moderasi dibandingkan periode sebelumnya. Pada akhir triwulan II 2026, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Maluku Utara tercatat sebesar 146,8 pada triwulan II 2026, tetap berada pada level optimis meskipun menurun dibandingkan 157,4 pada triwulan I 2026. Perkembangan tersebut mengindikasikan bahwa optimisme konsumen masih terjaga, namun mengalami moderasi pada triwulan laporan. Penyaluran kredit konsumsi pada triwulan II 2026 juga masih tumbuh sebesar 4,52% (yoy), menunjukkan aktivitas konsumsi masyarakat yang tetap positif. Di sisi lain, konsumsi masyarakat tertahan oleh normalisasi konsumsi pasca-Ramadan dan HBKN Idulfitri, perlambatan aktivitas usaha terkait sektor pertambangan dan industri pengolahan, serta penyesuaian TPP ASN Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Dengan perkembangan tersebut, peningkatan inflasi pada triwulan II 2026 lebih dominan bersumber dari tekanan sisi penawaran dan penyesuaian harga dibandingkan penguatan permintaan secara luas.

Grafik 2.3. Perkembangan Inflasi Bulanan (mtm)



Sumber : BPS, diolah

Berdasarkan kelompok pengeluaran, peningkatan inflasi tahunan pada triwulan II 2026 terutama bersumber dari tiga kelompok, yaitu Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau; Kelompok Transportasi; serta Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau menjadi penyumbang inflasi tahunan terbesar sejalan dengan kenaikan harga berbagai komoditas perikanan dan hortikultura. Sementara itu, perubahan paling menonjol terjadi pada Kelompok Transportasi yang berbalik dari penahan inflasi pada triwulan I 2026 menjadi penyumbang inflasi terbesar kedua pada triwulan II 2026. Tekanan inflasi turut bersumber dari Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, terutama dipengaruhi oleh masih tingginya harga emas perhiasan.

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau menjadi penyumbang inflasi tahunan terbesar pada triwulan II 2026. Inflasi kelompok ini meningkat menjadi 6,73% [yoy] dengan andil sebesar 2,34% [andil yoy], lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2026 yang sebesar 4,22% [yoy] dengan andil 1,47% [andil yoy]. Beberapa komoditas utama yang memberikan andil inflasi antara lain ikan cakalang/ikan sisik sebesar 0,73% [andil yoy], bawang merah 0,21%, ikan malalugis/ikan sorihi 0,20%, ikan tuna 0,19%, minyak goreng 0,16%, dan beras 0,12%.

Tekanan harga komoditas perikanan menjadi salah satu faktor utama yang mendorong peningkatan inflasi pangan sepanjang triwulan II 2026. Tekanan tersebut semakin kuat pada Juni, ketika ikan cakalang/ikan sisik dan ikan malalugis/ikan sorihi masing-masing memberikan andil inflasi bulanan sebesar 0,45% dan 0,36%, diikuti ikan tuna sebesar 0,09% [andil mtm]. Peningkatan harga ikan segar terutama dipengaruhi oleh kondisi perairan yang

kurang kondusif seiring penguatan monsun timur yang meningkatkan kecepatan angin dan tinggi gelombang, sehingga membatasi aktivitas melaut dan produktivitas tangkapan nelayan. Tekanan pasokan turut diperberat oleh tingginya biaya operasional nelayan yang diakibatkan tingginya biaya bahan bakar yang membatasi frekuensi melaut pada periode tersebut. Dengan karakteristik pasokan ikan yang sangat dipengaruhi kondisi perairan dan aktivitas penangkapan, gangguan pasokan pada akhir triwulan yang bertepatan dengan musim paceklik, menyebabkan kenaikan harga di tingkat konsumen.

Selain komoditas perikanan, tekanan inflasi pangan pada akhir triwulan II 2026 turut dipengaruhi oleh terbatasnya pasokan komoditas hortikultura. Pada Juni 2026, cabai rawit, bawang merah, dan cabai merah masing-masing memberikan andil inflasi bulanan sebesar 0,29%, 0,18%, dan 0,11% [andil mtm]. Kenaikan harga terutama dipengaruhi oleh gangguan pasokan akibat gagal panen dan banjir pada sejumlah daerah sentra produksi pemasok, termasuk Bima dan Gorontalo di tengah produksi lokal Maluku Utara yang belum memadai. Keterbatasan pasokan dari daerah pemasok menjadi semakin relevan mengingat pemenuhan sejumlah komoditas hortikultura Maluku Utara masih bergantung pada produksi dari luar daerah. Pada triwulan II 2026, pasokan cabai rawit dari Gorontalo berkurang karena belum memasuki masa panen. Pada saat yang sama, pasokan bawang merah jenis Enrekang dari Sulawesi Selatan turut menurun karena daerah produksi tengah memasuki masa tanam, sehingga pasokan yang transit melalui Manado menuju Maluku Utara menjadi lebih terbatas.

Tabel 2.1. Inflasi tahunan (yoy) triwulan I 2025 – triwulan II 2026 Maluku Utara

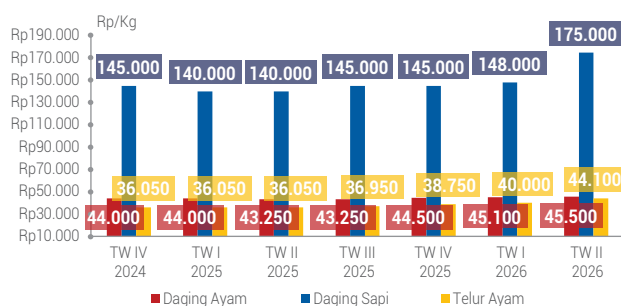
Kelompok Barang dan Jasa	Inflasi YOY					Sumbangan Inflasi YOY				
	2025			2026	2025	2025			2026	
	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II
UMUM	2,01%	-0,17%	1,64%	2,56%	5,05%	2,01%	-0,17%	1,64%	2,56%	5,05%
Makanan, Minuman, dan Tembakau	4,08%	-1,42%	0,95%	4,22%	6,73%	1,39%	-0,49%	0,32%	1,47%	2,34%
Pakaian dan Alas Kaki	-2,10%	-1,60%	0,00%	0,71%	1,46%	-0,10%	-0,08%	0,00%	0,03%	0,07%
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	4,17%	4,85%	4,43%	5,46%	2,13%	0,80%	0,92%	0,85%	1,03%	0,42%
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,53%	0,19%	0,27%	-0,71%	1,52%	0,02%	0,01%	0,01%	-0,03%	0,06%
Kesehatan	0,42%	-0,08%	0,16%	1,83%	1,55%	0,01%	0,00%	0,01%	0,02%	0,02%
Transportasi	-2,91%	-6,31%	2,12%	-2,36%	12,22%	-0,31%	-0,68%	0,26%	-0,24%	1,25
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,09%	-0,06%	0,00%	-0,05%	0,15%	-0,01%	0,00%	0,00%	0%	0,01%
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	2,27%	1,82%	1,48%	-0,60%	-0,35%	0,03%	0,02%	0,03%	-0,01%	0%
Pendidikan	-19,19%	-19,71%	-19,81%	-20,40%	0,99%	-0,50%	-0,52%	-0,52%	-0,54%	0,02%
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	3,73%	2,90%	2,26%	2,13%	4,60%	0,23%	0,23%	0,11%	0,17%	0,37%
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	5,45%	5,87%	7,91%	8,96%	6,69%	0,39%	0,42%	0,57%	0,66%	0,49%

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Gangguan pada sisi produksi tersebut diperkuat oleh tantangan distribusi antarpulau menuju Maluku Utara. Kenaikan biaya angkut sejalan dengan penyesuaian harga BBM meningkatkan ongkos distribusi, sementara karakteristik komoditas hortikultura yang mudah rusak menyebabkan keterlambatan pengiriman berpotensi menurunkan kualitas sekaligus mengurangi volume pasokan efektif yang dapat dipasarkan. Dengan demikian, peningkatan harga hortikultura pada akhir triwulan II mencerminkan kombinasi terbatasnya ketersediaan di daerah produsen dan tingginya sensitivitas rantai pasok Maluku Utara terhadap biaya serta kelancaran distribusi antardaerah.

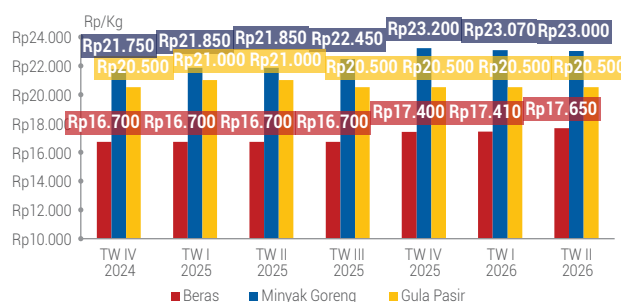
Di sisi lain, tekanan inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga sejumlah komoditas pangan. Secara tahunan, kangkung dan bawang putih memberikan andil masing-masing sebesar -0,15% dan -0,03% [andil yoy]. Pada Juni 2026, beberapa komoditas seperti ikan kembung, ketimun, dan beras turut mengalami penurunan harga sehingga menahan tekanan inflasi bulanan yang lebih tinggi. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa tekanan inflasi pangan pada triwulan II 2026 **tidak terjadi secara merata pada seluruh komoditas**, namun terutama terkonsentrasi pada komoditas ikan segar dan hortikultura yang mengalami gangguan pasokan.

Grafik 2.4. Perkembangan Harga Daging Ayam, Daging Sapi, dan Telur Ayam



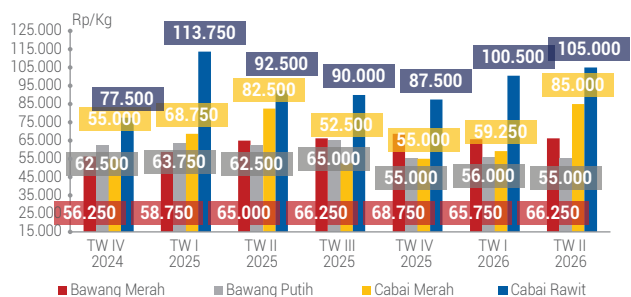
Sumber : PIHPS, diolah

Grafik 2.5. Perkembangan Harga Beras, Minyak Goreng, dan Gula Pasir



Sumber : PIHPS, diolah

Grafik 2.6. Perkembangan Harga Bumbu-bumbuan



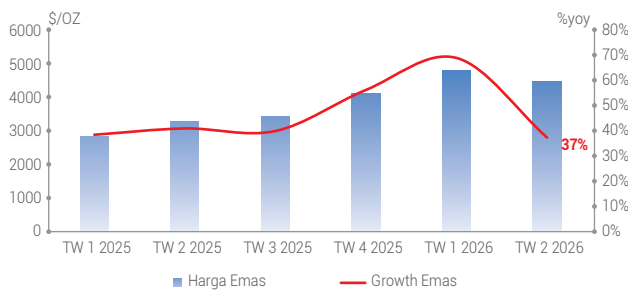
Sumber : PIHPS, diolah

Kelompok Transportasi mengalami perubahan tekanan yang paling signifikan pada triwulan II 2026. Setelah pada triwulan I 2026 mencatatkan deflasi 2,36% (yoy) dengan andil -0,24% (andil yoy), kelompok ini berbalik mengalami inflasi sebesar 12,22% (yoy) dengan andil 1,25% (andil yoy) pada triwulan II 2026, sekaligus menjadi penyumbang inflasi tahunan terbesar kedua di Maluku Utara. Tekanan terutama bersumber dari tarif angkutan udara dengan andil sebesar 0,76% (andil yoy), bensin 0,54%, serta solar 0,10%. Peningkatan tekanan Kelompok Transportasi terutama menguat pada akhir triwulan II 2026. Pada Juni 2026, kelompok ini mencatat inflasi sebesar 5,21% (mtm) dengan andil 0,56% (andil mtm), terutama didorong oleh kenaikan harga bensin yang memberikan andil sebesar 0,50% (andil mtm). Kenaikan harga bensin terutama dipengaruhi oleh penyesuaian harga BBM nonsubsidi jenis Pertamina dari Rp12.300/liter menjadi Rp16.250/liter sejak 10 Juni 2026. Perkembangan tersebut menyebabkan bensin yang sebelumnya memberikan tekanan relatif terbatas menjadi salah satu sumber utama peningkatan inflasi transportasi pada akhir triwulan. Tekanan inflasi juga bersumber dari kenaikan tarif angkutan udara, yang pada Juni memberikan andil sebesar 0,15% (andil mtm). Peningkatan tarif terjadi sejalan dengan penyesuaian *fuel surcharge* oleh maskapai di tengah peningkatan harga avtur. Secara tahunan, tarif angkutan udara menjadi komoditas dengan andil terbesar pada Kelompok Transportasi, yaitu sebesar 0,76% (andil yoy).

Meski demikian, tekanan inflasi kelompok Transportasi tertahan oleh penurunan tarif angkutan laut yang memberikan andil deflasi sebesar -0,21% (andil yoy), sejalan dengan dukungan subsidi transportasi oleh pemerintah daerah. Secara bulanan pada Juni, penurunan tarif angkutan laut memberikan andil deflasi -0,09%, disertai penurunan harga solar dengan andil -0,03%.

Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya turut menjadi salah satu penyumbang inflasi utama, meskipun

Grafik 2.7. Pergerakan Harga Emas Global



Sumber : PIHPS, diolah

tekanannya melandai dibandingkan triwulan sebelumnya.

Kelompok ini mencatatkan inflasi sebesar 6,69% (yoy) dengan andil 0,49% (andil yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan I 2026 yang sebesar 8,96% (yoy) dengan andil 0,66%. Tekanan terutama berasal dari subkelompok perawatan pribadi lainnya yang mengalami inflasi sebesar 20,63% (yoy), terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga emas perhiasan.

Emas perhiasan tetap menjadi komoditas utama penyumbang inflasi kelompok ini dengan andil sebesar 0,34% (andil yoy), meskipun lebih rendah dibandingkan triwulan I 2026 yang memberikan andil 0,60% (andil yoy). Perkembangan tersebut sejalan dengan harga emas global yang masih berada pada level tinggi akibat ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global, namun mengalami moderasi dibandingkan triwulan sebelumnya. Selain emas perhiasan, inflasi kelompok ini turut disumbang oleh beberapa komoditas perawatan pribadi seperti bedak, tarif gunting rambut pria, dan sabun mandi, namun dengan andil yang relatif terbatas.

Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga tetap memberikan tekanan inflasi pada triwulan II 2026, meskipun melandai dibandingkan triwulan sebelumnya. Kelompok ini mencatat inflasi sebesar 2,13% (yoy) dengan andil 0,42% (andil yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan I 2026 yang sebesar 5,46% (yoy) dengan andil 1,03% (andil yoy). Penurunan tersebut terutama sejalan dengan meredanya efek basis rendah tarif listrik yang sebelumnya menjadi salah satu sumber utama tekanan pada triwulan I 2026. Sementara itu, tekanan pada triwulan II lebih dominan berasal dari **bahan bakar rumah tangga**, yang memberikan andil inflasi sebesar 0,31% (andil yoy).

Peningkatan harga bahan bakar rumah tangga pada triwulan II terutama dipengaruhi oleh perkembangan harga LPG nonsubsidi dan biaya distribusinya. Sejak April 2026, harga LPG nonsubsidi meningkat sejalan dengan perkembangan harga energi serta perubahan titik pasok/*supply point* distribusi Maluku Utara dari Surabaya ke *Integrated Terminal Wayame* di Ambon. Perubahan jalur tersebut meningkatkan biaya logistik karena keterbatasan kapal reguler Ambon-Ternate, sehingga distributor perlu menggunakan kapal secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan pasokan. Pada akhir triwulan, tekanan mulai tertahan seiring dikembalikannya *supply point* LPG nonsubsidi ke Surabaya yang menurunkan biaya distribusi dan mendorong sedikit koreksi harga LPG.

Secara keseluruhan, peningkatan inflasi Maluku Utara pada triwulan II 2026 mencerminkan tekanan pada sejumlah komoditas pangan, energi dan transportasi, serta emas perhiasan. Pada kelompok pangan, gangguan produksi dan distribusi membatasi ketersediaan ikan segar dan hortikultura, sementara penyesuaian harga BBM nonsubsidi dan tarif angkutan udara mendorong peningkatan tekanan pada Kelompok Transportasi. Di sisi lain, harga emas global yang masih tinggi turut menjaga tekanan pada Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, sementara dinamika harga dan distribusi LPG nonsubsidi memengaruhi Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga. Meski demikian, penurunan harga sejumlah komoditas pangan, subsidi tarif angkutan laut, serta mulai meredanya tekanan pada emas dan LPG menahan peningkatan inflasi yang lebih tinggi.

2.3. Perkembangan Inflasi Spasial Provinsi Maluku Utara

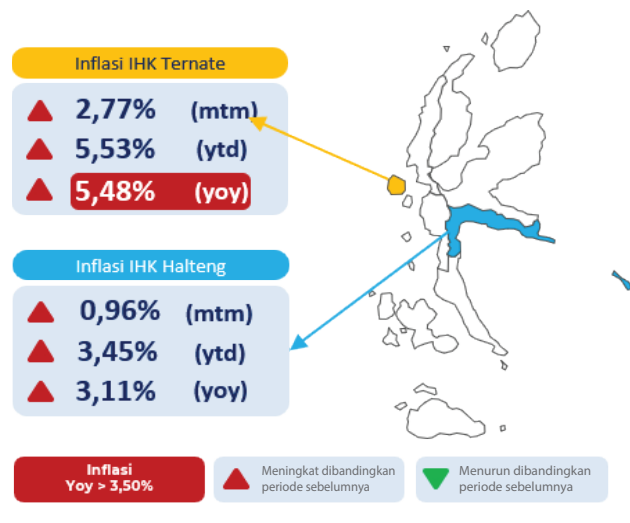
Seluruh daerah cakupan IHK di Provinsi Maluku Utara, yaitu Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Tengah, mencatatkan peningkatan inflasi pada triwulan II 2026. Inflasi Kota Ternate tercatat sebesar 5,48% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan I 2026 yang sebesar 2,91% (yoy), sementara Kabupaten Halmahera Tengah mencatatkan inflasi sebesar 3,11% (yoy), meningkat dari 0,95% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Dengan perkembangan tersebut, inflasi Kota Ternate berada di atas rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1% (yoy), sedangkan inflasi Kabupaten Halmahera Tengah masih berada dalam rentang sasaran.

Kota Ternate mencatatkan inflasi sebesar 5,48% (yoy) pada triwulan II 2026, meningkat signifikan dibandingkan triwulan I 2026 yang sebesar 2,91% (yoy). Sebagai daerah penghitungan IHK dengan bobot terbesar di Maluku Utara, perkembangan harga di Kota Ternate memberikan pengaruh yang kuat terhadap arah inflasi gabungan provinsi. Peningkatan inflasi tahunan Ternate terutama bersumber dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil sebesar 2,57% (andil yoy), diikuti Kelompok Transportasi sebesar 1,23%, serta Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,53%. Komoditas utama pendorong inflasi meliputi tarif angkutan udara, ikan cakalang/ikan sisik, bensin, bahan bakar rumah tangga, dan emas perhiasan.

Peningkatan tekanan inflasi di Kota Ternate menguat terutama pada akhir triwulan II 2026. Pada Juni 2026, Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau mencatatkan inflasi sebesar 5,46% (mtm) dengan andil 1,81% (andil mtm), terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga ikan cakalang, ikan malalugis, cabai rawit, bawang merah, dan ikan tuna. Pada periode yang sama, Kelompok Transportasi memberikan andil inflasi sebesar 0,54% (andil mtm), terutama dipengaruhi penyesuaian harga bensin dan tarif angkutan udara, sementara Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga memberikan andil sebesar 0,17% (andil mtm), terutama berasal dari kontrak rumah dan LPG nonsubsidi. Sebagai pusat konsumsi yang sebagian pasokannya berasal dari luar wilayah, dinamika ketersediaan pangan dan biaya distribusi relatif cepat ditransmisikan pada harga konsumen di Kota Ternate.

Kabupaten Halmahera Tengah mencatatkan inflasi sebesar 3,11% (yoy) pada triwulan II 2026, meningkat dibandingkan triwulan I 2026 yang sebesar 0,95% (yoy), namun masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional. Berbeda dengan Kota Ternate yang tekanan inflasinya didominasi kelompok pangan, struktur inflasi Halmahera Tengah relatif lebih berimbang antara Kelompok Transportasi dan Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, yang sama-sama memberikan andil sebesar 1,37% (andil yoy). Kelompok Transportasi mencatatkan inflasi sebesar 14,33% (yoy), sementara Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 3,25% (yoy). Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya turut memberikan andil sebesar 0,31%. Peningkatan inflasi Halmahera Tengah terutama mencerminkan tekanan pada komponen transportasi dan sejumlah komoditas pangan. Komoditas utama penyumbang inflasi tahunan pada akhir triwulan II meliputi bensin, solar, bawang merah, minyak goreng, serta ikan cakalang/ikan sisik.

Gambar 2.1. Perkembangan Inflasi Spasial Maluku Utara



Pada Juni 2026, penguatan tekanan juga terlihat dari inflasi bulanan sebesar 0,96% (mtm), dengan Kelompok Transportasi menjadi penyumbang utama sebesar 0,62% (andil mtm). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa dibandingkan Kota Ternate, tekanan inflasi bulanan (mtm) di Halmahera Tengah relatif lebih terkonsentrasi pada kelompok transportasi, sementara kontribusi kelompok pangan relatif lebih rendah.

Secara umum, peningkatan inflasi pada triwulan II 2026 terjadi pada seluruh daerah cakupan IHK di Maluku Utara, meskipun dengan intensitas dan sumber tekanan yang berbeda. Inflasi Kota Ternate yang lebih tinggi terutama mencerminkan kuatnya tekanan pada kelompok pangan, diikuti transportasi dan bahan bakar rumah tangga. Sementara itu, inflasi Kabupaten Halmahera Tengah relatif lebih terkonsentrasi pada Kelompok Transportasi dan Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau.

2.4. Prakiraan Inflasi Triwulan III 2026

Tekanan inflasi Provinsi Maluku Utara pada triwulan III 2026 diperkirakan mereda dibandingkan triwulan II 2026, meskipun masih dibayangi sejumlah risiko dari sisi pasokan pangan, harga energi dan transportasi, serta perkembangan harga emas global. Moderasi terutama diperkirakan didukung oleh normalisasi harga sejumlah komoditas pangan yang meningkat tinggi pada akhir triwulan II, membaiknya pasokan ikan segar, serta berlanjutnya musim panen hortikultura di sejumlah daerah pemasok. Meski demikian, dinamika cuaca, kelancaran distribusi antarpulau, dan perkembangan harga komoditas global tetap perlu dicermati.

Dari sisi permintaan, tekanan inflasi diperkirakan relatif terjaga sejalan dengan keberlanjutan aktivitas ekonomi daerah, meskipun penguatan daya beli masyarakat cenderung terbatas. Aktivitas sektor pertambangan dan industri pengolahan diperkirakan tetap menopang pendapatan masyarakat, sementara terbatasnya ruang fiskal daerah dan penyesuaian TPP ASN menjadi faktor penahan konsumsi. Di sisi lain, penyelenggaraan berbagai kegiatan berskala nasional dan daerah serta agenda MICE pada Triwulan III 2026 diperkirakan memberikan dorongan temporer terhadap mobilitas dan konsumsi masyarakat, terutama pada kelompok transportasi, akomodasi, serta penyediaan makanan dan minuman/restoran.

Dari sisi *volatile food*, tekanan inflasi diperkirakan mereda sejalan dengan perbaikan pasokan komoditas hortikultura dan perikanan. Berlanjutnya periode panen di sejumlah daerah sentra pemasok diperkirakan mendukung ketersediaan aneka cabai dan bawang merah, sementara kondisi perairan yang lebih kondusif berpotensi meningkatkan aktivitas penangkapan dan pasokan ikan segar. Upaya penguatan pasokan juga terus dilakukan melalui penyaluran beras SPHP, peningkatan produktivitas pangan, serta penajakan Kerja Sama Antar Daerah untuk memperkuat kesinambungan pasokan. Namun demikian, tingginya ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah, karakteristik armada perikanan yang didominasi skala kecil, potensi angin kencang dan gelombang tinggi seiring aktivitas siklon tropis di Laut Filipina dan Samudra Pasifik Utara, serta sensitivitas distribusi terhadap kondisi cuaca dan biaya logistik masih menjadi risiko terhadap stabilitas harga pangan.

Tekanan *administered prices* diperkirakan lebih terkendali dibandingkan triwulan sebelumnya, meskipun risiko dari sektor energi dan transportasi masih perlu dicermati. Setelah mengalami peningkatan pada triwulan sebelumnya, harga BBM nonsubsidi mulai terkoreksi pada Agustus 2026, sementara Pemerintah tetap mempertahankan harga BBM bersubsidi dan tarif listrik pada periode Juli–September 2026.

Stabilitas harga BBM dan tarif listrik disertai membaiknya distribusi LPG nonsubsidi diperkirakan menahan tekanan inflasi. Di sisi lain, perkembangan harga energi global dan avtur tetap berpotensi memengaruhi harga BBM nonsubsidi dan tarif angkutan udara, sementara karakteristik wilayah kepulauan menyebabkan biaya distribusi energi tetap sensitif terhadap gangguan logistik.

Dari sisi inflasi inti, tekanan pada triwulan III 2026 diperkirakan utamanya bersumber dari perkembangan harga emas global. Setelah mengalami koreksi pada

triwulan II 2026, kembali meningkatnya harga emas global pada triwulan II 2026 berpotensi ditransmisikan pada harga emas perhiasan domestik dan menahan laju moderasi inflasi inti.

Secara keseluruhan, inflasi Maluku Utara pada triwulan III 2026 diperkirakan mengalami moderasi dibandingkan triwulan II 2026. Perbaikan pasokan pangan dan berkurangnya tekanan pada sejumlah komponen *administered prices* menjadi faktor utama yang mendukung moderasi, sementara risiko masih bersumber dari gangguan pasokan dan distribusi pangan, perkembangan harga energi dan transportasi, serta harga emas global. Sinergi penguatan pasokan dan kelancaran distribusi oleh TPID diharapkan turut menjaga keberlanjutan proses moderasi inflasi sepanjang triwulan III 2026.

Sejalan dengan prakiraan moderasi tekanan inflasi pada triwulan III 2026, realisasi inflasi pada awal triwulan berjalan menunjukkan penurunan tekanan harga. Pada Juli 2026, Maluku Utara mencatatkan deflasi sebesar 0,67% (mtm), berbalik arah dari inflasi 2,45% (mtm) pada Juni 2026. Dengan perkembangan tersebut, inflasi tahunan Maluku Utara menurun menjadi 3,95% (yoy) dari 5,05% (yoy) pada bulan sebelumnya, meskipun masih sedikit berada di atas batas atas rentang sasaran inflasi nasional $2,5 \pm 1\%$. Sementara itu, inflasi tahun kalender tercatat sebesar 4,46% (ytd).

Deflasi Juli terutama bersumber dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang mencatatkan deflasi sebesar 1,93% (mtm) dengan andil deflasi 0,68% (andil mtm). Penurunan harga terutama terjadi pada cabai rawit, ikan malalugis/ikan sorihi, bawang merah, cabai merah, dan ikan cakalang/ikan sisik. Perkembangan tersebut didukung oleh membaiknya hasil tangkapan untuk beberapa komoditas ikan segar serta meningkatnya pasokan hortikultura seiring periode panen dan kelancaran pasokan dari sejumlah daerah sentra. Secara tahunan, kelompok ini masih menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan inflasi sebesar 3,86% (yoy) dan andil 1,34% (andil yoy), terutama berasal dari ikan cakalang, ikan tuna, dan minyak goreng.

Penurunan tekanan inflasi juga didukung oleh Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga serta Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Kelompok Perumahan mencatatkan andil deflasi sebesar 0,13% (mtm), terutama dipengaruhi penurunan harga LPG dengan andil 0,15% (mtm) sejalan dengan stabilisasi jalur distribusi. Sementara itu, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya memberikan andil deflasi sebesar 0,07% (mtm), antara lain bersumber dari koreksi harga

emas perhiasan sebesar 0,03% (andil mtm) mengikuti pelemahan harga emas global. Secara tahunan, tekanan dari kelompok Perawatan Pribadi masih cukup tinggi sebesar 6,00% (yoy) dengan andil 0,44%, terutama berasal dari emas perhiasan.

Di sisi lain, laju deflasi Juli tertahan oleh Kelompok Transportasi yang memberikan andil inflasi sebesar 0,20% (mtm), terutama akibat kenaikan harga bensin dengan andil 0,24% (mtm). Tekanan tersebut mencerminkan dampak lanjutan penyesuaian harga BBM nonsubsidi pada Juni 2026. Dengan demikian, realisasi Juli memberikan indikasi awal berlangsungnya moderasi inflasi pada triwulan III 2026, terutama ditopang oleh perbaikan pasokan pangan serta koreksi harga LPG dan emas, meskipun tekanan dari kelompok transportasi masih perlu dicermati.

2.5. Koordinasi Pengendalian Inflasi di Maluku Utara

Koordinasi pengendalian inflasi di Maluku Utara terus diperkuat untuk memitigasi risiko tekanan harga yang bersumber dari gangguan produksi, keterbatasan pasokan, hambatan distribusi, maupun peningkatan permintaan masyarakat. Di tingkat daerah, sinergi tersebut diwadahi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Maluku Utara dengan berpedoman pada kerangka strategi 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Implementasi strategi tersebut turut diperkuat melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) dengan pendekatan intervensi hulu-hilir untuk menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan daerah.

Sepanjang triwulan II hingga awal triwulan III 2026, TPID se-Maluku Utara terus mengintensifkan berbagai langkah pengendalian inflasi melalui strategi 4K. Beberapa langkah utama yang telah dilakukan antara lain:

1. **Penguatan keterjangkauan harga melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM)/Pasar Murah dan optimalisasi Kios Sigap Pangan (KSP).** Sepanjang triwulan II 2026, telah dilaksanakan **63 kali GPM/Pasar Murah** oleh TPID Provinsi dan kabupaten/kota se-Maluku Utara. Secara kumulatif, hingga Juni 2026 pelaksanaan GPM telah mencapai **122 kali**, termasuk 19 kali pelaksanaan pada Juni 2026. Intervensi tersebut diperkuat melalui KSP untuk memperluas akses masyarakat terhadap berbagai komoditas pangan strategis, antara lain beras, aneka cabai, bawang, minyak goreng, dan gula pasir dengan harga yang lebih terjangkau.
2. **Penguatan koordinasi kebijakan dan kesiapan intervensi menghadapi HBKN Iduladha melalui rangkaian Rakor dan High Level Meeting (HLM) TPID.** Koordinasi diawali melalui Rapat Koordinasi TPID se-Maluku Utara bersama asosiasi pedagang dan distributor pada **22 April 2026**, Rakor Teknis TPID pada **30 April 2026**, serta Rakor Pelaksanaan Pasar Murah Serentak pada **6 Mei 2026**. Selanjutnya, HLM TPID dan TP2DD se-Provinsi Maluku Utara dilaksanakan pada **8 Mei 2026** dengan fokus penguatan sinergi pengendalian inflasi menjelang HBKN Iduladha. Koordinasi di tingkat kabupaten turut diperkuat melalui HLM TPID Kabupaten Halmahera Tengah pada **17 Juni 2026** dan Kabupaten Pulau Morotai pada **22 Juni 2026**.
3. **Penguatan ketersediaan pasokan dilakukan melalui peningkatan produksi dan diversifikasi pangan lokal.** Pada Mei 2026, TPID mendorong gerakan menanam **4.000 pohon cabai keriting di Desa Waringin, Kabupaten Pulau Morotai**, disertai berbagai kegiatan peningkatan produksi pangan dan perikanan, antara lain panen udang vaname di Tidore Kepulauan dan Halmahera Barat serta panen raya swasembada pangan di Tobelo, Halmahera Utara. Pada 9 Juni 2026, dilakukan pula panen perdana cabai di Desa Tanjung Niara, Kecamatan Tobelo Tengah, serta penyaluran bantuan alat dan sarana produksi pertanian kepada **9 kelompok tani**, berupa *hand tractor*, *cultivator*, benih tomat unggul, pupuk, alat semprot, serta sarana pengendalian organisme pengganggu tanaman.
4. **Penguatan kelancaran distribusi dan pengawasan rantai pasok dilakukan melalui Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), pemantauan stok, serta inspeksi pasar.** Pada Juni 2026, TPID Provinsi Maluku Utara memfasilitasi distribusi **6.000 liter Minyakita** melalui Disperindag Provinsi Maluku Utara. Pengawasan harga dan ketersediaan pasokan menjelang Iduladha juga dilakukan melalui sidak pasar di Morotai dan Halmahera Tengah, pengawasan komoditas daging sapi dan beras di Halmahera Utara, pemantauan pasar dan gudang sembako di Tidore Kepulauan, serta pemeriksaan distribusi beras oleh Satgas Saber Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan di Kota Ternate.
5. **Upaya menjaga kesinambungan pasokan terus diperkuat melalui pengembangan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dan penguatan konektivitas distribusi.** Penguatan KAD diarahkan untuk memperlancar aliran komoditas pangan dari wilayah surplus menuju

wilayah defisit serta mengurangi ketergantungan terhadap jalur pasokan tertentu. Pada saat yang sama, isu distribusi energi turut menjadi perhatian, khususnya setelah perubahan titik pasok LPG nonsubsidi meningkatkan biaya logistik menuju Maluku Utara. HLM TPID mendorong penguatan koordinasi dengan Pertamina dan Pemerintah Pusat untuk memperkuat rantai distribusi dan menjaga stabilitas pasokan energi di daerah.

6. **Komunikasi pengendalian inflasi dan kapasitas kelembagaan TPID terus diperkuat untuk menjaga ekspektasi masyarakat serta meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.** Komunikasi publik dilakukan melalui kampanye **Belanja Bijak**, talkshow strategi pengendalian inflasi di televisi daerah dan RRI, Iklan Layanan Masyarakat terkait Belanja Bijak dan diversifikasi pangan, serta diseminasi melalui media sosial. Pada Juni 2026, komunikasi kepada pemangku kepentingan juga diperluas melalui kegiatan *Breakfast Meeting* di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara. Penguatan kapasitas kelembagaan dilakukan melalui *capacity building* pada **3-4 Juni 2026** bersama TPID Jawa Barat ke TPID Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mempelajari berbagai praktik terbaik, antara lain pengembangan *price reference store*, penguatan neraca pangan dan KAD, serta inovasi komunikasi pengendalian inflasi.

Lebih lanjut, TPID terus berupaya memperkuat pengendalian inflasi melalui Program Unggulan TPID Malut 2026 “Maluku Utara Bangkit Jaga Inflasi” yang berfokus pada peningkatan produktivitas dan efisiensi distribusi untuk menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan. Program tersebut diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, menjaga stabilitas harga pangan strategis, serta meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya dan distribusi kesejahteraan. Implementasinya diarahkan pada empat outcome utama, yaitu peningkatan produksi pangan, stabilitas pasokan antarwaktu, stabilitas pasokan antardaerah, serta integrasi data pasokan dan harga untuk mendukung kebijakan. Strategi tersebut diimplementasikan melalui kerangka 4K sebagai berikut:

1. **K1 – Keterjangkauan Harga**, melalui:

- a. Pelaksanaan Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah (GPM) bekerja sama dengan BULOG dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Sampai dengan Juni 2026, telah dilaksanakan **122 kali GPM** di Provinsi Maluku Utara.

- b. Intensifikasi pelaksanaan GPM secara lebih terjadwal melalui penguatan sinergi multipihak dan penyusunan kalender pasar murah di seluruh kabupaten/kota.
- c. Pelaksanaan sidak pasar, gudang distributor, dan gudang BULOG secara berkala dalam rangka memantau perkembangan harga, ketersediaan stok, serta memastikan kelancaran distribusi pangan strategis.
- d. Optimalisasi **Kios Sigap Pangan (KSP)** sebagai pasar penyeimbang untuk menyediakan kebutuhan pangan strategis masyarakat dengan harga yang terjangkau, terutama pada pasar-pasar di kota IHK.

2. **K2 – Ketersediaan Pasokan** melalui:

- a. Penguatan produksi pangan melalui *urban farming* dan gerakan menanam, termasuk pengembangan program **RINDANG BERSERI** untuk komoditas hortikultura strategis seperti cabai, tomat, dan kangkung.
- b. Peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan melalui pemberian sarana produksi, bantuan alat dan mesin, serta pendampingan kepada kelompok tani dan nelayan dengan fokus pada komoditas pangan strategis, seperti cabai dan tomat masing-masing seluas 5 ha beserta pemberian sarana produksi (saprodi).
- c. Peningkatan produksi pangan melalui Program Luas Tambah Tanam, perluasan dan perbaikan jaringan irigasi serta jalan produksi di daerah sentra, dan pemanfaatan teknologi pertanian dan perikanan.
- d. Penguatan kapasitas produsen melalui pelaksanaan sekolah lapang dan sekolah nelayan, serta pengembangan *digital farming* dan *digital fisheries* untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi.
- e. Penguatan manajemen stok pangan melalui optimalisasi sarana penyimpanan, termasuk pemanfaatan *cold storage* dan *cooler box*, khususnya untuk menjaga kualitas dan kontinuitas pasokan komoditas perikanan.

3. **K3 – Kelancaran Distribusi** melalui:

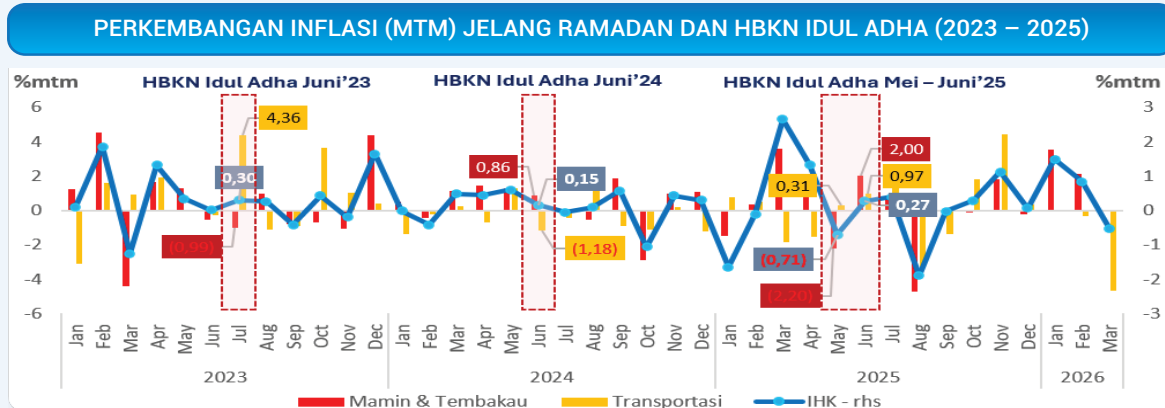
- a. Penguatan kerja sama antara BULOG, distributor, dan jaringan ritel dalam rangka memperpendek rantai distribusi serta meningkatkan efisiensi penyaluran pangan kepada masyarakat.

- b. Perluasan **Kerja Sama Antar Daerah (KAD)** untuk komoditas pangan utama, baik dari sisi jenis komoditas maupun mitra daerah, khususnya antara wilayah surplus dan defisit pasokan.
 - c. Dukungan subsidi ongkos angkut dan **Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP)** untuk mengurangi disparitas harga antardaerah, terutama bagi kota IHK dan wilayah yang memiliki ketergantungan pasokan dari luar daerah.
 - d. Perbaikan infrastruktur jalan produksi dan sentra distribusi guna memperkuat konektivitas antara daerah produsen dan pusat konsumsi.
 - e. Penguatan hilirisasi pangan melalui dukungan sarana, pelatihan, dan pendampingan serta pengembangan peran kelembagaan pangan daerah sebagai *off-taker* untuk memperkuat keterhubungan produksi dan pasar.
4. **K4 – Komunikasi Efektif** melalui:
- a. Pelaksanaan HLM dan Rapat Koordinasi TPID secara reguler di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, khususnya untuk memperkuat koordinasi kebijakan dan kesiapan intervensi pada periode yang berpotensi meningkatkan tekanan inflasi, termasuk HBKN.
 - b. Kegiatan edukasi perkembangan inflasi kepada masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi, antara lain siaran pers, media sosial, *media briefing*, *talkshow*, dan Iklan Layanan Masyarakat.
 - c. Sosialisasi dan edukasi **Belanja Bijak** serta diversifikasi konsumsi pangan secara rutin dengan melibatkan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, media, dan pemangku kepentingan lainnya.
 - d. Usulan pembentukan *website* dan penguatan **Sistem Informasi Neraca Pangan dan Kalender Tanam** di tingkat daerah sebagai basis pemantauan kondisi pasokan, identifikasi surplus-defisit, serta perumusan kebijakan pengendalian inflasi yang lebih tepat sasaran.
 - e. Penguatan komunikasi diversifikasi pangan melalui kampanye konsumsi pangan olahan untuk mengurangi ketergantungan terhadap komoditas pangan tertentu ketika terjadi gangguan pasokan.

Boks 2:

Strategi TPID Maluku Utara dalam Menjaga Stabilitas Harga pada Momen HBKN Iduladha Tahun 2026

Grafik 2.8. Perkembangan Inflasi (mtm) Jelang HBKN Iduladha



Momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha merupakan salah satu periode yang perlu diantisipasi dalam pengendalian inflasi Maluku Utara. Secara historis, tekanan harga pada periode HBKN Iduladha terutama berasal dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau serta Kelompok Transportasi. Komoditas yang relatif sering menjadi pendorong antara lain ikan malalugis/ikan sorihi, cabai merah, tarif angkutan udara, ikan cakalang/ikan sisik, dan ikan tuna. Karakteristik tersebut menunjukkan pentingnya menjaga ketersediaan pangan dan kelancaran distribusi, khususnya mengingat ketergantungan Maluku Utara terhadap pasokan dari luar daerah masih relatif tinggi. Dalam HLM tercatat sekitar 80% kebutuhan beras Maluku Utara masih dipasok dari luar daerah, demikian pula sebagian besar komoditas pangan lainnya.

Menjelang HBKN Iduladha 2026, tekanan inflasi mulai meningkat pada April 2026. Maluku Utara mencatat inflasi sebesar **0,80% (mtm)**, berbalik arah dari deflasi 0,54% (mtm) pada Maret 2026. Secara tahunan, inflasi tercatat sebesar **2,03% (yoy)** dan masih berada dalam rentang sasaran nasional, sementara inflasi tahun kalender mencapai **2,59% (ytd)**, lebih tinggi dibandingkan target indikatif sebesar 1,17% (ytd). Secara spasial, Kota Ternate mencatat inflasi sebesar 0,94% (mtm), sedangkan Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 0,24% (mtm).

Selain pangan dan transportasi, perkembangan harga energi menjadi risiko tambahan menjelang Iduladha. Harga LPG nonsubsidi meningkat sejak 18 April 2026 seiring perkembangan harga energi dan perubahan *supply point* Maluku Utara dari Surabaya ke Integrated Terminal Wayame di Ambon. Perubahan tersebut meningkatkan biaya logistik karena keterbatasan kapal reguler Ambon-Ternate. Kondisi ini memperlihatkan tingginya sensitivitas harga energi Maluku Utara terhadap konektivitas dan efisiensi distribusi antarpulau.

Merespons risiko tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Bank Indonesia dan TPID/TP2DD se-Maluku Utara menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) pada 8 Mei 2026 di Kota Ternate. HLM yang dipimpin Gubernur Maluku Utara menjadi forum konsolidasi kebijakan menjelang HBKN Iduladha dan melibatkan TPID/TP2DD Provinsi dan 10 kabupaten/kota se-Maluku Utara. Pertemuan tersebut sekaligus menegaskan implementasi Program Unggulan TPID 2026 **"Maluku Utara Bangkit Jaga Inflasi"**, yang mengintegrasikan intervensi hulu-hilir dalam kerangka 4K untuk menjawab empat tantangan utama, yaitu produktivitas pangan yang belum optimal, fluktuasi pasokan antarwaktu, inefisiensi dan defisit pasokan antarwilayah, serta belum terintegrasinya data harga dan pasokan.

Hasil HLM menyepakati sejumlah langkah prioritas pengendalian inflasi menjelang Iduladha dan penguatan ketahanan pangan Maluku Utara, yaitu:

Stabilisasi harga dan pengamanan pasokan selama HBKN, melalui GPM/Pasar Murah, akselerasi beras SPHP, implementasi Kios Sigap Pangan, sidak pasar, monitoring harga, serta pengawasan distribusi bahan pokok dan BBM. Pemerintah kabupaten/kota juga diarahkan menjaga alokasi anggaran GPM meskipun di tengah efisiensi fiskal.

Penguatan produksi dan ketahanan pasokan pangan, melalui peningkatan produktivitas petani, peternak, dan nelayan, dukungan sarana produksi dan KUR, pengembangan klaster pangan hulu-hilir, serta Gerakan Menanam RINDANG BERSERI. Stabilitas pasokan antarwaktu turut diperkuat melalui optimalisasi *cold storage*, pabrik es mini, *cooler box*, dan pengelolaan *buffer stock*, khususnya untuk komoditas perikanan.

Peningkatan efisiensi dan konektivitas distribusi, melalui Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), perbaikan jalan produksi dan jalur distribusi, serta peningkatan konektivitas angkutan laut. Untuk pasokan energi, salah satu tindak lanjut yang didorong adalah peningkatan konektivitas jalur Ternate-Ambon guna mendukung distribusi LPG.

Penguatan tata kelola, data, dan komunikasi pengendalian inflasi, melalui penyusunan neraca pangan dan kalender tanam, penguatan monitoring harga dan pasokan, penyelenggaraan HLM/Rakor secara berkala, serta komunikasi publik melalui kampanye Belanja Bijak dan diversifikasi pangan lokal. Penguatan data diarahkan agar intervensi dapat dilakukan lebih tepat berdasarkan kondisi surplus-defisit dan pola produksi antardaerah.

Periode menjelang HBKN Iduladha selanjutnya berlangsung di tengah meredanya tekanan inflasi bulanan. Pada Mei 2026, inflasi Maluku Utara tercatat sebesar **0,05% (mtm)**, jauh lebih rendah dibandingkan 0,80% (mtm) pada April 2026, sementara inflasi tahunan sebesar **2,82% (yoy)** masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa periode menjelang Iduladha tidak disertai lonjakan tekanan harga secara bulanan, **di tengah intensifikasi upaya TPID pada aspek ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.**

HLM TPID dan TP2DD Mei 2026 menunjukkan pergeseran pengendalian inflasi Maluku Utara dari intervensi harga jangka pendek menuju penguatan ketahanan pasokan secara lebih menyeluruh. Strategi tidak hanya diarahkan untuk menjaga harga selama HBKN, tetapi juga memperkuat produksi lokal, manajemen pasokan antarwaktu, konektivitas antardaerah, dan kualitas data sebagai fondasi pengendalian inflasi yang lebih berkelanjutan. Keberlanjutan implementasi **"Maluku Utara Bangkit Jaga Inflasi"** menjadi penting untuk mengurangi sensitivitas inflasi daerah terhadap gangguan produksi dan distribusi pangan maupun energi.



Gambar 2.2. Pelaksanaan HLM TPID TP2DD se-Maluku Utara Mei 2026



03

STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

Sistem Keuangan pada Triwulan II 2026 Terjaga Stabil

Indeks Keyakinan Konsumen di Maluku Utara pada triwulan II 2026 tetap tinggi sebesar 146,76 menunjukkan adanya optimisme masyarakat yang tinggi terhadap kondisi perekonomian pada triwulan II 2026.

Secara keseluruhan NPL kredit di Maluku Utara masih berada di bawah 5%. NPL keseluruhan pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 1,86%, yang menunjukkan tren yang membaik dan mencatatkan bahwa risiko kredit tetap terjaga pada level yang aman. Hal ini mengindikasikan bahwa stabilitas sistem keuangan di Provinsi Maluku Utara pada triwulan II 2026 masih terkendali di tengah pertumbuhan ekonomi melambat.

Indeks Ekspektasi
Konsumen

152,59

NPL Keseluruhan
Triwulan II 2026

1,86%

3.1. Stabilitas Keuangan Daerah

3.1.1. Asesmen Sektor Rumah Tangga

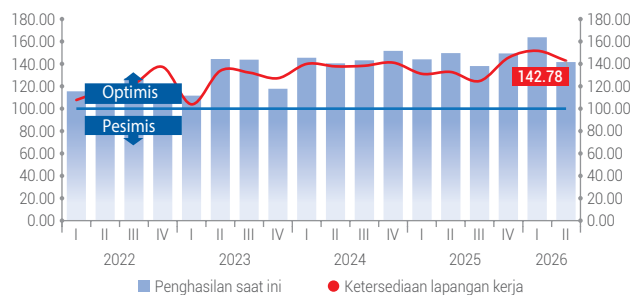
Hasil survei konsumen pada triwulan II 2026 menunjukkan penurunan optimisme. Pada triwulan II 2026, indeks penghasilan saat ini menurun dibandingkan triwulan sebelumnya, dari 163,89 menjadi 141,67. Sementara itu, indeks ketersediaan lapangan kerja sebesar 142,78 juga menurun dibandingkan angka pada triwulan sebelumnya sebesar 151,67 (Grafik 3.1).

Sementara itu, kontribusi Rumah Tangga (RT) terhadap PDRB juga menurun dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 3.2). Pada triwulan II 2026, kontribusi konsumsi RT terhadap PDRB Maluku Utara tercatat sebesar 20,93%, lebih rendah dibandingkan kontribusi triwulan sebelumnya sebesar 22,02%. Sejalan dengan hal tersebut, pertumbuhan konsumsi RT pada triwulan laporan turut melambat dari sebelumnya sebesar 6,11% (yoy) menjadi 4,39% (yoy).

Perlambatan konsumsi RT pada triwulan II 2026 dipengaruhi oleh pemangkasan kuota RKAB yang menyebabkan pengurangan tenaga kerja khususnya di sektor pertambangan dan menahan aktivitas usaha terkait, sehingga berdampak pada terbatasnya daya beli masyarakat.

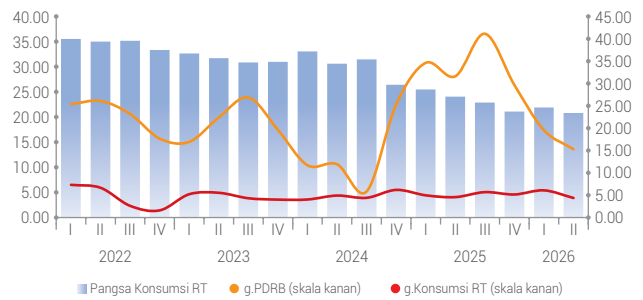
Sejalan dengan hal tersebut, Dana Pihak Ketiga (DPK) RT tercatat tumbuh 2,69% (yoy), melambat dibandingkan periode sebelumnya sebesar 3,08% (yoy). Hal ini dapat mengindikasikan adanya tekanan terhadap daya beli masyarakat sehingga masyarakat mengeluarkan uang yang lebih besar untuk berbelanja sandang dan pangan. Pangsa DPK terpantau mengalami penurunan menjadi 43,28% dari sebelumnya 49,82%. Sejalan dengan hal tersebut, terdapat penurunan porsi kredit RT pada portofolio kredit perbankan, menurun dari sebelumnya 22,65% menjadi 21,67% pada triwulan laporan.

Grafik 3.1. Indeks Penghasilan dan Ketersediaan Lapangan Kerja Saat Ini



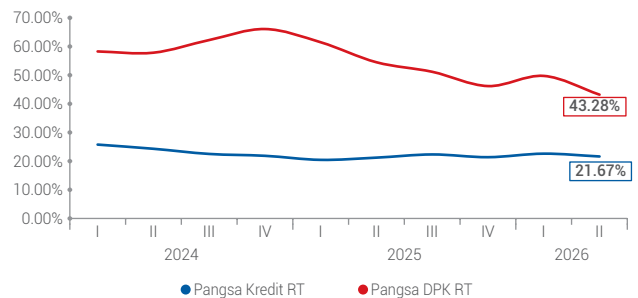
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.2. Kontribusi Konsumsi RT terhadap PDRB Maluku Utara



Sumber: BPS, diolah

Grafik 3.3. Pangsa Kredit dan DPK Rumah Tangga

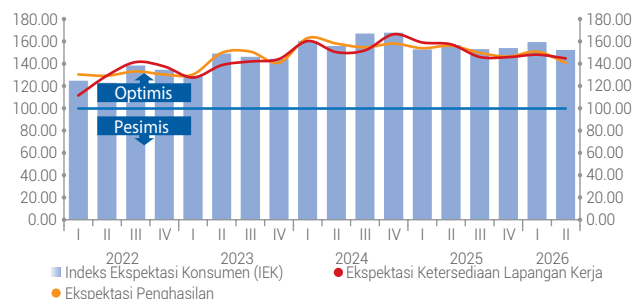


Sumber: LBU, diolah

Meskipun masyarakat terlihat cenderung menahan konsumsi, ekspektasi konsumen ke depan terlihat cukup baik. Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) triwulan II 2026 tetap tinggi sebesar 152,59 (Grafik 3.4). IEK tersebut menunjukkan adanya optimisme masyarakat yang tinggi terhadap ekspektasi penghasilan dan ekspektasi ketersediaan lapangan kerja di masa mendatang.

Kemudian, pangsa konsumsi dalam pengeluaran rumah tangga mengalami peningkatan pada triwulan II 2026. Hal tersebut tercermin dari konsumsi masyarakat pada kelompok berpengeluaran rendah-menengah

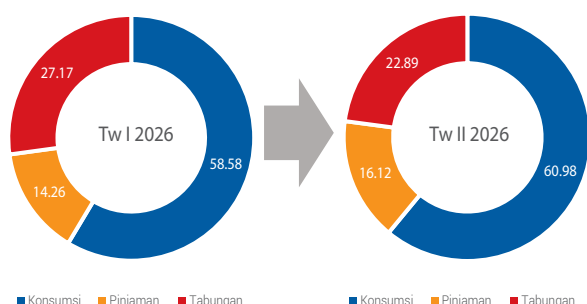
Grafik 3.4. Indeks Ekspektasi Penghasilan dan Ketersediaan Lapangan Kerja



Sumber: Bank Indonesia, diolah

yang meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama berasal dari peningkatan konsumsi dalam pengeluaran rumah tangga kelompok Rp1-2 juta yang tercatat meningkat dari 56,00% menjadi 65,59%. Kelompok rumah tangga dengan pengeluaran Rp2-3 juta turut meningkat dari 57,98% menjadi 61,71%. Selain itu, kelompok rumah tangga dengan pengeluaran Rp3-4 juta turut meningkat, dari 56,82% menjadi 57,71%. (Tabel 3.1). Selanjutnya, porsi komponen pengeluaran pinjaman untuk seluruh kelompok masyarakat cenderung meningkat pada triwulan laporan, dengan peningkatan tertinggi dicatatkan oleh kelompok rumah tangga dengan pengeluaran Rp4-5 juta yang tercatat sebesar 21,53% lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya sebesar 14,50%. Di sisi lain, porsi tabungan hampir di seluruh kelompok pengeluaran masyarakat menurun dari rata-rata 27,17% menjadi 22,89%. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya peningkatan kebutuhan maupun biaya hidup masyarakat di triwulan laporan, sehingga mengurangi porsi tabungan masyarakat (Grafik 3.5).

Grafik 3.5. Porsi Pengeluaran RT Maluku Utara



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Tabel 3.1. Porsi Pengeluaran Rumah Tangga Berdasarkan Kelompok Pengeluaran (%)

Pengeluaran Per Bulan	TW II 2025			TW III 2025			TW IV 2025			TW I 2026			TW II 2026		
	Konsumsi	Pinjaman	Tabungan	Konsumsi	Pinjaman	Tabungan	Konsumsi	Pinjaman	Tabungan	Konsumsi	Pinjaman	Tabungan	Konsumsi	Pinjaman	Tabungan
Rp1-2jt	67,32	13,54	19,13	63,29	13,93	22,78	55,51	14,96	29,53	56,00	10,38	33,63	65,59	11,38	23,03
Rp2-3jt	47,63	19,90	32,47	47,11	19,22	33,67	49,04	18,41	32,55	57,98	15,28	26,74	61,71	15,24	23,05
Rp3-4jt	42,93	22,16	34,92	39,17	23,52	37,30	39,59	21,83	38,58	56,82	16,05	27,12	57,71	19,01	23,28
Rp4-5jt	35,00	27,92	37,08	29,89	23,78	46,33	46,28	20,28	33,44	65,41	14,50	20,09	56,25	21,53	22,22
Rp5-6jt	56,25	16,67	27,08	13,33	10,00	10,00	38,33	12,36	15,97	60,36	7,74	31,90	40,89	9,94	15,83
Rp6-7jt	23,33	16,67	26,67	30,00	26,67	10,00	15,83	28,33	22,50	38,33	13,33	15,00	23,33	-	10,00
Rp7-8jt	6,67	10,00	16,67	8,33	8,33	16,67	20,00	13,33	-	43,33	15,00	8,33	23,33	1,67	8,33
>Rp8jt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,67	6,67	23,33	-	-	-

Sumber: Bank Indonesia, diolah

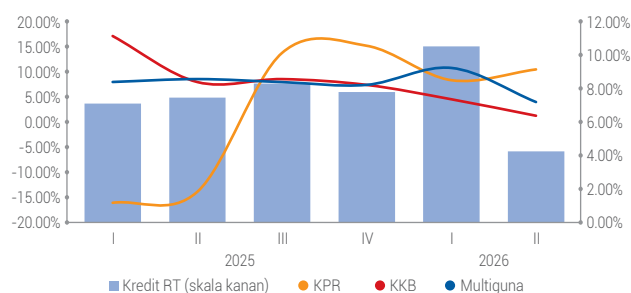
Eksposur Perbankan pada Sektor Rumah Tangga

Penyaluran kredit perbankan pada sektor RT Maluku di triwulan II 2026 tumbuh melambat di tengah peningkatan porsi pinjaman pada pengeluaran rumah tangga. Di sisi lain risiko NPL terpantau turun dibanding triwulan sebelumnya.

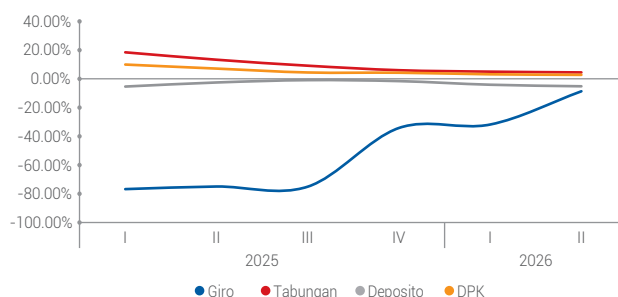
Kredit RT tumbuh sebesar 4,26% (yoy), melambat dibandingkan triwulan I 2026 yang tumbuh sebesar 10,57% (yoy). Perlambatan pertumbuhan kredit RT tersebut terutama bersumber dari kredit multiguna yang tumbuh 4,09% (yoy), lebih rendah dibanding pertumbuhan pada triwulan I 2026 yang sebesar 10,91% (yoy). Perlambatan juga terjadi pada kelompok KKB, dimana pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 1,33% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan I 2026 yang sebesar 4,63% (yoy). Di sisi lain, kelompok KPR tumbuh meningkat, sebesar 10,63% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I 2026 yang sebesar 8,47% (yoy) (Grafik 3.6).

Kredit multiguna menjadi kredit dengan pangsa terbanyak di sektor RT sebesar 91,91%. KPR dan KKB memiliki pangsa masing-masing sebesar 4,43% dan 3,66%.

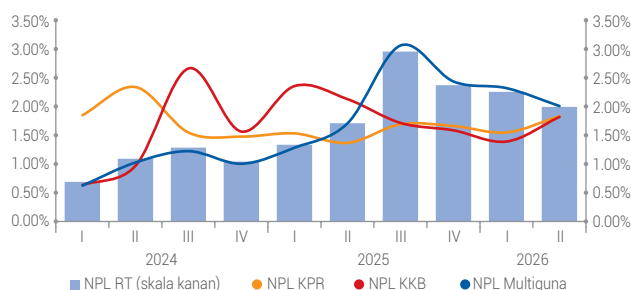
Di tengah perlambatan pertumbuhan kredit RT, rasio NPL kredit RT di Maluku Utara menunjukkan adanya penurunan faktor risiko, dari semula 2,27% menjadi 2,01% pada triwulan II 2026. Berdasarkan segmennya, rasio NPL tertinggi berasal dari kredit multiguna sebesar 2,02% diikuti kredit KPR 1,85% dan KKB 1,83%. Secara keseluruhan risiko kredit RT masih berada di bawah threshold 5% (Grafik 3.7).

Grafik 3.6. Pertumbuhan Kredit Sektor Rumah Tangga

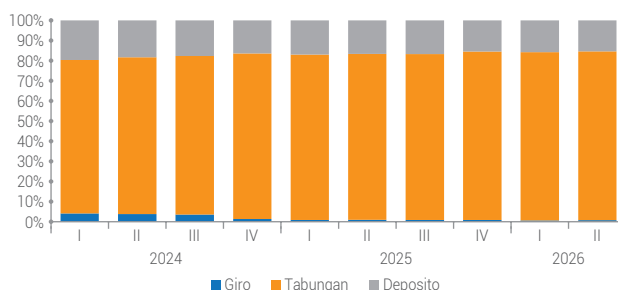
Sumber: LBU, diolah

Grafik 3.8. Komposisi DPK Sektor Rumah Tangga

Sumber: LBU, diolah

Grafik 3.7. Pertumbuhan NPL Kredit RT

Sumber: LBU, diolah

Grafik 3.9. Pangsa DPK Sektor Rumah Tangga

Sumber: LBU, diolah

Di sisi lain, Dana Pihak Ketiga (DPK) RT tercatat tumbuh **2,69% (yoy)**, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya sebesar **3,08% (yoy)**. Melambatnya pertumbuhan DPK terutama disebabkan oleh turunnya deposito. Pada triwulan laporan, tabungan tercatat tumbuh sebesar **4,40% (yoy)**, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar **4,93% (yoy)**. Di sisi lain, giro tercatat mengalami perbaikan kendati masih mengalami kontraksi sebesar **8,64% (yoy)** melandai dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat **-31,76% (yoy)**. Deposito juga tercatat masih tertekan dengan pertumbuhan **-5,22% (yoy)**, terkontraksi lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat **-4,15% (yoy)**.

Berdasarkan pangsaanya, sektor RT mencakup **43,28%** pangsa DPK perbankan pada triwulan II 2026, menurun dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar **49,82%**. Dari seluruh DPK RT yang dihimpun perbankan, tabungan masih memiliki porsi tertinggi sebesar **83,88%** dari total DPK RT di Maluku Utara. Sementara itu, deposito dan giro masing-masing memiliki pangsa sebesar **15,34%** dan **0,79%**. Selama beberapa periode terakhir, struktur DPK RT di Malut cenderung tidak mengalami perubahan. (Grafik 3.9).

3.1.2. Asesmen Sektor Korporasi

Kondisi perekonomian dan geopolitik global memberikan tekanan lebih terhadap kerentanan korporasi pada triwulan II 2026. Perang di Timur Tengah yang memicu kenaikan pada harga minyak dan komoditas dunia membuat sektor korporasi lebih berhati-hati dalam melaksanakan manuver bisnis.

Sejalan dengan PMI negara mitra utama, seperti Amerika Serikat dan Tiongkok yang tercatat meningkat, sektor korporasi menunjukkan perbaikan yang tercermin pada kinerja kredit korporasi pada triwulan II 2026 yang lebih tinggi daripada triwulan sebelumnya. Kendati demikian, risiko kredit korporasi yang tercermin pada rasio NPL sedikit meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya.

Sumber Kerentanan Sektor Korporasi

Pada triwulan II 2026, terdapat penurunan barang impor, seiring dengan penurunan impor barang modal dan bahan baku.

Impor barang modal terkontraksi **24,20% (yoy)**, mengalami kontraksi yang lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang kontraksi sebesar **0,54% (yoy)**.

Penurunan pada impor barang modal ditengarai karena selesainya pembangunan beberapa proyek investasi di Maluku Utara yang sudah *commissioning*.

Sementara itu, impor bahan baku tercatat tumbuh 78,36% (yoy) lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 61,73% (yoy). Tingginya impor bahan baku didorong oleh tingginya kebutuhan pada sektor industri pengolahan yang terus berkembang sebagai sektor pendorong pertumbuhan utama di Maluku Utara.

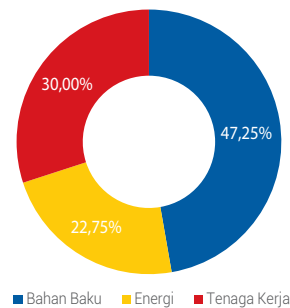
Di sisi lain, impor barang konsumsi juga tercatat tumbuh tinggi sebesar 108,61% (yoy) walaupun tidak berdampak signifikan karena hanya memiliki pangsa sebesar 0,23%. Bahan baku tercatat 76,96% dari total impor, diikuti barang modal dengan pangsa 22,81%.

Dengan demikian, secara keseluruhan impor Maluku Utara pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 36,34% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 59,65% (yoy) (Grafik 3.10).

Berdasarkan hasil Liaison triwulan II 2026, biaya bahan baku masih terus menjadi komponen dengan porsi terbesar. Pangsa biaya bahan baku tercatat sebesar 47,25% dari total biaya. Di sisi lain, pangsa biaya energi tercatat sebesar 22,75% dan pangsa tenaga kerja 30,00% (Grafik 3.11).

Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi tenaga kerja di Maluku Utara pada triwulan II 2026 (Mei 2026) didominasi oleh lulusan SD ke bawah (Grafik 3.12). Tidak hanya mendominasi dari sisi porsi ketenagakerjaan, pangsa tenaga kerja lulusan SD juga meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara itu, pangsa lulusan SMP dan SMK mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan masih

Grafik 3.11. Liaison Komposisi Biaya Korporasi

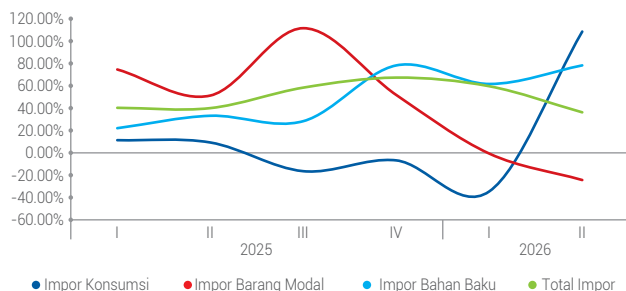


Sumber: Bank Indonesia, diolah

terbatasnya lapangan pekerjaan untuk lulusan pendidikan SMP dan SMK. Di sisi lain, porsi tenaga kerja lulusan SMA, Diploma, dan Universitas mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan akan tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tinggi semakin banyak, terutama untuk bekerja di sektor - sektor utama pendorong pertumbuhan ekonomi Maluku Utara, seperti pertambangan dan pengolahan. Hal ini mendorong daya saing dan daya adaptasi ekonomi terhadap perubahan global.

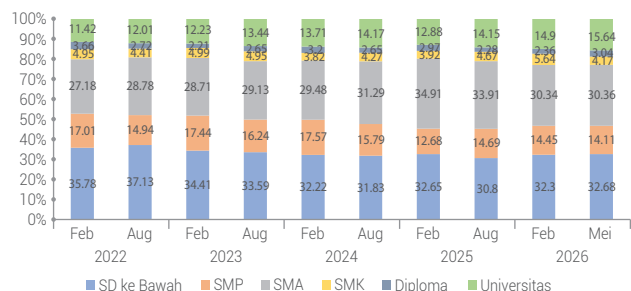
Pada triwulan II 2026, *Purchasing Managers Index* (PMI) dari negara-negara mitra dagang menunjukkan peningkatan dibandingkan periode sebelumnya (Grafik 3.13). PMI Amerika Serikat dan Tiongkok tercatat masing-masing sebesar 53,33 dan 50,2 atau masih berada pada fase ekspansif. Indikator PMI yang masih ekspansif pada negara mitra dagang utama Maluku Utara terkonfirmasi pada kinerja ekspor industri pengolahan. Kendati demikian, *likert scale* hasil Liaison triwulan II 2026 untuk industri pengolahan sebesar -1,00 yang disebabkan oleh kendala pemenuhan bahan baku di sektor pengolahan nikel.

Grafik 3.10. Komposisi Impor Maluku Utara



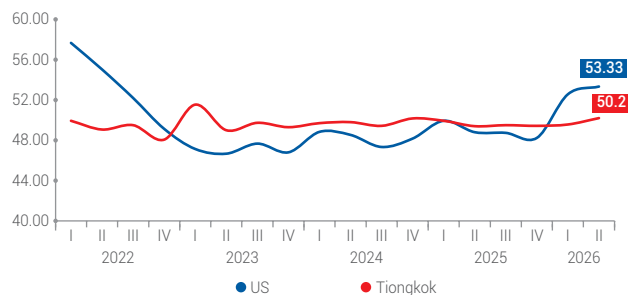
Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik 3.12. Presentase Penduduk Bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan



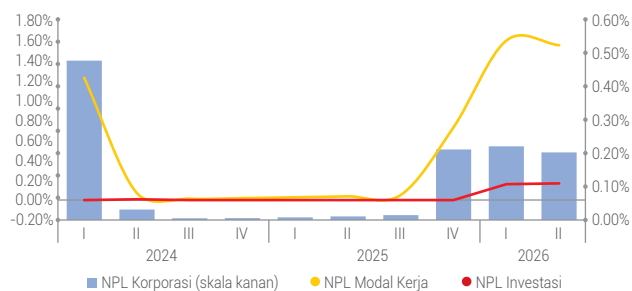
Sumber: BPS, diolah

Grafik 3.13. PMI Negara Mitra Dagang



Sumber: Bloomberg, diolah

Grafik 3.15. NPL Kredit Korporasi



Sumber: LBU, diolah

Eksposur Perbankan pada Sektor Korporasi

Di tengah ketidakpastian domestik dan global, kinerja penyaluran kredit korporasi menunjukkan peningkatan, terutama berasal dari meningkatnya pertumbuhan kredit modal kerja dan investasi. Kredit korporasi di triwulan II 2026 tumbuh sebesar 4,08% (yoy). Capaian ini berbalik arah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar terkontraksi 2,50% (yoy) (Grafik 3.14). Meningkatnya kredit korporasi bersumber dari pertumbuhan pada komponen modal kerja dan investasi. Kredit modal kerja tumbuh tipis 0,33% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang kontraksi 9,28% (yoy). Kemudian, kredit investasi tumbuh 5,62%, tumbuh meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh tipis 0,28%.

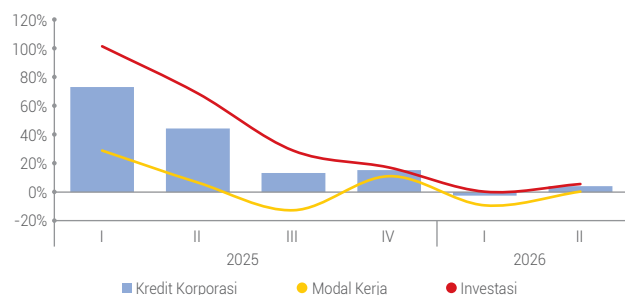
Adapun rasio NPL kredit korporasi tercatat 0,20%, cenderung stabil dan masih relatif rendah dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu 0,22%. Secara umum, NPL tersebut masih berada di bawah ambang batas 5%.

Berdasarkan sektor *tradable*, penyaluran kredit pada sektor utama bervariasi. Kredit LU industri pengolahan tercatat mengalami peningkatan kinerja dibandingkan

dengan periode laporan sebelumnya. Kredit industri pengolahan tercatat tumbuh 24,41% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan periode triwulan I 2026 yang tumbuh sebesar 21,48% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, pertumbuhan kredit korporasi di sektor pertanian dan perikanan juga meningkat (Grafik 3.16). Di sisi lain kredit sektor pertambangan masih terkontraksi 1,81%, melandai dibandingkan triwulan sebelumnya yang kontraksi 13,25%.

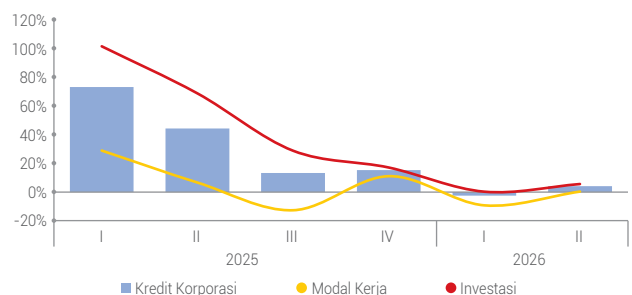
Adapun kredit pada mayoritas sektor *non-tradable* kontraksi, kecuali sektor akomodasi makan minum yang tumbuh meningkat. Kredit LU perdagangan mengalami kontraksi paling dalam yaitu sebesar 63,37% (yoy), melandai dibandingkan periode sebelumnya yang terkontraksi 82,86% (yoy). Kemudian, kredit transportasi juga mengalami kontraksi 29,32% (yoy) melandai tipis dibandingkan periode sebelumnya yang kontraksi 30,21% (yoy) (Grafik 3.17). Sementara itu, kredit LU akmamin tumbuh tinggi sebesar 286,54% (yoy) melanjutkan tren periode sebelumnya yang tumbuh tinggi 162,71% (yoy). Selanjutnya, kredit LU listrik, air dan gas tumbuh sebesar 4,30% (yoy), meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang kontraksi 0,40% (yoy).

Grafik 3.14. Pertumbuhan Kredit Korporasi



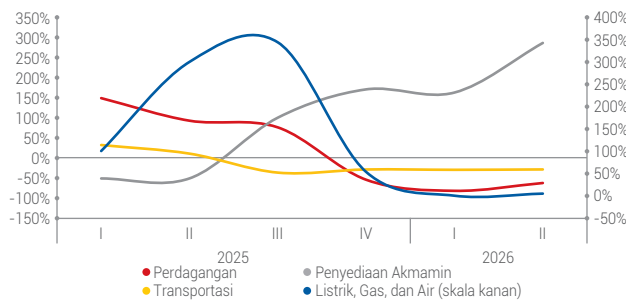
Sumber: LBU, diolah

Grafik 3.16. Perkembangan Kredit Berdasarkan Sektor Tradable



Sumber: LBU, diolah

Grafik 3.17. Perkembangan Kredit Berdasarkan Sektor Non-Tradable



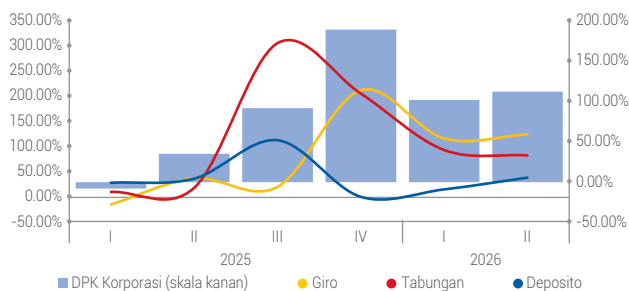
Sumber: LBU, diolah

Adapun Dana Pihak Ketiga (DPK) sektor korporasi mengalami peningkatan pertumbuhan dibandingkan triwulan sebelumnya.

DPK sektor korporasi pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 112,08% (yoy), meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 101,81% (yoy). Pertumbuhan tersebut ditopang oleh tumbuhnya giro sebesar 124,72% (yoy) lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 116,48% (yoy). Sejalan dengan itu, pertumbuhan tabungan dan deposito juga menunjukkan pertumbuhan yang tinggi. Tabungan tetap tumbuh tinggi sebesar 83,09% (yoy) kendati melandai dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 93,80% (yoy). Kemudian, deposito tumbuh 39,00% (yoy) lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 15,76% (yoy).

Dari sisi pangsa, komponen Giro masih mendominasi dengan besaran pangsa 84,24% dari total DPK korporasi. Kemudian diikuti oleh komponen Tabungan dan Deposito dengan masing-masing sebesar 9,66% dan 6,10%.

Grafik 3.18. Pertumbuhan DPK Korporasi Maluku Utara



Sumber: LBU, diolah

3.1.3. Asesmen Sektor Institusi Keuangan (Perbankan)

Kondisi Umum

Kinerja profitabilitas perbankan Maluku Utara cenderung meningkat pada triwulan II 2026. Nilai *Return on Asset* (ROA) perbankan pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 2,30%, lebih tinggi dibandingkan dengan ROA triwulan I 2026 yang tercatat sebesar 1,28% (Grafik 3.19). Peningkatan ROA tersebut sejalan dengan peningkatan *Return On Equity* (ROE) yang tercatat sebesar 3,68%, lebih tinggi dibandingkan ROE triwulan I 2026 sebesar 2,35%. Di sisi lain, aset perbankan yang berkantor di Maluku Utara pada triwulan laporan tumbuh meningkat dari sebelumnya 15,51% (yoy) menjadi 25,12% (yoy).

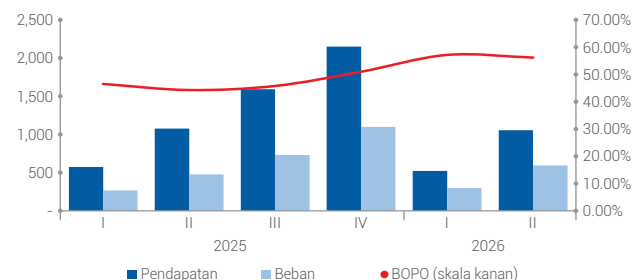
Pada triwulan II 2026 terdapat penurunan pada rasio Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO). Rasio BOPO pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 56,28%, lebih rendah dibandingkan dengan 57,25% pada periode sebelumnya. Penurunan rasio BOPO ini mengindikasikan adanya peningkatan pendapatan operasional yang lebih tinggi dibandingkan peningkatan beban operasional perbankan di Maluku Utara. Hal ini terkonfirmasi dari pertumbuhan pendapatan operasional perbankan pada triwulan II 2026 tumbuh 101,52% (qtq). Sementara itu, beban operasional perbankan pada triwulan II 2026 hanya tumbuh 98,08% (qtq) (Grafik 3.20).

Grafik 3.19. Rasio ROA Perbankan di Maluku Utara



Sumber: LBU, diolah

Grafik 3.20. Rasio BOPO Perbankan di Maluku Utara



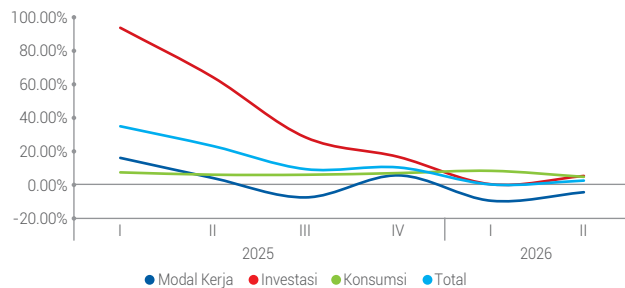
Sumber: LBU, diolah

Kinerja Intermediasi Perbankan

Kinerja penyaluran kredit perbankan Maluku Utara pada triwulan II 2026 mengalami peningkatan. Kredit perbankan tumbuh sebesar 2,32% (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode triwulan sebelumnya yang kontraksi 0,01% (yoy). Peningkatan kinerja penyaluran kredit ditopang peningkatan pertumbuhan kredit investasi dan kredit modal kerja yang berkontraksi lebih dangkal, sementara kredit konsumsi tumbuh melambat (Grafik 3.21). Kredit modal kerja masih mengalami kontraksi 4,67% (yoy), meski membaik dari capaian triwulan sebelumnya yang berkontraksi 9,80% (yoy). Kemudian, kredit investasi tumbuh sebesar 5,11% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2026 yang tumbuh 0,08% (yoy). Sementara itu, kredit konsumsi tumbuh melambat dari 8,21% (yoy) menjadi 4,52% (yoy) pada triwulan II 2026.

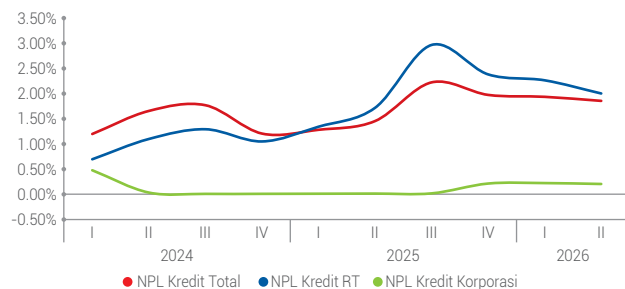
Berdasarkan jenisnya, kredit investasi masih menjadi komponen yang memiliki pangsa terbesar dalam penyaluran kredit perbankan Maluku Utara. Pangsa penyaluran kredit investasi, konsumsi, dan modal kerja masing - masing adalah 41,87%, 33,35%, dan 24,77%. Dari total Rp34,22 triliun kredit yang disalurkan perbankan, Rp14,33 triliun disalurkan berupa kredit investasi.

Grafik 3.21. Pertumbuhan Kredit Perbankan Maluku Utara



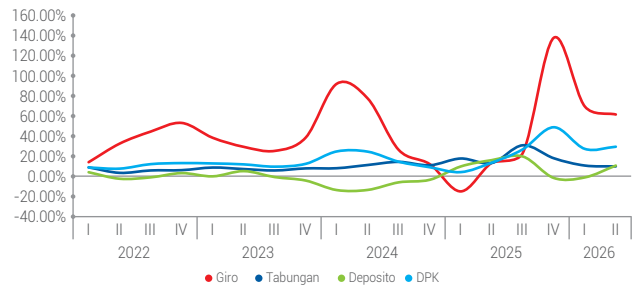
Sumber: LBU, diolah

Grafik 3.22. NPL Perbankan di Maluku Utara



Sumber: LBU, diolah

Grafik 3.23. Pertumbuhan DPK Perbankan Maluku Utara



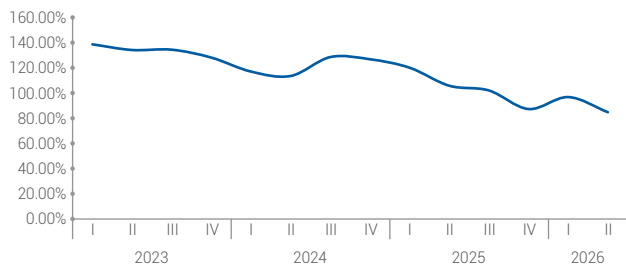
Sumber: LBU, diolah

Di tengah peningkatan pertumbuhan kredit yang terjadi, *Non Performing Loan* (NPL) perbankan di Maluku Utara menurun dibandingkan triwulan sebelumnya dan tetap terjaga di bawah angka *threshold* 5%. Pada triwulan II 2026, NPL dari perbankan tercatat sebesar 1,86%, lebih rendah dibandingkan dengan NPL perbankan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,94%. NPL sektor RT tercatat menurun dibandingkan dengan periode sebelumnya dari 2,27% menjadi 2,01% pada triwulan laporan. Kemudian, NPL korporasi tercatat sebesar 0,20%, turun tipis dibandingkan periode triwulan I 2026 yang tercatat sebesar 0,22% (Grafik 3.22).

Selanjutnya, penghimpunan DPK oleh perbankan yang berkantor di Maluku Utara tumbuh meningkat pada triwulan laporan. DPK perbankan Maluku Utara pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 29,50% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 27,35% (yoy). Peningkatan pertumbuhan DPK bersumber dari komponen deposito yang tercatat meningkat dari -1,25% (yoy) menjadi 10,61% (yoy) pada triwulan laporan. Sementara itu, peningkatan pertumbuhan DPK tertahan oleh penurunan pertumbuhan komponen giro dan tabungan dimana komponen giro tumbuh 61,66% (yoy) lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 69,73% (yoy) serta komponen tabungan yang tumbuh 9,79% (yoy) lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 10,66% (yoy) (Grafik 3.23).

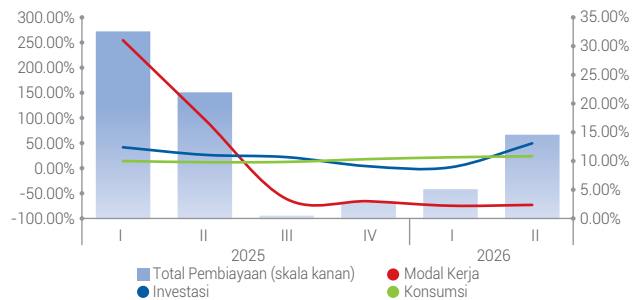
Dengan pertumbuhan kredit yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan DPK, rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada triwulan laporan mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Pada triwulan II 2026, LDR bank umum di Maluku Utara tercatat sebesar 84,85%, lebih rendah dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar 96,87% (Grafik 3.24). LDR merupakan salah satu indikator yang dapat merepresentasikan intermediasi perbankan dengan cara menghitung rasio antara penyaluran kredit dibandingkan penghimpunan DPK yang dikelola oleh perbankan.

Grafik 3.24. LDR Perbankan di Maluku Utara



Sumber: LBU, diolah

Grafik 3.26. Penyaluran Pembiayaan Syariah



Sumber: LBU, diolah

Kinerja Intermediasi Perbankan Syariah

Di sisi lain, kinerja pembiayaan perbankan syariah di Maluku Utara tumbuh meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah Maluku Utara pada triwulan II 2026 tercatat tumbuh sebesar 14,65% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,20% (yoy). Peningkatan kinerja tersebut dipengaruhi oleh perbaikan seluruh komponen pembiayaan, meskipun kredit modal kerja masih berkontraksi. Pada triwulan II 2026, pembiayaan investasi tumbuh sebesar 50,29% (yoy), tumbuh tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang tumbuh 3,00% (yoy). Kemudian, pembiayaan konsumsi tumbuh sebesar 25,05% (yoy), meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 22,77% (yoy). Sementara itu, pembiayaan modal kerja masih mengalami kontraksi sebesar 71,80% (yoy) mengalami perbaikan dibanding triwulan sebelumnya yang kontraksi 73,41% (yoy) (Grafik 3.26).

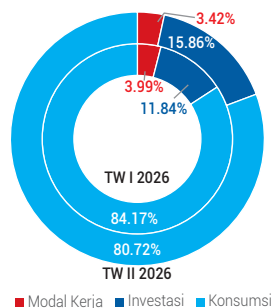
Dengan perkembangan tersebut, pangsa pembiayaan syariah pada triwulan II 2026 mengalami peningkatan. Pangsa penyaluran pembiayaan syariah terhadap total penyaluran kredit perbankan meningkat dari semula 5,49% pada triwulan I 2026 menjadi 5,95% pada triwulan

laporan. Peningkatan pangsa tersebut terjadi pada pembiayaan konsumsi dan investasi yang masing – masing mencatatkan pangsa sebesar 14,40% dan 2,25%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (13,47% dan 1,57%) Sementara itu, pangsa pembiayaan modal kerja turun tipis dari 0,90% menjadi 0,82% (Grafik 3.27).

Pangsa penyaluran pembiayaan syariah untuk kegiatan konsumsi masih menjadi penyaluran tertinggi dibandingkan dengan komponen lainnya seperti modal kerja dan investasi, dimana pangsa konsumsi mencapai 80,72% dari pembiayaan, sedangkan pangsa pembiayaan investasi sebesar 15,86% dan pangsa modal kerja mencapai 3,42% (Grafik 3.25).

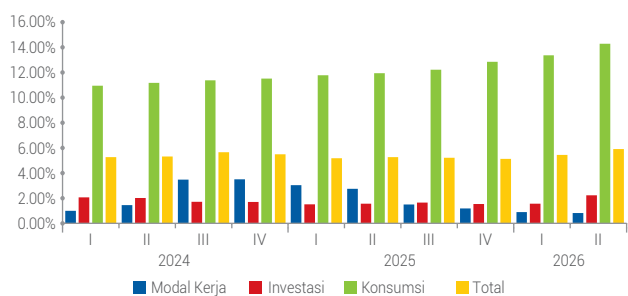
Di tengah peningkatan pada kinerja penyaluran pembiayaan, penghimpunan DPK Perbankan Syariah mengalami perlambatan pada triwulan laporan. DPK perbankan syariah Maluku Utara tumbuh 6,87% (yoy), lebih rendah apabila dibandingkan triwulan I 2026 sebesar 15,58% (yoy) (Grafik 3.28). Melambatnya pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan dari semua komponen. Komponen tabungan tumbuh sebesar 19,33% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 21,11% (yoy). Kemudian, komponen deposito

Grafik 3.25. Pangsa Pembiayaan Syariah



Sumber: LBU, diolah

Grafik 3.27. Pangsa Pembiayaan Syariah Terhadap Total Penyaluran Kredit Perbankan

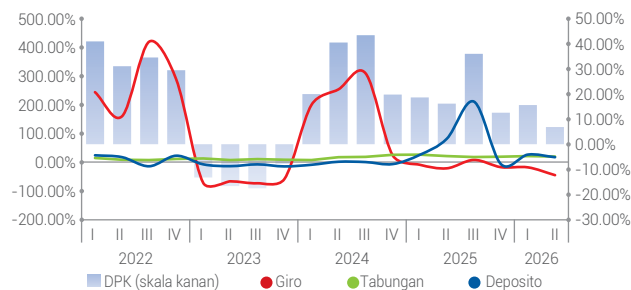


Sumber: LBU, diolah

tumbuh 17,05% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 26,27% (yoy). Sementara itu, komponen giro mengalami kontraksi 45,68% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi 18,45% (yoy).

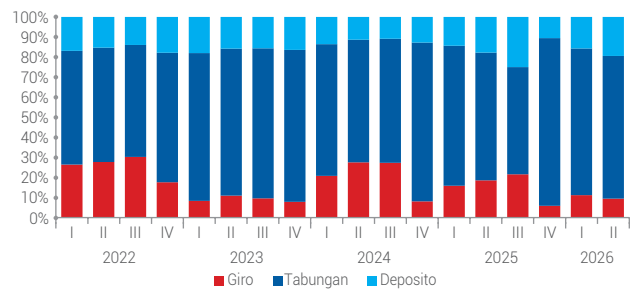
Adapun penghimpunan DPK syariah masih didominasi oleh tabungan dengan pangsa sebesar 71,07%, diikuti oleh produk deposito (19,51%), dan giro (9,42%). Pangsa produk tabungan dan giro sedikit menurun pada triwulan laporan, sementara pangsa deposito mengalami peningkatan.

Grafik 3.28. Penghimpunan DPK Syariah



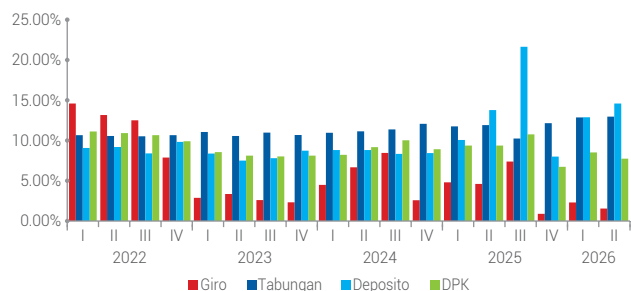
Sumber: LBU, diolah

Grafik 3.29. Komposisi DPK Syariah



Sumber: LBU, diolah

Grafik 3.30. Pangsa DPK Syariah Terhadap Total DPK Perbankan



Sumber: LBU, diolah

3.2. Pengembangan Akses Keuangan Dan UMKM

Kinerja Intermediasi Perbankan kepada UMKM

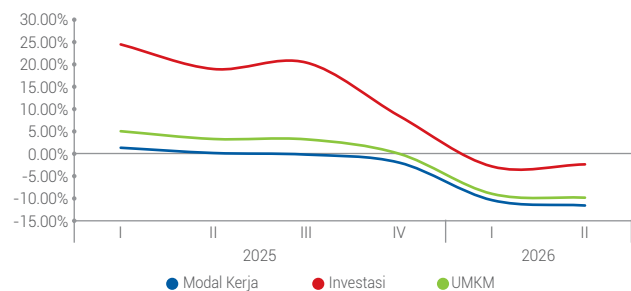
Penyaluran kredit kepada sektor UMKM di Maluku Utara pada triwulan II 2026 tercatat kontraksi lebih dalam dari triwulan sebelumnya. Pertumbuhan kredit kepada UMKM tercatat kontraksi 9,99% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan I 2026 yang kontraksi 9,12% (yoy).

Perlambatan pertumbuhan ini bersumber dari kredit modal kerja. Kredit modal kerja kontraksi sebesar 11,77% (yoy), lebih dalam dibandingkan periode sebelumnya yang kontraksi 10,56% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, kredit investasi UMKM juga masih mengalami kontraksi sebesar 2,44% (yoy), sedikit lebih baik daripada periode sebelumnya yang mengalami kontraksi lebih dalam sebesar 2,92% (yoy) (Grafik 3.31).

Ditinjau berdasarkan segmennya, kredit mikro dan kecil menjadi sumber perlambatan pertumbuhan kredit UMKM. Kredit mikro hanya tumbuh sebesar 1,88% (yoy), lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya sebesar 2,44% (yoy). Kinerja kredit UMKM kecil terkontraksi 16,24% (yoy) lebih dalam dibandingkan triwulan yang terkontraksi 10,65% (yoy). Sementara itu, kinerja kredit UMKM menengah menunjukkan perbaikan dengan kontraksi 25,33% (yoy), lebih dangkal dibanding kontraksi 34,33% (yoy) pada triwulan sebelumnya.

Dari sisi kualitas kredit, indikator NPL pada kredit UMKM di triwulan laporan masih terjaga di bawah **threshold 5%**. Pada triwulan II 2026 NPL kredit UMKM Maluku Utara tercatat berada di angka 2,87%, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 2,71% (Grafik 3.33).

Grafik 3.31. Pertumbuhan Kredit UMKM

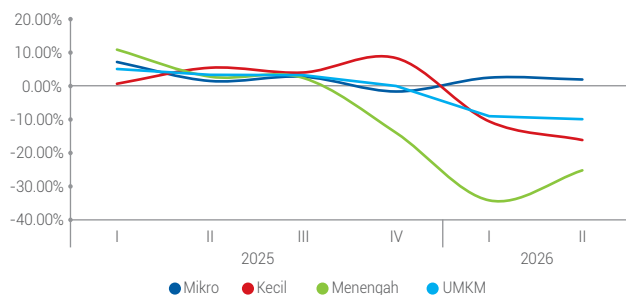


Sumber: LBU, diolah

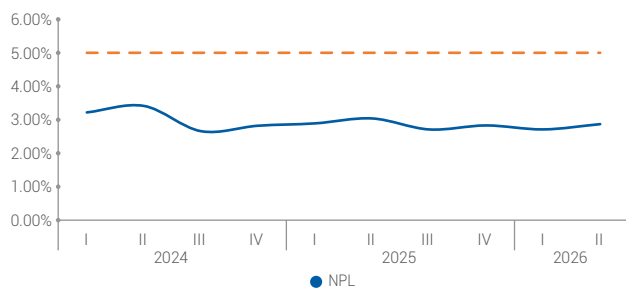
Tabel 3.2. Perkembangan Kredit UMKM Sektoral

Sektor (Lapangan Usaha)	Pertumbuhan (%yoy)					Nominal (Rp Miliar)				
	TW II 2025	TW III 2025	TW IV 2025	TW I 2026	TW II 2026	TW II 2025	TW III 2025	TW IV 2025	TW I 2026	TW II 2026
Pertanian	-1,52%	9,27%	14,18%	7,32%	4,19%	196,66	201,14	212,07	208,53	204,89
Perikanan	-1,36%	-0,23%	0,66%	1,60%	-3,26%	110,87	110,23	109,42	109,76	107,26
Pertambangan	0,74%	23,89%	-43,76%	-67,82%	-29,43%	36,56	45,73	35,47	24,12	25,80
Industri Pengolahan	28,77%	20,76%	47,68%	-14,29%	-34,84%	212,45	196,12	207,58	125,54	138,42
Konstruksi	-19,52%	-27,22%	-28,08%	-51,17%	-26,36%	171,58	127,52	177,75	115,63	126,36
Perdagangan	2,34%	0,50%	-2,02%	-7,81%	-12,39%	2.783,80	2.753,97	2.783,44	2.616,48	2.438,81
Penyediaan Akamin	8,92%	6,55%	9,01%	-0,29%	2,01%	440,88	446,61	470,79	432,80	449,76
Transportasi	9,30%	13,00%	-11,24%	-12,99%	-9,03%	161,77	171,45	151,73	149,59	147,16
Jasa Kemasyarakatan	4,90%	4,85%	-2,97%	-14,94%	-15,98%	248,64	251,01	235,28	210,81	208,91

Sumber : LBU, diolah

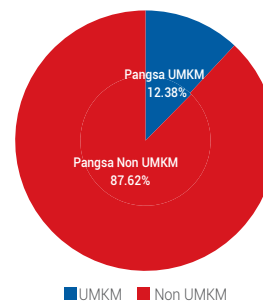
Grafik 3.32. Pertumbuhan Sub Kredit UMKM

Sumber: LBU, diolah

Grafik 3.33. Rasio NPL Kredit UMKM

Sumber: LBU, diolah

Dari sisi sektoral, terjadi perlambatan pada pertumbuhan kredit UMKM di sebagian besar lapangan usaha utama, terutama pada LU Pertanian, Perikanan, Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Jasa Kemasyarakatan. Dari lima sektor utama tersebut, kredit pada LU Pertanian masih tumbuh positif yaitu sebesar 4,19% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan I 2026 yang tumbuh sebesar 7,32% (yoy). Sementara itu, empat sektor lainnya justru mencatatkan kontraksi. LU industri pengolahan mencatatkan kontraksi terdalam, yaitu -34,84% (yoy).

Grafik 3.34. Pangsa Kredit UMKM Terhadap Total Kredit

Sumber: LBU, diolah

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara senantiasa mendorong UMKM naik kelas dan lebih berdaya saing serta mampu memperluas akses pasar melalui berbagai pelatihan, pembinaan, dan pendampingan serta *business matching* melalui program Serangkaian Kurasi UMKM & Wirausaha Unggulan Bank Indonesia (SERUMBI). Program pengembangan akses keuangan UMKM juga dilakukan melalui pengenalan penggunaan SiAPIK (Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan) kepada pelaku UMKM dan klaster binaan serta fasilitasi akses keuangan kepada perbankan. Selain itu, dalam upaya mendorong digitalisasi pada pelaku UMKM, juga digencarkan melalui implementasi pembayaran QRIS dalam transaksi pelaku UMKM melalui berbagai kegiatan yang Bank Indonesia lakukan maupun kegiatan yang diadakan oleh instansi lain. Sinergi dengan berbagai *stakeholder* termasuk OJK dan pemerintah daerah dilakukan dalam mendukung berkembangnya para pelaku UMKM yang *go digital* dan *go global*.



04

PENYELENGGARAAN SP DAN PUR

Kinerja sistem pembayaran tetap terjaga dengan baik, didukung oleh pertumbuhan signifikan transaksi digital melalui BI-FAST dan QRIS, serta ketersediaan uang kartal yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Maluku Utara.

Pada triwulan II 2026, digitalisasi sistem pembayaran di Maluku Utara terus menunjukkan penguatan. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan volume transaksi QRIS secara yang mencapai 239% (yoy) serta pertumbuhan volume transaksi BI-FAST yang tetap tinggi sebesar 53,45% (yoy). Perkembangan tersebut menunjukkan semakin luasnya penggunaan instrumen pembayaran digital oleh masyarakat dalam berbagai aktivitas ekonomi sehari-hari.

Dari sisi transaksi tunai, kebutuhan uang kartal tetap terjaga, dengan transaksi kas yang mencatatkan *net inflow* sebesar Rp36,92 miliar pada Triwulan II 2026. Secara keseluruhan, perkembangan sistem pembayaran di Maluku Utara menunjukkan berlanjutnya transformasi menuju ekosistem pembayaran yang semakin digital, dengan tetap didukung oleh kecukupan uang Rupiah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Transaksi QRIS TW II 2026

Rp653,02 miliar
6,76 juta transaksi

Net Outflow TW II 2026

Rp36,92 miliar

4.1. Kondisi Umum

Perkembangan sistem pembayaran di Provinsi Maluku Utara pada Triwulan II 2026 menunjukkan kinerja yang positif di tengah berlanjutnya transformasi digital pada aktivitas ekonomi masyarakat. Dari sisi pembayaran tunai, kebutuhan uang kartal tetap terjaga, dengan transaksi kas yang mencatatkan *net inflow* sebesar Rp36,92 miliar pada Triwulan II 2026 sejalan dengan penyetoran kembali uang kartal dari perbankan pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri yang terjadi pada triwulan sebelumnya.

Dari sisi pembayaran non tunai, digitalisasi sistem pembayaran terus menunjukkan penguatan. Hal ini tercermin dari pertumbuhan transaksi BI-FAST yang mengalami akselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya dengan pertumbuhan volume transaksi mencapai 53,45% (yoy) pada triwulan II 2026, meningkat dari 36,72% (yoy) pada triwulan I 2026. Sejalan dengan itu, pertumbuhan nominal transaksi BI-FAST juga meningkat dari 28,07% (yoy) menjadi 39,69% (yoy). Sementara itu, transaksi QRIS turut mencatatkan pertumbuhan yang tinggi, dengan volume transaksi meningkat 361% (yoy) dan nominal transaksi tumbuh 239% (yoy). Peningkatan tersebut menunjukkan semakin luasnya penggunaan instrumen pembayaran digital oleh masyarakat dalam berbagai aktivitas ekonomi sehari-hari.

Di sisi lain, transaksi melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) menunjukkan peningkatan nominal di tengah penurunan volume transaksi. Adapun transaksi BI-RTGS mencatatkan peningkatan baik dari sisi nominal maupun volume transaksi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa aktivitas transfer dana antarbank tetap terjaga, meskipun volume transaksi SKNBI mengalami penurunan sejalan dengan adanya opsi transaksi menggunakan BI-FAST.

Sejalan dengan meningkatnya penggunaan instrumen pembayaran digital, transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) menunjukkan perlambatan, baik pada transaksi kartu ATM/debit maupun kartu kredit. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya pergeseran preferensi masyarakat menuju instrumen pembayaran digital yang lebih cepat, mudah, dan efisien, khususnya BI-FAST dan QRIS.

Perkembangan ekonomi digital juga tercermin dari pertumbuhan transaksi *e-commerce*, meskipun sedikit mengalami perlambatan. Transaksi *e-commerce* mengalami perlambatan pada triwulan II 2026, tercermin dari pertumbuhan nominal transaksi yang melambat dari 20,38% (yoy) pada triwulan I 2026 menjadi 9,18% (yoy). Dari

sisi volume, pertumbuhan transaksi berbalik terkontraksi sebesar 7,21% (yoy), setelah pada triwulan I 2026 masih tumbuh sebesar 8,38% (yoy).

Nominal transaksi *e-commerce* masih tumbuh sebesar 9,18% (yoy), meskipun secara volume mengalami kontraksi sebesar 7,21% (yoy). Kondisi tersebut sejalan dengan normalisasi pasca belanja masyarakat yang tinggi di triwulan sebelumnya pada momen HBKN Ramadhan dan Idul Fitri. Meskipun demikian, aktivitas perdagangan digital di Maluku Utara tetap berkembang dan semakin terintegrasi dengan sistem pembayaran digital.

Secara keseluruhan, perkembangan sistem pembayaran pada Triwulan II 2026 menunjukkan bahwa digitalisasi transaksi keuangan di Maluku Utara terus berlanjut. Meningkatnya penggunaan BI-FAST dan QRIS, didukung oleh pertumbuhan aktivitas *e-commerce*, menunjukkan semakin kuatnya preferensi masyarakat terhadap instrumen pembayaran non tunai yang aman, cepat, dan efisien, tanpa mengurangi pentingnya peran uang kartal dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah kepulauan.

4.2. Perkembangan Sistem Pembayaran Tunai

4.2.1. Aliran Uang Masuk/Keluar (*Inflow/Outflow*)

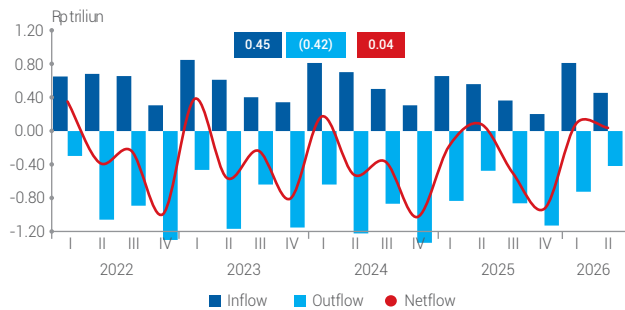
Pada Triwulan II 2026, transaksi uang kartal di Provinsi Maluku Utara mencatatkan *net inflow* sebesar Rp36,92 miliar. Kondisi tersebut berasal dari realisasi *inflow* sebesar Rp453,46 miliar, lebih tinggi dibandingkan *outflow* sebesar Rp416,54 miliar.

Terjadinya *net inflow* pada triwulan laporan menunjukkan bahwa aliran uang masuk ke Bank Indonesia masih lebih besar dibandingkan aliran uang keluar. Tingginya *inflow* terutama didorong oleh penyetoran kembali uang kartal oleh perbankan pada bulan April, setelah berakhirnya periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri yang terjadi pada akhir triwulan sebelumnya.

Secara historis, pola transaksi uang kartal di Maluku Utara menunjukkan peningkatan *outflow* menjelang periode HBKN, sementara *inflow* cenderung meningkat setelah periode kebutuhan uang tunai masyarakat mereda. Dengan demikian, *net inflow* yang masih terjadi pada Triwulan II 2026 mengindikasikan bahwa pengembalian uang kartal HBKN Idul Fitri masih lebih dominan dibandingkan peningkatan kebutuhan uang tunai pada periode Idul Adha.

Ke depan, kebutuhan uang kartal diperkirakan tetap tinggi pada Triwulan III 2026, didorong oleh peningkatan

Grafik 4.1. Perkembangan Transaksi Tunai di Maluku Utara s.d Periode Triwulan II 2026



Sumber: Bank Indonesia, diolah

aktivitas ekonomi masyarakat khususnya sejalan dengan momen libur sekolah dan tahun ajaran baru. Adapun perkembangan aliran *inflow-outflow* uang tunai di Provinsi Maluku Utara dari 2022 hingga 2025 dapat dilihat pada grafik 4.1.

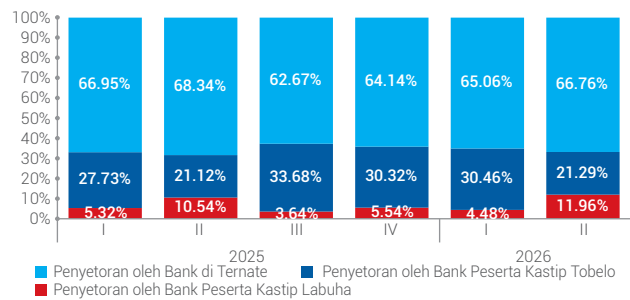
4.2.2. Upaya Menjaga Kebutuhan Uang Tunai

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara secara konsisten memastikan kelancaran sistem pembayaran serta menjaga ketersediaan uang Rupiah yang cukup dan layak edar di seluruh wilayah kerja. Upaya tersebut menjadi semakin penting mengingat karakteristik geografis Maluku Utara yang didominasi wilayah kepulauan sehingga memerlukan pengelolaan distribusi uang yang efektif, merata, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

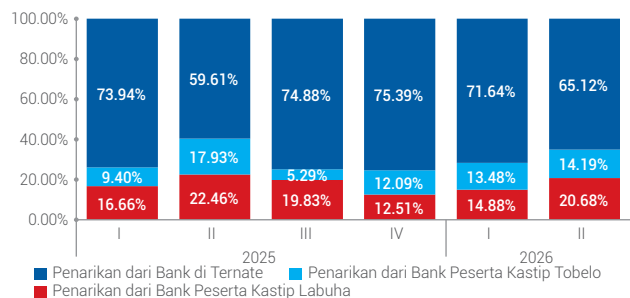
Pemenuhan kebutuhan uang tunai dilakukan melalui berbagai kanal, antara lain distribusi uang kepada perbankan, pengelolaan Kas Titipan Bank Indonesia yang berlokasi di Labuha (Kabupaten Halmahera Selatan) dan Tobelo (Kabupaten Halmahera Utara), layanan penukaran uang melalui loket Bank Indonesia, serta pelaksanaan kegiatan kas keliling pada berbagai wilayah di Provinsi Maluku Utara.

Pada Triwulan II 2026, aliran uang keluar (*outflow*) masih didominasi oleh penarikan perbankan di Kota Ternate dengan pangsa sebesar 65,12% dari total *outflow*. Meskipun demikian, pangsa tersebut mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 71,64%. Di sisi lain, peran Kas Titipan Labuha dan Kas Titipan Tobelo meningkat dengan pangsa masing-masing sebesar 20,68% dan 14,19%. Peningkatan tersebut mengindikasikan meningkatnya kebutuhan uang tunai di wilayah Halmahera Selatan dan Halmahera Utara.

Dari sisi aliran uang masuk (*inflow*), penyetoran uang kartal ke Bank Indonesia juga masih didominasi oleh

Grafik 4.2. Perkembangan Komposisi *Inflow* Maluku Utara s.d Periode TW II 2026

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.3. Perkembangan Komposisi *Outflow* Maluku Utara s.d Periode TW II 2026

Sumber: Bank Indonesia, diolah

perbankan di Kota Ternate dengan pangsa sebesar 66,76%. Sementara itu, Kas Titipan Tobelo berkontribusi sebesar 21,29%, menunjukkan tingginya aktivitas perputaran uang di wilayah Halmahera Utara. Adapun kontribusi Kas Titipan Labuha tercatat sebesar 11,96%.

Secara keseluruhan, komposisi *inflow* dan *outflow* pada Triwulan II 2026 menunjukkan bahwa Kota Ternate masih menjadi hub utama distribusi dan pengumpulan uang kartal di Maluku Utara. Namun demikian, peningkatan pangsa *outflow* melalui Kas Titipan Tobelo dan Kas Titipan Labuha mencerminkan pentingnya peran kedua Kas Titipan dalam mendukung pemerataan distribusi uang Rupiah dan menjaga kecukupan uang tunai pada wilayah kepulauan. Perkembangan komposisi *inflow* dan *outflow* dapat dilihat pada Gambar 4.2 dan Gambar 4.3.

4.3. Perkembangan Sistem Pembayaran Non Tunai

4.3.1. Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Pada Triwulan II 2026, transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) di Provinsi Maluku Utara mengalami penurunan. Dari sisi volume, jumlah transaksi tercatat

sebanyak 8.061 lembar atau turun sebesar 8,48% (yoy). Penurunan volume tersebut juga tercatat lebih dalam dibanding triwulan sebelumnya yang masih tercatat tumbuh sebesar 1,83% (yoy).

Dari sisi nominal, transaksi SKNBI pada Triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp442,20 miliar atau tumbuh 0,68% (yoy). Pertumbuhan ini juga tercatat lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 11,63% (yoy). Kondisi tersebut bahwa penggunaan SKNBI mengalami tren penurunan seiring dengan adanya opsi metode pembayaran lain, terutama BI-FAST. Namun demikian, meskipun berbagai instrumen pembayaran digital terus berkembang, SKNBI masih memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran transfer dana antarbank, khususnya untuk transaksi yang memerlukan efisiensi biaya dengan nilai transaksi yang relatif besar.

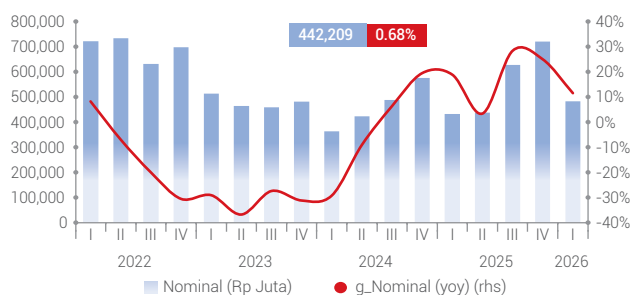
Ke depan, pangsa transaksi SKNBI terhadap total transaksi transfer dana berpotensi mengalami penyesuaian seiring semakin luasnya penggunaan layanan pembayaran berbasis digital seperti BI-FAST dan BI-RTGS. Perkembangan jumlah volume dan nominal transaksi kliring di Provinsi Maluku Utara dapat dilihat pada Grafik 4.4 dan 4.5.

Grafik 4.4. Perkembangan Jumlah Lembar Warkat SKNBI Maluku Utara



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.5. Perkembangan Nominal Transaksi SKNBI Maluku Utara



Sumber: Bank Indonesia, diolah

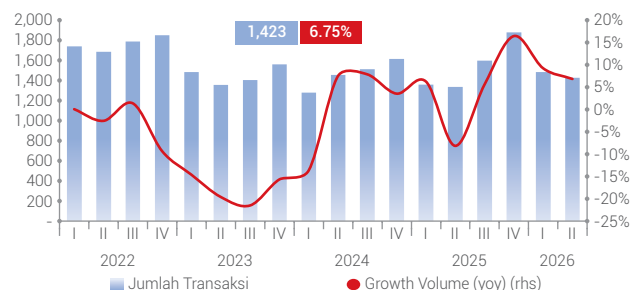
4.3.2. Transaksi Bank Indonesia - Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)

Perkembangan transaksi Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) di Provinsi Maluku Utara pada Triwulan II 2026 menunjukkan pertumbuhan baik dari sisi volume maupun nominal transaksi. Dari sisi volume, transaksi BI-RTGS tercatat sebanyak 1.423 transaksi atau tumbuh 6,75% (yoy). Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas transfer dana bernilai besar antar pelaku ekonomi dan lembaga keuangan masih berlangsung secara positif.

Lebih lanjut, dari sisi nominal transaksi BI-RTGS tercatat sebesar Rp2,58 triliun atau tumbuh 27,24% (yoy). Pertumbuhan nominal transaksi tersebut mengindikasikan masih tingginya transaksi bernilai besar yang diproses melalui BI-RTGS.

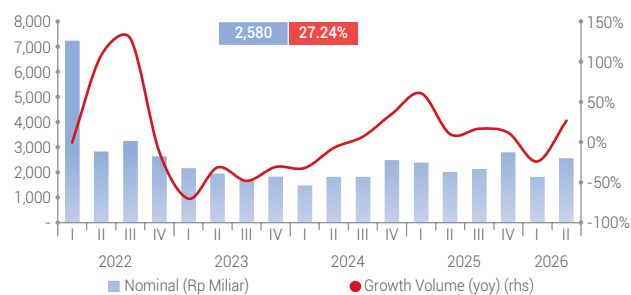
Perkembangan volume dan nominal transaksi BI-RTGS menunjukkan bahwa BI-RTGS tetap menjadi infrastruktur pembayaran yang penting dalam mendukung penyelesaian transaksi bernilai besar secara aman, cepat, dan *real-time*. Ke depan, perkembangan transaksi BI-

Grafik 4.6. Perkembangan Jumlah Transaksi RTGS Maluku Utara



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.7. Perkembangan Nominal RTGS Maluku Utara



Sumber: Bank Indonesia, diolah

RTGS diperkirakan akan sejalan dengan dinamika aktivitas korporasi, investasi, serta perkembangan sektor-sektor utama perekonomian Maluku Utara.

Perkembangan jumlah volume dan nominal transaksi RTGS di Provinsi Maluku Utara dapat dilihat pada Grafik 4.6 dan 4.7.

4.3.3. Transaksi Bank Indonesia Fast Payment (BI-FAST)

Perkembangan transaksi Bank Indonesia *Fast Payment* (BI-FAST) di Provinsi Maluku Utara pada Triwulan II 2026 masih menunjukkan pertumbuhan yang kuat. Dari sisi volume, transaksi BI-FAST tercatat sebanyak 6,75 juta transaksi atau tumbuh 53,45% (yoy). Capaian tersebut meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya dan menjadi level tertinggi sepanjang periode pengamatan.

Dari sisi nominal, transaksi BI-FAST tercatat sebesar Rp12,19 triliun atau tumbuh 39,69% (yoy). Peningkatan nominal transaksi tersebut menunjukkan semakin luasnya pemanfaatan BI-FAST sebagai sarana transfer dana antarbank oleh masyarakat maupun pelaku usaha di Maluku Utara.

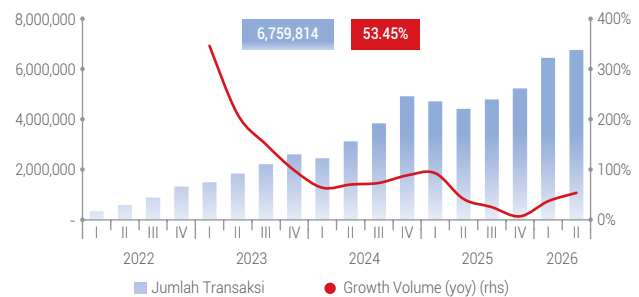
Pertumbuhan volume yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nominal mengindikasikan bahwa peningkatan penggunaan BI-FAST didorong oleh semakin banyaknya transaksi retail dengan nilai yang relatif lebih kecil. Kondisi tersebut mencerminkan semakin kuatnya preferensi masyarakat terhadap layanan transfer dana yang cepat, mudah, tersedia sepanjang waktu, dan berbiaya rendah.

Secara historis, transaksi BI-FAST menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sejak mulai diimplementasikan. Meskipun laju pertumbuhan tahunan cenderung mengalami normalisasi dibandingkan periode awal implementasi, perkembangan volume dan nominal transaksi yang terus meningkat menunjukkan bahwa BI-FAST telah menjadi salah satu instrumen pembayaran utama dalam mendukung aktivitas ekonomi dan transaksi keuangan masyarakat di Provinsi Maluku Utara.

Ke depan, transaksi BI-FAST diperkirakan akan terus tumbuh sejalan dengan meningkatnya digitalisasi sistem pembayaran, perluasan penggunaan layanan perbankan digital, serta perubahan preferensi masyarakat menuju transaksi non tunai yang lebih efisien.

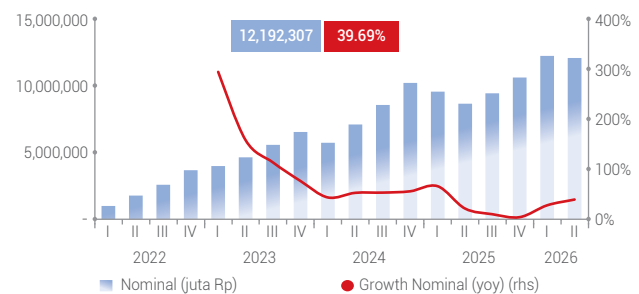
Perkembangan jumlah volume dan nominal transaksi BI-FAST di Provinsi Maluku Utara dapat dilihat pada Grafik 4.8 dan 4.9.

Grafik 4.8. Perkembangan Volume Transaksi BI-Fast di Maluku Utara



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.9. Perkembangan Nominal Transaksi BI-Fast di Maluku Utara



Sumber: Bank Indonesia, diolah

4.3.4. Perkembangan Implementasi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)

Perkembangan transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) di Provinsi Maluku Utara pada Triwulan II 2026 menunjukkan perlambatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari sisi kartu ATM/Debit, volume transaksi tercatat sebesar 9,04 juta transaksi atau berkontraksi 31,97% (yoy). Sementara itu, nominal transaksi tercatat sebesar Rp9,39 triliun atau berkontraksi 24,69% (yoy).

Penurunan volume dan nominal transaksi ATM/Debit tersebut mengindikasikan adanya pergeseran preferensi masyarakat menuju instrumen pembayaran digital yang lebih praktis, khususnya transfer dana berbasis BI-FAST dan transaksi menggunakan QRIS. Meskipun demikian, kartu ATM/Debit masih menjadi salah satu instrumen pembayaran yang banyak digunakan masyarakat, terutama untuk penarikan tunai dan transaksi pada *merchant* yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem pembayaran digital.

Dari sisi kartu kredit, volume transaksi pada Triwulan II 2026 tercatat sebanyak 41,33 ribu transaksi atau mengalami kontraksi sebesar 41,75% (yoy). Lebih lanjut,

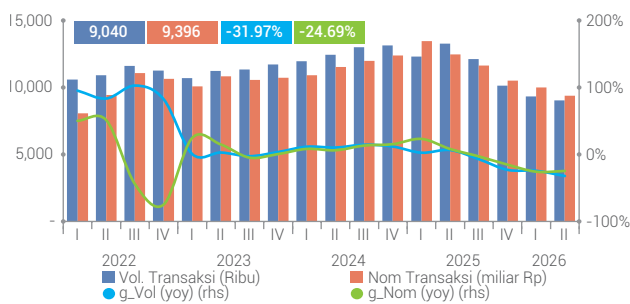
nominal transaksi kartu kredit tercatat sebesar Rp31,26 miliar atau juga mengalami kontraksi 42,83% (yoy). Penurunan tersebut menunjukkan adanya perlambatan aktivitas penggunaan kartu kredit dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari aspek risiko, nominal kredit bermasalah (non-performing loan / NPL) kartu kredit tercatat sebesar Rp4,67 miliar. Nominal NPL ini mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya, sehingga risiko yang ditimbulkan terhadap stabilitas sistem keuangan daerah tetap terjaga.

Ke depan, perkembangan transaksi APMK diperkirakan akan menghadapi tantangan dari semakin pesatnya digitalisasi sistem pembayaran. Pertumbuhan penggunaan BI-FAST, QRIS, dan layanan perbankan digital diperkirakan akan terus memengaruhi pola transaksi masyarakat sehingga penggunaan instrumen berbasis kartu cenderung tumbuh lebih moderat dibandingkan instrumen pembayaran digital lainnya.

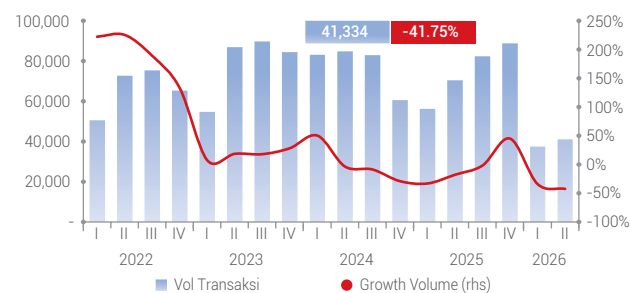
Perkembangan transaksi dan penggunaan APMK, baik kartu ATM/D maupun kartu kredit, ditunjukkan pada Grafik 4.10, 4.11, dan 4.12.

Grafik 4.10. Perkembangan Penggunaan Kartu ATM/Debit di Maluku Utara



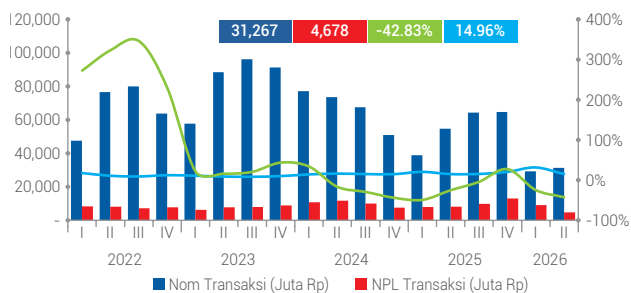
umber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.11. Perkembangan Volume Kartu Kredit di Maluku Utara



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.12. Perkembangan Nominal dan NPL Kartu Kredit di Maluku Utara



umber: Bank Indonesia, diolah

4.3.5. Transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)

Implementasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) di Provinsi Maluku Utara terus menunjukkan perkembangan yang positif pada Triwulan II 2026. Dari sisi penggunaan, transaksi QRIS terus menunjukkan pertumbuhan yang tinggi. Sampai dengan Juni 2026, volume transaksi QRIS sepanjang tahun tercatat mencapai 10,42 juta kali transaksi atau tumbuh 302% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sejalan dengan itu, nominal transaksi QRIS telah mencapai Rp1,08 triliun atau tumbuh 200% (yoy). Pertumbuhan volume yang lebih tinggi dibandingkan nominal menunjukkan bahwa QRIS semakin banyak digunakan untuk transaksi retail sehari-hari dengan nilai transaksi yang relatif kecil namun frekuensi yang tinggi.

Peningkatan transaksi tersebut didukung oleh terus bertambahnya jumlah pengguna QRIS di Maluku Utara. Hingga Juni 2026, jumlah pengguna QRIS tercatat mencapai 120.793 pengguna atau tumbuh 21,32% (yoy). Pertumbuhan pengguna yang positif menunjukkan semakin luasnya penerimaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital berbasis QRIS.

Perkembangan tersebut mengindikasikan bahwa QRIS telah menjadi salah satu instrumen pembayaran digital utama di Maluku Utara. Selain didukung oleh perluasan akseptasi pengguna, peningkatan transaksi juga mencerminkan semakin tingginya intensitas penggunaan QRIS dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan demikian, perkembangan QRIS tidak hanya ditandai oleh penambahan pengguna baru, tetapi juga oleh semakin kuatnya pemanfaatan QRIS sebagai sarana pembayaran sehari-hari.

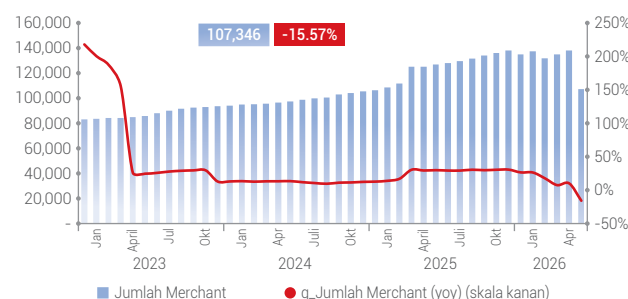
Di sisi lain, jumlah *merchant* QRIS di Maluku Utara tercatat mengalami penyesuaian. Hingga akhir Juni 2026, jumlah

merchant QRIS tercatat sebanyak 107.346 atau turun 15,57% [yoy]. Kondisi tersebut terutama disebabkan oleh pembersihan [*cleansing*] data *merchant dormant* yang dilakukan oleh Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP). Dengan demikian, penurunan tersebut tidak mencerminkan berkurangnya akseptasi QRIS, melainkan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan validitas basis data *merchant* aktif.

Ke depan, perkembangan transaksi QRIS di Maluku Utara berpotensi memperoleh tambahan momentum seiring dengan perluasan kebijakan *Merchant Discount Rate* (MDR) QRIS 0% yang berlaku efektif mulai 1 Oktober 2026. Kebijakan MDR 0% dilanjutkan bagi *merchant* Usaha Mikro (UMI) untuk transaksi sampai dengan Rp500.000. Pemberlakuan MDR 0% juga diperluas pada seluruh *merchant* kategori lainnya (kecil, menengah, dan besar) untuk transaksi sampai dengan Rp100.000, dari yang sebelumnya sebesar 0,7%. Perluasan kebijakan ini meningkatkan efisiensi biaya transaksi bagi pelaku usaha dan mendorong semakin luasnya manfaat digitalisasi pembayaran bagi masyarakat.

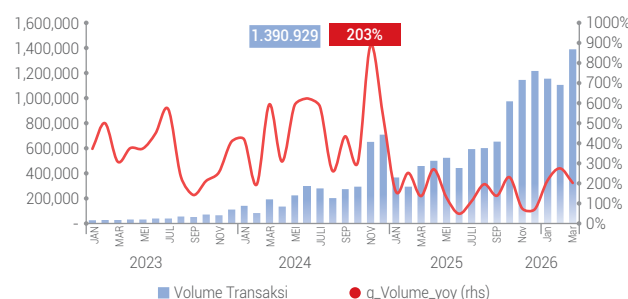
Perkembangan jumlah *merchant*, volume transaksi, nominal transaksi, dan jumlah pengguna QRIS berturut-turut dapat dijelaskan melalui Grafik 4.13, 4.14, 4.15, dan 4.16 berikut.

Grafik 4.13. Perkembangan *Merchant* QRIS di Maluku Utara



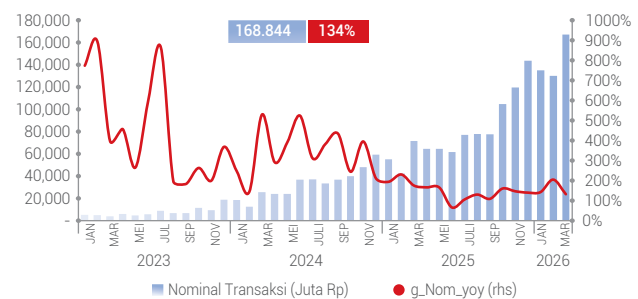
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.14. Perkembangan Volume Transaksi QRIS di Maluku Utara



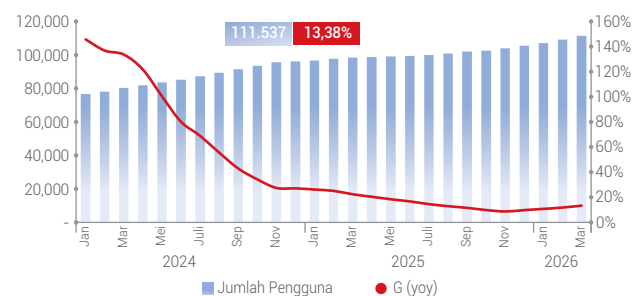
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.15. Perkembangan Nominal Transaksi QRIS di Maluku Utara



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.16. Perkembangan Jumlah Pengguna QRIS di Maluku Utara



Sumber: Bank Indonesia, diolah

4.3.6. Transaksi E-Commerce

Akseptasi aktivitas ekonomi digital oleh masyarakat Maluku Utara pada triwulan II 2026 masih menunjukkan tren yang terjaga. Hal ini tercermin dari volume transaksi *e-commerce* yang mencapai 1,67 juta kali, mengalami kontraksi sebesar 7,21% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sementara itu, nilai transaksi justru mengalami peningkatan, yaitu mencapai Rp289,33 miliar atau tumbuh sebesar 9,18% (yoy) dibandingkan dengan triwulan II 2025. Namun demikian, capaian tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencatatkan volume sebesar 1,99 juta kali transaksi dan nominal Rp330,53 miliar.

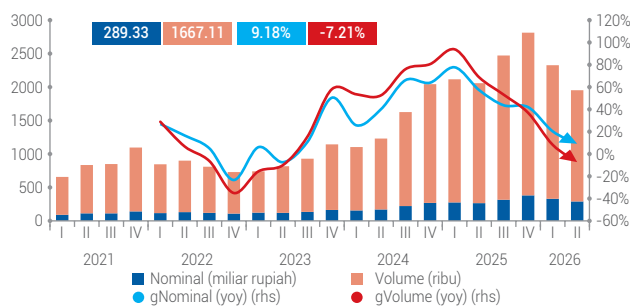
Dalam hal metode pembayaran, pada triwulan II 2026 mayoritas masyarakat Maluku Utara yang berbelanja melalui *e-commerce* masih mengandalkan sistem pembayaran tunai melalui metode *Cash on Delivery* (CoD), yang memiliki proporsi tertinggi sebesar 45,65%. Sementara itu, metode Transfer Bank menjadi pilihan kedua dengan kontribusi sebesar 18,44% dari total transaksi. Preferensi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki kecenderungan untuk memilih opsi pembayaran tunai, meskipun pangsaanya terus menyusut

seiring meningkatnya penggunaan metode pembayaran digital lainnya.

Dari sisi kategori produk, Fashion menjadi produk yang paling banyak diminati, dengan kontribusi sebesar 31% dari total transaksi. Sementara itu, kategori Personal Care & Kosmetik menempati posisi kedua dengan persentase sebesar 16% atau meningkat dibandingkan triwulan IV 2025 yang sebesar 14%, mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perawatan diri dan kecantikan.

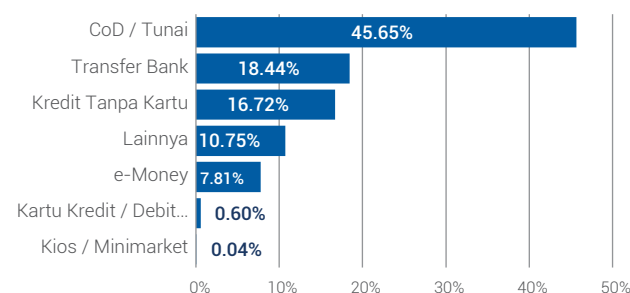
Perkembangan transaksi e-commerce ini mengindikasikan berlanjutnya adopsi digital di kalangan masyarakat Maluku Utara, meskipun dengan laju yang mulai melandai. Kemudahan akses terhadap platform *e-commerce*, meningkatnya kepercayaan terhadap transaksi daring, serta beragamnya pilihan metode pembayaran menjadi faktor utama yang menopang aktivitas ini, tercermin dari terus menurunnya pangsa pembayaran tunai melalui CoD. Rincian lebih lanjut mengenai perkembangan transaksi *e-commerce*, metode pembayaran yang digunakan, serta kategori produk yang paling diminati dapat dilihat secara berturut-turut pada Grafik 4.17, 4.18, dan 4.19.

Grafik 4.17. Perkembangan Nominal Transaksi E-Commerce di Maluku Utara



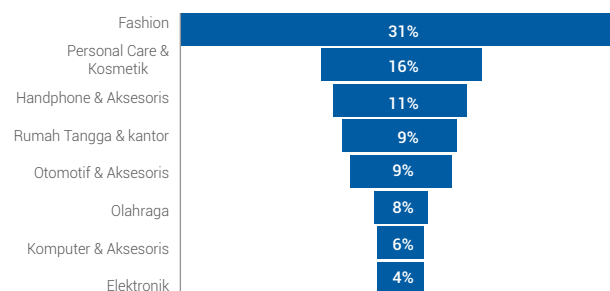
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.18. Pilihan Metode Pembayaran E-Commerce di Maluku Utara Triwulan II 2026



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.19. Pilihan Kategori Produk E-Commerce Triwulan II 2026



Sumber: Bank Indonesia, diolah

4.4. Prospek Sistem Pembayaran Triwulan III Tahun 2026

Perkembangan sistem pembayaran di Provinsi Maluku Utara pada Triwulan III 2026 diperkirakan tetap tumbuh positif sejalan dengan masih tingginya aktivitas ekonomi masyarakat. Dari sisi pembayaran tunai, kebutuhan uang kartal diperkirakan tetap tinggi seiring dengan adanya momen libur sekolah dan tahun ajaran baru yang umumnya mendorong peningkatan aktivitas konsumsi masyarakat.

Dari sisi pembayaran non tunai, transaksi BI-FAST dan QRIS diperkirakan tetap menunjukkan tren yang positif. Peningkatan transaksi BI-FAST dan QRIS akan didorong oleh semakin kuatnya adopsi layanan perbankan digital, perubahan perilaku masyarakat yang semakin memilih metode pembayaran non tunai, serta sinergi Bank Indonesia, industri sistem pembayaran, dan pemerintah daerah dalam memperluas jaringan akseptasi digital.

Lebih lanjut, aktivitas perdagangan melalui platform *e-commerce* diperkirakan terus berkembang sejalan dengan meluasnya akses internet, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap transaksi daring, dan semakin matangnya ekosistem pembayaran digital. Kondisi tersebut turut mendorong penggunaan instrumen pembayaran digital, sementara pertumbuhan transaksi berbasis kartu diproyeksikan berlangsung relatif lebih terbatas dibandingkan BI-FAST dan QRIS.

Akselerasi penggunaan QRIS juga diperkirakan semakin kuat dengan diberlakukannya perluasan kebijakan *Merchant Discount Rate* (MDR) QRIS 0% mulai 1 Oktober 2026. Skema ini tetap memberikan MDR 0% kepada *merchant* Usaha Mikro (UMI) untuk transaksi hingga Rp500.000, sekaligus memperluas manfaat yang sama kepada

merchant kategori kecil, menengah, dan besar untuk transaksi hingga Rp100.000 yang sebelumnya dikenakan MDR sebesar 0,7%. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menekan biaya transaksi, meningkatkan efisiensi usaha, dan mempercepat adopsi pembayaran digital di berbagai lapisan pelaku ekonomi.

Secara keseluruhan, prospek sistem pembayaran Maluku Utara pada Triwulan III 2026 diperkirakan tetap terjaga dengan baik. Berlanjutnya transformasi digital di sektor keuangan, meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, serta semakin luasnya pemanfaatan instrumen pembayaran digital.





05

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Kesejahteraan Masyarakat Terjaga

Kondisi ketenagakerjaan di Maluku Utara menunjukkan peningkatan, namun diikuti dengan tantangan pada indikator kesejahteraan. Dari sisi pasar tenaga kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tercatat meningkat 0,44 persen poin dibandingkan periode sebelumnya, sejalan dengan bertambahnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) sebanyak 3,97 ribu orang. Sejalan dengan itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) membaik menjadi 4,40%, turun 0,06 persen poin dibandingkan periode pencatatan sebelumnya (4,46%).

Meskipun indikator ketenagakerjaan membaik, tingkat kemiskinan di Maluku Utara mengalami peningkatan. Penduduk miskin tercatat sebesar 77,85 ribu orang, bertambah 3,04 ribu orang yang tersebar baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Kenaikan angka kemiskinan ini utamanya didorong oleh peningkatan Garis Kemiskinan (GK) sebesar 4,61%. Peningkatan tekanan harga ini turut menekan daya beli masyarakat perdesaan, tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) Triwulan II 2026 yang menurun menjadi 101,71 (dibandingkan Triwulan I 2026 dan periode sama tahun sebelumnya).

TPT Mei 2026

4,40%

NTP
Triwulan II 2026

101,71

5.1. Perkembangan Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Maluku Utara periode Mei 2026 sebesar 68,72% menunjukkan peningkatan dibandingkan periode Februari 2026 yang tercatat sebesar 68,28%. Terjadinya kenaikan TPAK pada bulan Mei 2026 sejalan dengan meningkatnya jumlah Angkatan Kerja dari 697,9 ribu orang pada Februari 2026 menjadi 705,14 ribu orang pada Mei 2026 atau naik sekitar 1,04%.

Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Maluku Utara periode Mei juga menurun. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), TPT Maluku Utara tercatat sebesar 4,40%, turun 6 (enam) basis poin dibandingkan Februari 2026 yang sebesar 4,46%. Penurunan ini sejalan dengan kenaikan jumlah Penduduk Bekerja sebesar 674,15 ribu orang pada Mei 2026 dibandingkan Februari 2026 sebesar 666,81 ribu orang.

5.1.1 Tenaga Kerja

Berdasarkan rilis data BPS, penyerapan tenaga kerja di Maluku Utara sepanjang periode Februari 2026 sampai dengan Mei 2026 mencatatkan kenaikan. Dari total angkatan kerja, jumlah penduduk bekerja sebesar 674,15 ribu orang atau meningkat 7,3 ribu orang dibandingkan Februari 2026.

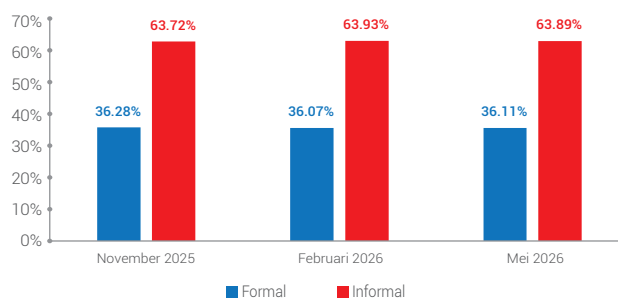
Di sisi lain, pengangguran mengalami penurunan sebesar 94 orang, dengan jumlah angkatan kerja yang menganggur sebesar 30,9 ribu orang. Terkait peningkatan TPAK, peningkatan persentase TPAK menurut jenis kelamin bersumber dari tenaga kerja laki-laki yang tercatat sebesar 83,00%, lebih tinggi dibandingkan pada periode Februari 2026 sebesar 82,10% atau meningkat 0,90 persen poin. Peningkatan tersebut diperkirakan karena masih tingginya kebutuhan pekerja laki-laki pada sektor-sektor berat seperti Pertambangan dan Kehutanan, Perkebunan, dan Perikanan. Sedangkan TPAK untuk pekerja perempuan, pada Mei 2026 menunjukkan penurunan sebesar 0,05 persen poin.

Struktur penyerapan tenaga kerja masih terkonsentrasi pada tiga lapangan usaha. Di Maluku Utara, sektor Industri Pengolahan tetap menjadi kontributor terbesar pada penyerapan tenaga kerja dengan andil sebesar 25,19%. Sektor kedua dan ketiga yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 24,26% serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 12,39%. Meskipun menjadi kontributor penyerapan tenaga kerja utama, penyerapan tenaga kerja di sektor Industri Pengolahan mengalami penurunan sebesar 970 orang pada Mei 2026 dibandingkan dengan Februari 2026.

Berdasarkan status pekerjaan utama, tenaga kerja dapat dikelompokkan menjadi kelompok sektor formal dan sektor informal. Pada Mei 2026, penduduk bekerja pada kegiatan sektor informal sebanyak 430,69 ribu orang atau 63,89%, sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 243,46 ribu orang atau 36,11% (Grafik 5.1). Sementara itu, pangsa tenaga kerja formal naik 0,04 persen dibandingkan Februari 2026, setelah sebelumnya menurun dibandingkan dengan November 2025.

Lebih lanjut, sepanjang periode pemantauan hingga bulan Mei 2026, terdapat 35,78% penduduk yang bekerja tidak

Grafik 5.1. Penduduk Bekerja Menurut Kegiatan Formal/Informal



Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Tabel 5.1. Perkembangan Ketenagakerjaan di Maluku Utara (Ribu Jiwa)

Kegiatan Utama	Nov 2025 (orang)	Feb 2026 (orang)	Mei 2026 (orang)	Perubahan Feb-Mei 2026 (orang)	Perubahan Feb-Mei 2026 (persen)
Penduduk Usia Kerja	1.018.207	1.022.132	1.026.102	3.970	0,39
Angkatan Kerja	699.017	697.905	705.147	7.242	1,04
a. Bekerja	668.002	666.813	674.149	7.336	1,10
b. Pengangguran	31.015	31.092	30.998	-94	-0,30
	persen	persen	persen	persen poin	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	68,65	68,28	68,72	0,44	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,44	4,46	4,40	-0,06	

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

penuh (jam kerja kurang dari 35 jam dalam seminggu), yang terdiri atas 7,37% setengah penganggur serta 28,41% pekerja paruh waktu, sementara 64,22% penduduk bekerja penuh. Persentase penduduk setengah penganggur ini mengalami penurunan dibandingkan periode Februari 2026, di mana persentase tenaga kerja berstatus setengah penganggur sebelumnya adalah 7,73%. Meskipun persentase setengah penganggur menurun, tingginya porsi penduduk yang bekerja tidak penuh menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di Maluku Utara masih didominasi oleh sektor informal yang produktivitas dan tingkat upahnya terbatas, sehingga belum optimal dalam menopang daya beli dan menekan angka kemiskinan secara signifikan.

5.1.2 Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Mei 2026 terpantau menurun, ditopang penyerapan sektor Pertanian di tengah berkurangnya tenaga kerja sektor pertambangan dan industri pengolahan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Maluku Utara menurun sebesar 0,06 persen poin dibandingkan dengan TPT Februari 2026 (4,46%). TPT Maluku Utara pada Mei 2026 adalah sebesar 4,40% atau dari sekitar 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 4 orang penganggur. Penurunan TPT tersebut didorong oleh tiga lapangan usaha yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja pada Mei 2026 dibandingkan Februari 2026, yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (4,86 ribu orang), sektor Keuangan, Real Estat,

Profesional & Administratif (1,59 ribu orang), dan sektor Pendidikan (1,55 ribu orang).

Berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, distribusi penduduk bekerja relatif stabil dibandingkan Februari 2026, meski mulai menunjukkan pergeseran ke arah kualifikasi yang lebih tinggi. Penduduk bekerja di Maluku Utara masih didominasi oleh pekerja berpendidikan SD ke bawah dengan porsi mencapai 32,68%. Namun demikian, proporsi tenaga kerja terdidik (lulusan Diploma I/II/III) mencatatkan peningkatan menjadi 15,64% dibandingkan periode sebelumnya, menunjukkan peningkatan penyerapan tenaga kerja berketerampilan tinggi sejalan dengan berkembangnya sektor Jasa dan Industri bernilai tambah tinggi di Maluku Utara.

5.2 Kondisi Umum Kesejahteraan

Tingkat kemiskinan di Maluku Utara pada periode Maret 2026 adalah sebesar 5,79%, meningkat 0,2 persen poin terhadap September 2025 tetapi turun 0,02 persen poin terhadap Maret 2025. Peningkatan angka kemiskinan ini terjadi baik di wilayah perkotaan (naik menjadi 24,25 ribu orang/6,00%) maupun perdesaan (naik menjadi 53,61 ribu orang/5,69%). Fenomena ini mengindikasikan bahwa akselerasi pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang terpusat pada sektor Industri Pengolahan belum optimal penyerapannya secara inklusif ke seluruh lapisan masyarakat, khususnya industri terkait dengan pertambangan.

Tabel 5.2. Nilai Tukar Petani (NTP) Rata-rata Sulampua

Lapangan Pekerjaan Utama	Persentase Penduduk Bekerja Mei 2026 (persen)	Perubahan Februari 2026-Mei 2026 (ribu orang)
C. Industri Pengolahan	25,19%	-0,97
A. Pertanian, Kehutanan, & Perikanan	24,26%	4,86
G. Perdagangan Besar dan Eceran	12,39%	1,03
P. Administrasi Pemerintahan	9,43%	0,12
Q. Pendidikan	7,03%	1,55
H. Transportasi dan Penyimpanan; J, K. Aktivitas Penerbitan dan Telekomunikasi	5,96%	0,92
F. Konstruksi	4,58%	-0,25
I. Akomodasi dan Makan Minum	4,3%	1,21
B. Pertambangan & Penggalian	1,85%	-1,56
S, T, U, V. Aktivitas Jasa Lainnya	1,67%	-1,84
R. Kesehatan & Kegiatan Sosial	1,61%	0,52
L. Keuangan; M. Real Estat; N, O. Profesional & Administratif	1,28%	1,59
D. Listrik & Gas, E. Air & Limbah	0,46%	0,16

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Kenaikan tingkat kemiskinan tersebut utamanya didorong oleh tergerusnya daya beli masyarakat akibat peningkatan Garis Kemiskinan (GK) sebesar 4,61% (dibandingkan September 2025). Peningkatan GK dipengaruhi oleh kenaikan harga pada kelompok pengeluaran Makanan, Minuman, dan Tembakau yang mengalami inflasi sebesar 4,22% (yoy) pada Maret 2026 (di tengah inflasi umum Maluku Utara sebesar 2,56% (yoy)). Hal ini sejalan dengan komponen GK Makanan yang menjadi penyumbang terbesar GK pada Maret 2026.

Kemudian, terkait dengan kesejahteraan petani, terjadi penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan II 2026 Maluku Utara yaitu sebesar 101,71 terkoreksi dari triwulan I 2026 yang berada pada angka 102,57, maupun periode yang sama di tahun sebelumnya yang berada pada angka 107,32. Penurunan NTP ini mencerminkan semakin sempitnya ruang pendapatan riil bagi masyarakat di perdesaan yang mayoritas bergantung pada sektor Pertanian, akibat kenaikan indeks harga yang dibayar petani melampaui indeks harga yang diterima dari hasil panen.

5.2.1 Kemiskinan dan Kesenjangan

Jumlah penduduk miskin di Maluku Utara pada Maret 2026 adalah sebesar 77,85 ribu orang, naik 3,04 ribu orang terhadap September 2025 dan naik 0,58 ribu orang terhadap Maret 2025 (Grafik 5.2). Dengan kenaikan tersebut, persentase penduduk miskin Maluku Utara pada Maret 2026 tercatat sebesar 5,79% meningkat 0,2 persen poin terhadap September 2025 tetapi turun 0,02 persen poin terhadap Maret 2025.

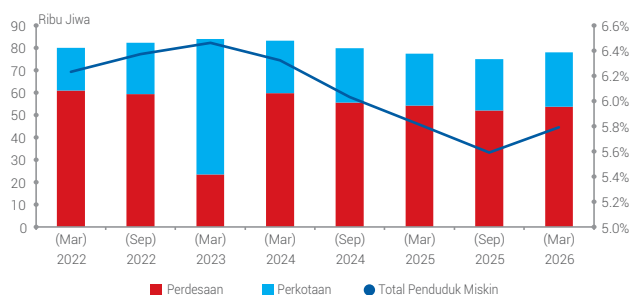
Perkembangan tingkat kemiskinan Maluku Utara berfluktuasi pada periode Maret 2022 hingga Maret 2026. Pada Maret 2023, jumlah dan persentase penduduk miskin mencatatkan puncak tertinggi (peak) sebesar 6,46% (83,80 ribu jiwa). Peningkatan kemiskinan pada periode

ini utamanya didorong oleh lonjakan tajam populasi miskin di wilayah perkotaan pasca-penyesuaian harga BBM pada akhir 2022 serta tingginya inflasi komoditas pangan utama. Selanjutnya, sepanjang periode Maret 2024 hingga September 2025, angka kemiskinan di Maluku Utara menunjukkan tren penurunan secara konsisten hingga menyentuh titik terendahnya pada September 2025 sebesar 5,59% (74,81 ribu jiwa). Tren perbaikan kesejahteraan ini didorong oleh akselerasi pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang tumbuh tinggi berbasis industri pengolahan nikel dan pertambangan, yang secara bertahap memberikan dampak pengganda (multiplier effect) terhadap sektor jasa dan penyerapan tenaga kerja.

Namun demikian, pada pencatatan Maret 2026, tingkat kemiskinan tercatat mengalami peningkatan tipis menjadi 5,79% (77,85 ribu jiwa), atau naik sebesar 0,20 persen poin dibandingkan September 2025. Peningkatan terbatas ini dipicu oleh kenaikan Garis Kemiskinan (GK) sebesar 4,61%, tergerusnya daya beli masyarakat perdesaan (tercermin dari koreksi Nilai Tukar Petani (NTP)), serta tingginya porsi pekerja paruh waktu di sektor informal menyebabkan pendapatan riil masyarakat rentan tidak mampu mengimbangi kenaikan harga kebutuhan dasar.

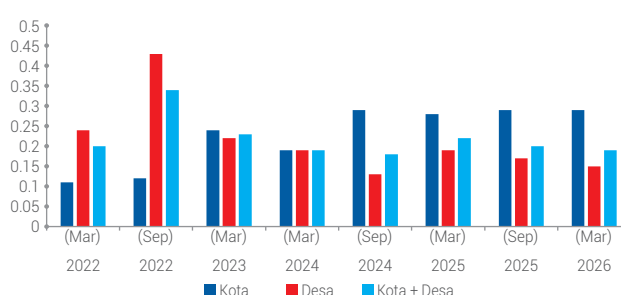
Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2026 mengalami kenaikan, sedangkan indeks keparahan kemiskinan mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2026 adalah sebesar 0,828, naik dibandingkan September 2025 yang berada pada angka 0,754 (Grafik 5.3). Indeks Keparahannya Kemiskinan pada Maret 2026, mengalami penurunan sebesar 0,195 terhadap September 2025 sebesar 0,208 (Grafik 5.4). Perbaikan tingkat keparahan kemiskinan terindikasi disebabkan oleh penyerapan tenaga kerja yang dilakukan secara masif dan cukup konsisten oleh sektor lapangan usaha utama. Meskipun demikian nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya Kemiskinan Maluku Utara di daerah perkotaan memiliki angka yang tinggi dibandingkan

Grafik 5.2 Jumlah Penduduk Miskin di Maluku Utara



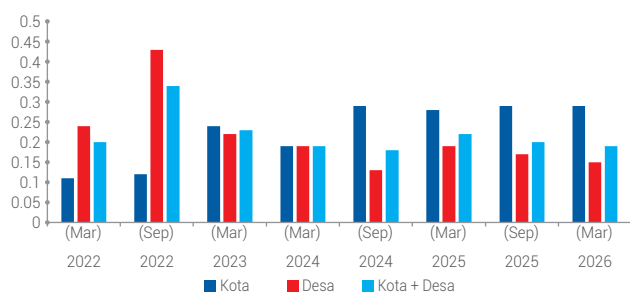
Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Grafik 5.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan



Sumber: BPS, diolah

Grafik 5.4 Indeks Keparahkan Kemiskinan



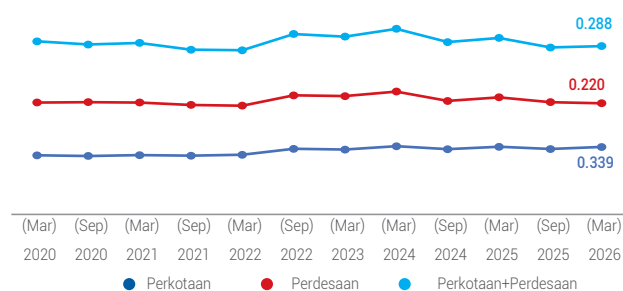
Sumber : BPS, diolah

dengan daerah pedesaan. Hal ini didorong oleh tingginya ketergantungan masyarakat miskin perkotaan terhadap pasar (*market-dependent*) di tengah tingginya biaya hidup dasar, serta belum meratanya distribusi pendapatan di wilayah perkotaan.

Pada Maret 2026, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan daerah perkotaan dan pedesaan masing - masing bernilai 1,105 dan 0,709 sedangkan nilai Indeks Keparahkan Kemiskinan daerah perkotaan dan pedesaan pada Maret 2026 masing-masing bernilai 0,294 dan 0,152. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kondisi rata-rata pengeluaran dan ketimpangan pengeluaran di daerah pedesaan lebih kecil dibandingkan daerah perkotaan. Dengan kata lain, penduduk di daerah pedesaan mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya lebih baik melalui produksi sendiri dan biaya hidup yang lebih rendah. Menyikapi dinamika tersebut, koordinasi kebijakan bersama Pemerintah Daerah perlu difokuskan pada pengendalian inflasi bahan pangan dasar (IHK) di wilayah perkotaan yang berkeberlanjutan serta pemerataan distribusi pendapatan.

Terkait dengan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, Gini Ratio Maluku Utara pada Maret 2026

Grafik 5.5. Perkembangan Gini Ratio Maluku Utara



Sumber : BPS, diolah

mencatatkan angka sebesar 0,288, meningkat 0,013 poin dibandingkan September 2025 [0,275]. Peningkatan ketimpangan ini utamanya didorong oleh dinamika di wilayah perkotaan, di mana Gini Ratio tercatat sebesar 0,339, meningkat dari 0,329 pada September 2025, seiring dengan belum meratanya distribusi pendapatan antara pekerja sektor formal/industri pengolahan dengan pekerja sektor informal. Sebaliknya, wilayah pedesaan terus mencatatkan perbaikan pemerataan pengeluaran dengan Gini Ratio yang melandai ke angka 0,220 dari 0,236 pada September 2025 dan 0,249 pada Maret 2025 (Grafik 5.5).

Berdasarkan standar pengukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40% terbawah di Maluku Utara berada pada level 23,23%, yang mengategorikan daerah ini berada dalam tingkat ketimpangan rendah (proporsi pengeluaran > 17%). Namun demikian, disparitas spasial cukup terlihat ketika membandingkan wilayah perkotaan [20,48%] dan pedesaan [26,30%]. Angka pengeluaran kelompok bawah di perkotaan yang lebih rendah mencerminkan kerentanan yang lebih tinggi akibat tingginya tekanan biaya hidup (IHK) dan harga bahan pokok. Implikasinya,

Tabel 5.3 IPM Provinsi Maluku Menurut Komponen Penyusunnya

Komponen	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
Umur Panjang dan Hidup Sehat						
Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	70,17	70,47	70,76	71,05	71,47
Pengetahuan						
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,68	13,73	13,74	13,75	13,76
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,09	9,24	9,26	9,37	9,50
Standar Hidup Layak						
Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (PPP)	Tahun	8,140	8,398	8,834	9,32	9,613

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

rekomendasi bauran kebijakan Bank Indonesia bersama Pemerintah Daerah perlu terus diarahkan pada penguatan program perlindungan sosial produktif di kota serta menjaga keterjangkauan harga pangan dasar agar kenaikan ketimpangan perkotaan tidak makin melebar dan menekan daya beli masyarakat kelas bawah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku Utara sepanjang periode 2021 hingga 2025 menunjukkan tren perbaikan yang konsisten pada seluruh indikator penyusunnya. Dari dimensi kesehatan, Umur Harapan Hidup (UHH) terus meningkat dari 70,17 tahun pada 2021 menjadi 71,47 tahun pada 2025, yang mencerminkan membaiknya taraf kesehatan dan akses layanan medis masyarakat. Pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah (HLS) merambat naik dari 13,68 tahun menjadi 13,76 tahun, diiringi peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dari 9,09 tahun (setara lulus SMP) menjadi 9,50 tahun pada 2025. Sementara itu, dimensi standar hidup layak mencatatkan akselerasi yang paling signifikan, di mana Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan tumbuh dari Rp8.140 ribu pada 2021 menjadi Rp9.613 ribu pada 2025. Kenaikan konsisten pada komponen PPP ini sejalan dengan *multiplier effect* pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang didorong oleh hilirisasi industri pengolahan khususnya yang berkaitan dengan sektor inklusif pertanian, perkebunan, dan perikanan, dsb, yang secara bertahap meningkatkan pendapatan riil serta kapasitas konsumsi masyarakat.

5.2.2 Kesejahteraan Petani

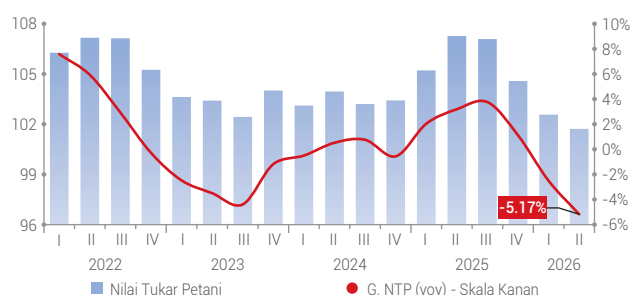
Nilai Tukar Petani (NTP) di Maluku Utara pada triwulan II 2026 mencatatkan penurunan yang cukup signifikan yaitu kontraksi sebesar 5,17% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Hal ini terkonfirmasi melalui NTP Maluku Utara pada triwulan II 2026 yang tercatat sebesar 101,71 (Grafik 5.6). Angka NTP yang masih berada di atas

ambang batas 100, namun marginnya menyempit, mengindikasikan bahwa tingkat kemampuan dan daya beli petani di Maluku Utara secara umum masih berada pada level yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tukar dari produk yang dihasilkan petani masih relatif mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka, baik untuk konsumsi harian maupun untuk menutup biaya produksi pertanian.

Dari sudut pandang kapasitas usaha dan efisiensi produksi di sektor pertanian, daya saing usaha petani yang diukur melalui Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) Maluku Utara pada Triwulan II 2026 tercatat sebesar 103,78, atau terkoreksi sebesar 2,68% (qto) dan 8,29% (yoy). Penurunan efisiensi usaha ini utamanya dipicu oleh tekanan tajam pada subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat yang berkontraksi 3,82% (qto) / 10,54% (yoy) menjadi 101,55, diiringi oleh subsektor Tanaman Pangan (-2,92% qto / -0,96% yoy) ke level 114,00 akibat kenaikan harga barang modal dan biaya produksi yang lebih tinggi dibandingkan harga jual komoditas. Meski demikian, penurunan NTUP tertahan oleh kinerja positif subsektor Perikanan (111,73), Peternakan (106,62), dan Hortikultura (116,80) yang didukung oleh peningkatan harga di level konsumen yang tercermin dari peningkatan tekanan inflasi pada triwulan II 2026. Dinamika ini mengindikasikan terbatasnya margin usaha tani yang berpotensi menahan laju pendapatan riil pekerja perdesaan (Grafik 5.7).

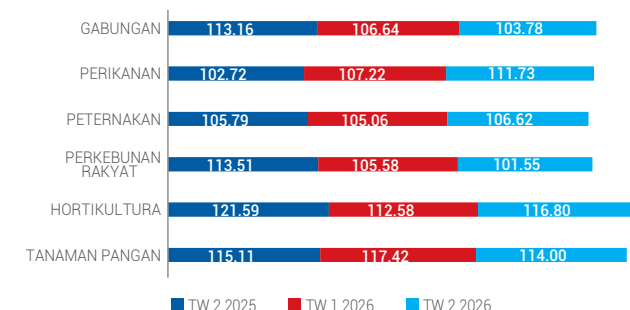
Pada triwulan II 2026 rata-rata indeks yang diterima petani di Maluku Utara sebesar 133,86, naik dibanding dengan triwulan I 2026 yang berada pada angka 132,54. Di sisi lain, rata-rata indeks yang dibayar petani di Maluku Utara pada triwulan II 2026 adalah sebesar 131,97, meningkat dibandingkan triwulan I 2026 yaitu 129,20. Peningkatan Indeks yang Diterima Petani sebesar 1,00% (qto) yang dilampaui oleh laju peningkatan Indeks yang Dibayar Petani sebesar 2,14% (qto) mengindikasikan

Grafik 5.6 Perkembangan NTP Maluku Utara

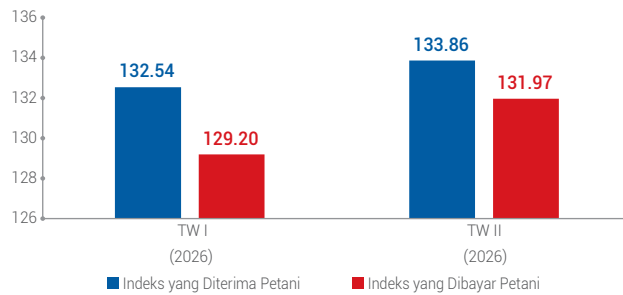


Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Grafik 5.7 Perkembangan Rata-Rata NTUP Maluku Utara



Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Grafik 5.8 Indeks yang Diterima & Dibayar Petani

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

adanya tekanan inflasi di perdesaan dan peningkatan biaya produksi yang lebih tinggi daripada laju kenaikan harga jual komoditas. Kondisi ini menjelaskan mengapa

meskipun pendapatan nominal petani meningkat, margin keuntungan riil dan daya beli petani di Maluku Utara pada triwulan II mengalami penurunan (Grafik 5.8).

Menyikapi dinamika tersebut, koordinasi kebijakan antara Bank Indonesia melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Pemerintah Daerah perlu makin diperkuat guna menjaga stabilitas daya beli serta efisiensi usaha tani di wilayah perdesaan. Mendorong efisiensi rantai pasok sarana produksi pertanian serta fasilitasi kemitraan antara kelompok tani lokal dengan pelaku industri pengolahan menjadi langkah yang krusial. Upaya penyerapan hasil pertanian lokal oleh sektor industri skala besar diharapkan dapat menaikkan margin usaha tani (NTUP), serta memperkuat jaring pengaman pendapatan riil bagi tenaga kerja di sektor pertanian perdesaan secara berkelanjutan.



06

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2026 Diprakirakan Mengalami Deselerasi dan Inflasi Tetap Terjaga

Perekonomian Provinsi Maluku Utara pada tahun 2026 diprakirakan tumbuh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Perlambatan pertumbuhan ekonomi terutama dipengaruhi oleh penurunan kuota RKAB mineral dan batubara tahun 2026, dengan alokasi yang disetujui lebih rendah dibandingkan tahun 2025. Kondisi tersebut berpotensi membatasi ketersediaan bijih nikel sebagai bahan baku utama bagi industri pengolahan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga diperkirakan tertahan oleh menurunnya alokasi belanja pemerintah pada tahun 2026 dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga dukungan stimulus fiskal terhadap perekonomian menjadi lebih terbatas.

Inflasi Maluku Utara tahun 2026 diproyeksikan tetap dalam sasaran $2,5\% \pm 1\%$ (yoy), meski menghadapi risiko dari gangguan cuaca, lonjakan permintaan HBKN, penyesuaian tarif energi, serta moderasi harga emas global. Tekanan tersebut diperkirakan dapat diredam oleh peningkatan produktivitas tangkapan ikan dan hasil tani hortikultura seiring dengan fenomena El-Nino Kuat, tidak adanya kenaikan cukai rokok, serta penguatan sinergi pengendalian inflasi melalui strategi 4K oleh TPID se-Provinsi Maluku Utara.

**Proyeksi Ekonomi
Tahun 2026
Mengalami Deselerasi**

**Proyeksi Inflasi
Tahun 2026 Berada
dalam Sasaran Inflasi**

6.1 Prospek Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Provinsi Maluku Utara pada tahun 2026 diproyeksikan tumbuh positif melambat dibandingkan tahun 2025. Perlambatan tersebut terutama bersumber dari pertumbuhan paruh pertama tahun 2026, seiring terbatasnya pasokan bijih nikel akibat penurunan kuota RKAB nikel yang disetujui di tahun 2026. Hal ini sejalan dengan penyesuaian kuota RKAB Minerba 2026 yang turut memengaruhi aktivitas produksi di Kawasan Industri (KI) Weda Bay dengan kuota yang disetujui relatif lebih rendah dibandingkan kebutuhan produksi dan telah terealisasi hingga April 2026.

Di sisi lain, beroperasinya sejumlah lini produksi baru di KI Weda Bay dan Pulau Obi turut mendorong peningkatan kebutuhan bahan baku bijih nikel. Persetujuan tambahan kuota RKAB Minerba pada Agustus 2026 bagi pelaku usaha di KI Weda Bay diperkirakan melonggarkan kembali pasokan bijih nikel domestik dan mendukung peningkatan utilisasi fasilitas pengolahan.

Namun demikian, laju pemulihan produksi diperkirakan masih terbatas. Tambahan kuota yang disetujui lebih rendah dibandingkan usulan pelaku usaha dan baru memperoleh kepastian pada Agustus 2026, sehingga periode pemanfaatannya menjadi lebih pendek. Selain itu, kecepatan penyerapan kuota di lapangan, termasuk kesiapan operasional penambangan serta rantai logistik bijih nikel menuju fasilitas pengolahan, masih menjadi faktor risiko yang dapat menahan realisasi pemulihan produksi hingga akhir tahun 2026.

Sementara itu, aktivitas pertambangan dan industri pengolahan nikel di KI Pulau Obi diperkirakan tetap berjalan relatif stabil. Alokasi kuota RKAB yang masih memadai memungkinkan pasokan bijih nikel bagi kebutuhan pengolahan tetap terjaga tanpa bergantung pada pemenuhan melalui impor. Kondisi tersebut menjadikan Pulau Obi tetap sebagai salah satu penopang kinerja industri pengolahan nikel di Maluku Utara sepanjang tahun 2026.

Gangguan distribusi sulfur global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah menyebabkan ketersediaan bahan baku sulfur masih terbatas, khususnya untuk KI Weda Bay. Kondisi tersebut memengaruhi kelancaran proses hidrometalurgi, sehingga produksi fasilitas berbasis *High Pressure Acid Leaching* (HPAL) diperkirakan masih belum dapat berlangsung secara optimal.

Di sisi lain, ruang fiskal pemerintah daerah yang lebih terbatas akibat penurunan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2026 diperkirakan masih menahan

kapasitas belanja pemerintah daerah hingga akhir tahun. Keterbatasan tersebut turut merambat pada daya beli masyarakat melalui penyesuaian tunjangan penghasilan pegawai, di tengah tertahannya penyerapan tenaga kerja pada sektor pertambangan sepanjang paruh pertama tahun. **Dengan demikian, pada tahun 2026 perekonomian Maluku Utara diproyeksikan akan tumbuh positif melambat dibandingkan tahun 2025.**

6.1.1 Sisi Pengeluaran

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi tahun 2026 diperkirakan tetap tumbuh positif, meskipun melambat dibandingkan tahun 2025 terutama akibat perlambatan kinerja ekspor dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Pada paruh kedua 2026, pertumbuhan ekonomi diperkirakan melambat seiring tertahannya kinerja ekspor dan PMTB. PMTB masih terbatas sejalan dengan sikap *wait and see* pelaku usaha terhadap evaluasi kuota RKAB yang baru diumumkan pada Agustus 2026.

Kinerja ekspor barang dan jasa diperkirakan tumbuh melambat pada tahun 2026 dibandingkan tahun 2025. Perlambatan tersebut sejalan dengan pemangkasan kuota RKAB Nikel yang menyebabkan keterbatasan pasokan bijih nikel domestik. Tekanan terdalam terjadi di KI Weda Bay, dengan kuota RKAB yang disetujui pada awal tahun 2026 sebesar 12 juta WMT, jauh lebih rendah dibandingkan kuota tahun 2025 yang mencapai sekitar 42 juta WMT. Tambahan kuota sebesar 25 juta WMT yang disetujui pada pertengahan Agustus 2026 diperkirakan melonggarkan kembali pasokan bijih nikel domestik, namun total alokasi kuota tahun 2026 tetap lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sehingga ruang pemulihan produksi hingga akhir tahun masih terbatas.

Perlambatan ekspor yang lebih dalam diperkirakan tertahan oleh bertambahnya kapasitas produksi di KI Weda Bay, antara lain melalui fasilitas pengolahan yang telah menyelesaikan tahap *commissioning* serta beroperasinya smelter aluminium. Diversifikasi produk ekspor melalui realisasi komoditas baru berupa aluminium ingot, *Luppen FeNi*, dan *Nickel Cobalt Manganese Hydroxide* (NCMH) diperkirakan memperluas basis ekspor daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap produk olahan nikel konvensional. Meskipun demikian, keterbatasan pasokan sulfur diperkirakan masih menahan produksi *Mixed Hydroxide Precipitate* (MHP).

Kinerja LU Industri Pengolahan turut ditopang oleh rencana operasional fasilitas produksi baterai di KI Weda Bay pada paruh kedua tahun 2026, seiring telah

diterbitkannya izin usaha industri oleh Pemerintah dengan kapasitas terpasang dengan kapasitas 9 GWh. Fasilitas tersebut mencakup produksi *module* dan *pack* masing-masing sebesar 80.520 unit per tahun, serta anode dan cathode baterai kendaraan listrik masing-masing sebesar 41.256 unit per tahun. Beroperasinya fasilitas ini menandai berlanjutnya hilirisasi nikel di Maluku Utara menuju komponen baterai kendaraan listrik, sehingga diperkirakan memperdalam struktur produksi industri pengolahan sekaligus memperluas basis produk ekspor daerah ke depan.

Impor barang dan jasa diperkirakan melambat, terutama pada kelompok bahan baku kimia sejalan dengan menurunnya kebutuhan pasokan bahan baku dari luar negeri sejalan dengan perlambatan aktivitas industri pengolahan nikel. Secara tahunan, Investasi diperkirakan tetap tumbuh positif sejalan dengan berlanjutnya realisasi penanaman modal dalam negeri dan asing yang masih terkonsentrasi pada industri logam dasar dan pertambangan di Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan.

Konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadi salah satu komponen penopang pertumbuhan pada paruh kedua tahun 2026. Adapun, tertahannya penyerapan tenaga kerja pada sektor pertambangan sepanjang paruh pertama tahun serta penyesuaian tunjangan penghasilan pegawai daerah menahan pendapatan Masyarakat.

Meskipun demikian, pemulihan aktivitas di kawasan industri pasca penambahan kuota RKAB di tengah tahun diperkirakan mendorong penyerapan tenaga kerja pada paruh kedua tahun 2026. Dari sisi konsumsi pemerintah, pertumbuhan diperkirakan berkontraksi pada tahun 2026. Penurunan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) membatasi ruang fiskal pemerintah daerah dalam merealisasikan belanja, khususnya belanja barang dan jasa serta belanja modal. Selain itu, upaya efisiensi belanja pegawai melalui penyesuaian TPP sebesar 10% bagi ASN staf dan PPPK Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada Juli–Desember 2026, serta penyesuaian tunjangan PPPK Kota Tidore Kepulauan sebesar 30%, diperkirakan turut menahan kinerja konsumsi pemerintah.

6.1.2 Sisi Lapangan Usaha

Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tahun 2026 diperkirakan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tertahan oleh perlambatan LU Pertambangan dan Penggalian serta LU Industri Pengolahan seiring pemangkasan kuota RKAB

Minerba yang membatasi ketersediaan bahan baku bijih nikel domestik.

Dari sisi lapangan usaha, perlambatan pertumbuhan ekonomi terutama bersumber dari LU Pertambangan dan Penggalian yang diperkirakan mengalami kontraksi pada tahun 2026. Kontraksi LU Pertambangan dan Penggalian sejalan dengan lebih rendahnya kuota RKAB yang diterima pada 2026 untuk KI Weda Bay, KI Pulau Obi, dan KI Buli dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga ruang peningkatan volume produksi bijih nikel menjadi terbatas dan menahan aktivitas pertambangan sepanjang tahun.

Terbatasnya pasokan dari sisi hulu tersebut berdampak langsung pada kegiatan produksi di sisi hilir, terutama di KI Weda Bay yang kebutuhan bijih nikelnya diperkirakan tidak sepenuhnya terpenuhi. Upaya pemenuhan kebutuhan bahan baku melalui peningkatan impor bijih nikel dari Filipina belum mampu menutup selisih pasokan akibat pemangkasan kuota domestik, sehingga utilisasi kapasitas produksi smelter diperkirakan tertahan sepanjang 2026.

Tekanan terhadap LU Industri Pengolahan turut bersumber dari penurunan produksi *mixed hydroxide precipitate* (MHP) seiring terbatasnya pasokan sulfur sebagai bahan baku utama proses pengolahan. Keterbatasan tersebut sejalan dengan gangguan rantai pasok dari kawasan Timur Tengah yang menahan ketersediaan sulfur bagi industri pengolahan nikel di dalam provinsi. Dengan demikian, perlambatan LU Industri Pengolahan pada 2026 tidak semata-mata mencerminkan normalisasi laju pertumbuhan dari basis tahun sebelumnya yang tinggi, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan bahan baku yang bersifat struktural, baik dari sisi bijih nikel maupun bahan penolong.

Perlambatan LU Industri Pengolahan lebih dalam tertahan oleh komoditas ekspor baru berupa aluminium ingot di KI Weda Bay. komoditas aluminium di KI Weda Bay yang menjadi komoditas ekspor baru Maluku Utara. Smelter aluminium berkapasitas 250 ribu ton per tahun diperkirakan telah beroperasi penuh dengan tingkat utilisasi yang tinggi, sehingga memperluas basis produksi industri pengolahan di luar rantai nilai nikel. Beroperasinya fasilitas tersebut secara penuh menjadi penopang utama kinerja LU Industri \

Perlambatan LU Industri Pengolahan lebih dalam tertahan oleh berlanjutnya pengembangan industri hilirisasi berbasis logam dan baterai. Fasilitas produksi Blue Sparking dan smelter aluminium diperkirakan telah beroperasi penuh dengan tingkat utilisasi yang tinggi,

sementara sejumlah proyek baru memasuki tahap operasional secara bertahap sepanjang 2026, yaitu fasilitas produksi Guang Tsing dan pabrik baterai REPT Battero, industri alat berat listrik, serta proyek Guang Ching yang memproduksi MHP. Beroperasinya rangkaian proyek tersebut diperkirakan memperluas basis produksi industri pengolahan di Maluku Utara sehingga menahan perlambatan LU Industri Pengolahan lebih dalam pada 2026.

6.2 Outlook Inflasi Daerah

Prospek inflasi Provinsi Maluku Utara pada tahun 2026 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun 2025, namun diperkirakan akan tetap terjaga di dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar $2,5\% \pm 1\%$ (yoy). Perkembangan inflasi sepanjang tahun 2026 menunjukkan dinamika yang cukup tinggi, terutama dipengaruhi oleh volatilitas harga pangan dan energi. Setelah meningkat pada akhir Triwulan II 2026, tekanan inflasi mulai mengalami moderasi pada awal Triwulan III sejalan dengan membaiknya pasokan sejumlah komoditas pangan. Meskipun demikian, risiko tekanan harga hingga akhir tahun tetap perlu dicermati, terutama yang bersumber dari gangguan pasokan pangan akibat faktor cuaca, perkembangan harga energi dan transportasi, serta ketidakpastian geopolitik global.

Dari sisi permintaan, tekanan inflasi berupa tarikan permintaan (*demand-pull inflation*) diperkirakan **relatif terjaga, meskipun tetap menunjukkan dinamika yang bervariasi sepanjang tahun.** Di satu sisi, konsumsi masyarakat masih didukung oleh kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Maluku Utara tahun 2026 sebesar 4,2%, implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta peningkatan aktivitas belanja masyarakat pada momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan berbagai agenda berskala nasional maupun daerah. Peningkatan aktivitas tersebut berpotensi mendorong permintaan, terutama terhadap komoditas pangan, transportasi, akomodasi, serta penyediaan makanan dan minuman. Sebaliknya, tekanan permintaan diperkirakan tertahan oleh moderasi aktivitas ekonomi dan ruang fiskal daerah yang lebih terbatas. Penurunan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), penyesuaian Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN, serta tertahannya penyerapan tenaga kerja pada sektor pertambangan pada paruh pertama tahun berpotensi membatasi peningkatan daya beli masyarakat. Dengan demikian, tekanan inflasi dari sisi permintaan diperkirakan tidak berlangsung secara merata, tetapi lebih terkonsentrasi pada periode peningkatan mobilitas dan konsumsi masyarakat. Kondisi

daya beli yang relatif tertahan juga menjadi salah satu faktor penahan tekanan inflasi hingga akhir tahun.

Dari sisi penawaran domestik, Karakteristik wilayah kepulauan menyebabkan pasokan sejumlah komoditas strategis masih bergantung pada produksi lokal sekaligus kelancaran distribusi dari daerah pemasok. Gangguan cuaca berpotensi menekan produktivitas pertanian di daerah sentra, menghambat distribusi antarpulau, serta mengurangi hari efektif melaut nelayan. Risiko tersebut perlu terus dicermati mengingat perkembangan pada Juni 2026 menunjukkan tingginya sensitivitas harga ikan segar dan hortikultura terhadap gangguan produksi dan pasokan. Berdasarkan prakiraan BMKG, terdapat potensi risiko dari fenomena anomali cuaca berupa aktivitas *Madden-Julian Oscillation* (MJO) serta siklon tropis yang dapat memicu curah hujan di atas normal ataupun gelombang tinggi. Kondisi tersebut patut dikonsiderasi karena berisiko mengganggu kelancaran distribusi logistik antar-pulau dari daerah sentra pemasok seperti Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara, serta menekan produktivitas nelayan lokal. Namun demikian, prospek iklim ke depan juga bersifat dinamis dengan adanya potensi peralihan menuju fase El Nino Kuat yang disertai fenomena *Upwelling*. Apabila kondisi ini terjadi, hal tersebut justru dapat memberikan dampak positif bagi sektor perikanan melalui peningkatan nutrisi perairan yang mendorong melimpahnya tangkapan ikan, sekaligus mendukung produktivitas pertanian hortikultura yang membutuhkan intensitas cahaya matahari optimal.

Selain faktor cuaca, tekanan inflasi dari sisi penawaran juga bersumber dari Kelompok Transportasi dan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga. Tekanan pada kelompok ini terutama didorong oleh dampak pemindahan *supply point* LPG NPSO ke Ambon yang memicu lonjakan harga LPG dan berpotensi bertahan hingga akhir tahun 2026. Tingginya harga LPG tersebut berisiko memicu peralihan (*shifting*) konsumsi masyarakat kembali ke minyak tanah, padahal rantai pasoknya kerap terkendala oleh ketidakseimbangan kuota. Di sektor energi, ketidakpastian geopolitik global juga berpotensi menaikkan harga energi global, yang berisiko melonjakkan biaya logistik laut dan udara di wilayah kepulauan Maluku Utara. Ke depannya, apabila tren harga energi global kembali meningkat, tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyesuaian harga BBM oleh pemerintah, termasuk pada komoditas minyak tanah, yang dapat memberikan tekanan inflasi lebih lanjut.

Dari sisi eksternal/global, ancaman *imported inflation* pada Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

berpusat pada volatilitas komoditas emas perhiasan. Meskipun harga emas global saat ini berada dalam fase koreksi pasca menyentuh titik tertingginya (*All-Time High*), komoditas ini tetap menjadi risiko laten pendorong inflasi daerah. Persistensi harga dasar emas yang relatif tinggi terus ditopang oleh ketidakpastian geopolitik Timur Tengah, kebijakan proteksionis Amerika Serikat, serta manuver agresif bank sentral global dalam mendiversifikasi cadangan devisanya ke aset *safe haven*. Rentetan dinamika global ini berisiko menciptakan kekakuan harga di tingkat domestik yang menahan laju penurunan harga emas perhiasan, sehingga tekanan inflasi pada kelompok ini diperkirakan tetap persisten di sepanjang tahun 2026.

Adapun potensi tekanan inflasi yang lebih tinggi di sepanjang tahun 2026 tersebut diperkirakan dapat tertahan oleh sejumlah kebijakan akomodatif dari Pemerintah. Salah satu bentuk kebijakan tersebut adalah komitmen Pemerintah untuk menjaga stabilitas harga energi domestik dengan tidak menaikkan harga BBM Subsidi (Pertalite) maupun BBM Non-Subsidi (Pertamax). Di kesempatan ke depan, Pemerintah juga berpotensi untuk menurunkan harga BBM tersebut apabila tren harga komoditas energi dunia mulai menunjukkan penurunan.

Selain stabilisasi harga energi, Pemerintah juga diperkirakan akan kembali memberlakukan insentif seperti diskon tarif transportasi. Langkah ini sebelumnya terbukti sangat efektif menahan laju inflasi daerah melalui pemberian subsidi angkutan laut oleh Pemprov Maluku Utara dan Pemerintah Pusat, serta pemberian insentif pembebasan PPN, diskon jasa kebandarudaraan, dan potongan harga avtur untuk angkutan udara. Kebijakan akomodatif lainnya guna mendukung perekonomian dan daya beli masyarakat adalah keputusan Pemerintah Pusat untuk tidak menaikkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada tahun 2026. Langkah ini diharapkan sangat krusial dalam meredam persistensi tekanan harga dari komoditas rokok yang secara historis selalu menjadi kontributor tetap inflasi di Maluku Utara.

Mempertimbangkan tingginya dinamika geopolitik global dan tekanan pada nilai tukar, Bank Indonesia terus berkomitmen untuk memperkuat efektivitas kebijakan moneter guna mendukung pengendalian inflasi makroekonomi. Pada 18-19 Agustus 2026, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate pada level 5,75%. Keputusan yang berfokus pada stabilitas (*pro-stability*) ini merupakan langkah antisipatif (*pre-emptive*) untuk memastikan prakiraan inflasi 2026 dan 2027

tetap terkendali dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$, serta untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah ketidakpastian global. Selain melalui instrumen suku bunga, Bank Indonesia juga menempuh 7 (tujuh) langkah konkret untuk menstabilkan nilai tukar Rupiah meliputi: (1) peningkatan intervensi di pasar *Non-Deliverable Forward* (NDF) luar negeri, pasar *spot*, dan *Domestic NDF* (DNDF); (2) optimalisasi pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder; (3) penguatan struktur suku bunga instrumen *pro-market* (seperti SRBI, SVBI, dan SUVBI) guna menarik aliran masuk modal asing; (4) pemberlakuan batas (*threshold*) pembelian valas tunai tanpa *underlying* menjadi maksimal USD25.000 per bulan per pelaku; (5) peningkatan *threshold* jual DNDF/Forward dan *swap*; (6) perluasan operasi moneter valas *Chinese Renminbi* (CNH); serta (7) perluasan penggunaan mata uang lokal melalui *Local Currency Transaction* (LCT) dengan negara mitra. Seluruh langkah ini diarahkan untuk menjangkar ekspektasi inflasi, mencegah lonjakan *imported inflation*, dan pada gilirannya turut mendukung ketahanan ekonomi di tingkat daerah.

Sementara itu, sejalan dengan komitmen stabilisasi di tingkat pusat, upaya pengendalian inflasi di Maluku Utara juga diperkuat secara terstruktur melalui perumusan **Program Unggulan “Maluku Utara Bangkit Jaga Inflasi”**. Program strategis ini mengarahkan transformasi kebijakan dari ketergantungan pasokan luar menjadi kemandirian pangan lokal, yang diimplementasikan secara komprehensif melalui kerangka 4K:

1. **Pada aspek Keterjangkauan Harga (K1)**, intervensi hilir dilakukan melalui perluasan jangkauan pasar murah (GPM) dan memastikan stabilitas harga secara langsung kepada masyarakat melalui optimalisasi operasional Kios Sigap Pangan
2. **Pada aspek Ketersediaan Pasokan (K2)**, penguatan hulu didorong masif melalui pembukaan 10.000 hektare sawah baru, target swasembada telur pada 2026, dan perluasan kapasitas *cold storage*. Dukungan pasokan lokal juga diwujudkan melalui inisiatif penanaman RINDANG BERSERI (Tanam Rica & Kangkung di pekarangan), penerapan *digital farming & fishery* bagi petani dan nelayan, serta memfasilitasi kelancaran pembiayaan hulu melalui penyaluran KUR Nelayan
3. **Pada aspek Kelancaran Distribusi (K3)**, intervensi logistik dilakukan dengan mengalokasikan subsidi ongkos angkut komoditas, terbentuknya peran BUMD sebagai pihak *off-taker* (penyerap hasil produksi

petani], serta mengoptimalkan distribusi dan kerja sama antar-daerah untuk meredam volatilitas harga

4. **Pada aspek Komunikasi Efektif (K4)**, sinergi komunikasi dan integrasi data yang solid dilakukan dengan memanfaatkan instrumen Neraca Pangan dan Kalender Tanam guna memastikan pengambilan kebijakan penstabilan yang akurat dan terukur, serta mengelola ekspektasi inflasi masyarakat agar tetap efektif dan terjaga.

Daftar Istilah

Indeks Ekspektasi Konsumen

Salah satu pembentuk IKK, indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi 6 bulan mendatang dengan skala 1 – 100.

Indeks Kondisi Ekonomi

Salah satu pembentuk IKK, indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dengan skala 1 – 100.

Indeks Keyakinan Konsumen (*Consumer Confidence*)

Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang dengan skala 1 – 100.

Inflasi IHK

Kenaikan harga barang dan jasa dalam satu periode yang diukur dengan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK), yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat luas.

Inflasi Inti

Inflasi IHK setelah mengeluarkan komponen *volatile foods* dan *administered prices*.

Inflow

Uang yang diedarkan aliran masuk uang kartal ke Bank Indonesia.

Investasi

Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi.

Kredit

Penyediaan uang atau tagihan yang sejenis, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:

- Pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan *Note Purchase Agreement* (NPA)
- Pengambilan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang.

Loan to Deposit Ratio (LDR) atau *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. Terminologi FDR untuk bank syariah, sedangkan LDR untuk bank konvensional.

Loan to Funding Ratio (LFR)

Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga dan surat berharga yang diterbitkan bank.

Liaison

Kegiatan pengumpulan data/statistik dan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku ekonomi mengenai perkembangan dan arah kegiatan ekonomi dengan cara yang sistematis dan didokumentasikan dalam bentuk laporan.

mtm

Month to month. Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.

Net Inflow

Uang yang diedarkan *inflow* lebih besar dari *outflow*.

Non Performing Financing (NPF) atau *Non Performing Loan (NPL)*

Rasio pembiayaan atau kredit macet terhadap total penyaluran pembiayaan atau kredit oleh bank, baik dalam rupiah dan valas, Terminologi NPF dan pembiayaan untuk bank syariah, sedangkan NPL dan kredit untuk bank konvensional. Kriteria NPF atau NPL adalah (1) kurang lancar, (2) diragukan dan (3) macet.

Omset

Nilai penjualan bruto yang diperoleh dari satu kali proses produksi.

Outflow

Aliran keluar uang kartal dari Bank Indonesia.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, redistribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

qta

Quarter to quarter. Perbandingan antara data satu Triwulan dengan triwulan sebelumnya.

Real Time Gross Settlement (RTGS)

Sistem transfer dana elektronik yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan dalam waktu seketika.

Smelter

Fasilitas pengolahan hasil tambang yang berfungsi meningkatkan kandungan logam seperti timah, nikel, tembaga, emas, dan perak hingga mencapai tingkat yang memenuhi standar sebagai bahan baku produk akhir.

- Hidrometalurgi

Proses pengolahan nikel (umumnya kadar rendah, bertipe limonit) dengan menggunakan asam sulfat untuk mengekstraksi pada tekanan yang tinggi.

- Pirometalurgi

Proses pengolahan nikel (umumnya kadar yang lebih tinggi, bertipe saprolite) dengan cara dibakar pada temperatur tinggi hingga 1500-16000 celcius.

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Sistem pertukaran data keuangan elektronik dan/atau warkat antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

Volatile Food

Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya sangat bergejolak karena faktor-faktor tertentu khususnya komoditas bahan makanan.

yoy

Year on year. Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.

Daftar Singkatan

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	NPL	Non Performing Loan
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	NTN	Nilai Tukar Nelayan
BBM	Bahan Bakar Minyak	NTP	Nilai Tukar Petani
BBNKB	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	PAD	Pendapatan Asli Daerah
BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal	PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
BLUD	Badan Layanan Umum Daerah	PLN	Perusahaan Listrik Negara
BPS	Badan Pusat Statistik	PMA	Penanaman Modal Asing
BUKU	Bank Umum Kelompok Usaha	PMDN	Penanaman Modal Dalam Negeri
CIF	Cost, Insurance and Freight	PMTB	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto
DAU	Dana Alokasi Umum	PPBKB	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
DAK	Dana Alokasi Khusus	qtq	Quarter to Quarter
DER	Debt Equity Ratio	RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
DOF	Derajat Otonomi Fiskal	RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
DPK	Dana Pihak Ketiga	RTGS	Real Time Gross Settlement
DSR	Debt Service Ratio	SBT	Saldo Bersih Tertimbang
FGD	Focus Group Discussion	SITC	Standard International Trade Classification
FOB	Free on Board	SKDU	Survei Kegiatan Dunia Usaha
FTV	Financing to Value	SKNBI	Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
IHK	Indeks Harga Konsumen	SPE	Survei Penjualan Eceran
IKK	Indeks Keyakinan Konsumen	TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
IPR	Indeks Penjualan Riil	TPID	Tim Pengendalian Inflasi Daerah
JISDOR	Jakarta Interbank Spot Dollar Rate	TPK	Tingkat Penghunian Kamar
KI	Kredit Investasi	TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
KK	Kredit Konsumsi	TTL	Tarif Tenaga Listrik
KKB	Kredit Kendaraan Bermotor	UMKM	Usaha Mikro Kecil Menengah
KMK	Kredit Modal Kerja	UTLE	Uang Tidak Layak Edar
KPA	Kredit Pemilikan Apartemen	yoy	Year on Year
KPR	Kredit Pemilikan Rumah		
LDR	Loan to Deposit Ratio		
LFR	Loan to Funding Ratio		
LNPRT	Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga		
LTV	Loan to Value		
mtm	Month to month		
NPF	Non Performing Financing		





Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Provinsi Maluku Utara

Jl. Yos Sudarso No. 1 Ternate

Telp. (0921) 3121217 - Fax (0921) 3124017

<http://www.bi.go.id>